



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;
dan
- f. BAB VI : PENUTUP.

Pasal 6

Uraian secara rinci RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: 4-261/2024



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang direncanakan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kawasan ini juga dikenal dengan istilah Solo Raya. Kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan pusat pertumbuhan di Kota Surakarta. Kabupaten di sekitar Surakarta merupakan daerah *hinterland* yang memiliki potensi unggulan termasuk Kabupaten Karanganyar.

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita yang tertulis di dalam dokumen jangka panjang nasional. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana RPJPD memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah.

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menyiapkan rancangan RPJPD. Tahapan penyusunan RPJPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 168

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang direncanakan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan. Kawasan ini juga dikenal dengan istilah Solo Raya. Kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan pusat pertumbuhan di Kota Surakarta. Kabupaten di sekitar Surakarta merupakan daerah *hinterland* yang memiliki potensi unggulannya masing-masing, termasuk Kabupaten Karanganyar.

Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita yang tertulis di dalam dokumen rencana jangka panjang nasional. Saat ini Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja antara lain mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Bappeda perlu menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Ranwal RPJPD). Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan rancangan awal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dokumen perencanaan wajib memperhatikan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Maksud dari amanat ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Isu strategis yang menjadi rekomendasi dalam dokumen KLHS menjadi bagian dalam penegasan isu strategis RPJPD. Rekomendasi sasaran strategis dan

kebijakan serta target dalam dokumen KLHS juga menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD.

Di era otonomi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam tahapan pembangunan daerah pada Tahun 2025–2045 dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini dikarenakan RPJPD menjadi panduan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan menjadi dasar penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali sebagai tonggak kemajuan daerah (*milestone*) atau perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. RPJPD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen perencanaan yang akan dianalisis adalah dokumen perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi, KLHS, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, dan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025.

1.3.1. Hubungan Antara RPJPN dengan RPJPD

Dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN 2025 – 2045 (draft rancangan) yang telah ada. Hal ini dimaksud supaya pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar selaras dengan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional secara terintegrasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 (Generasi Emas 2045) merupakan sebuah rencana, dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Diseminasi gagasan itu gencar dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang. Pada momentum satu abad kelak Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya lainnya. Hal itu dapat diwujudkan jika generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi).

1.3.2. Hubungan Antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

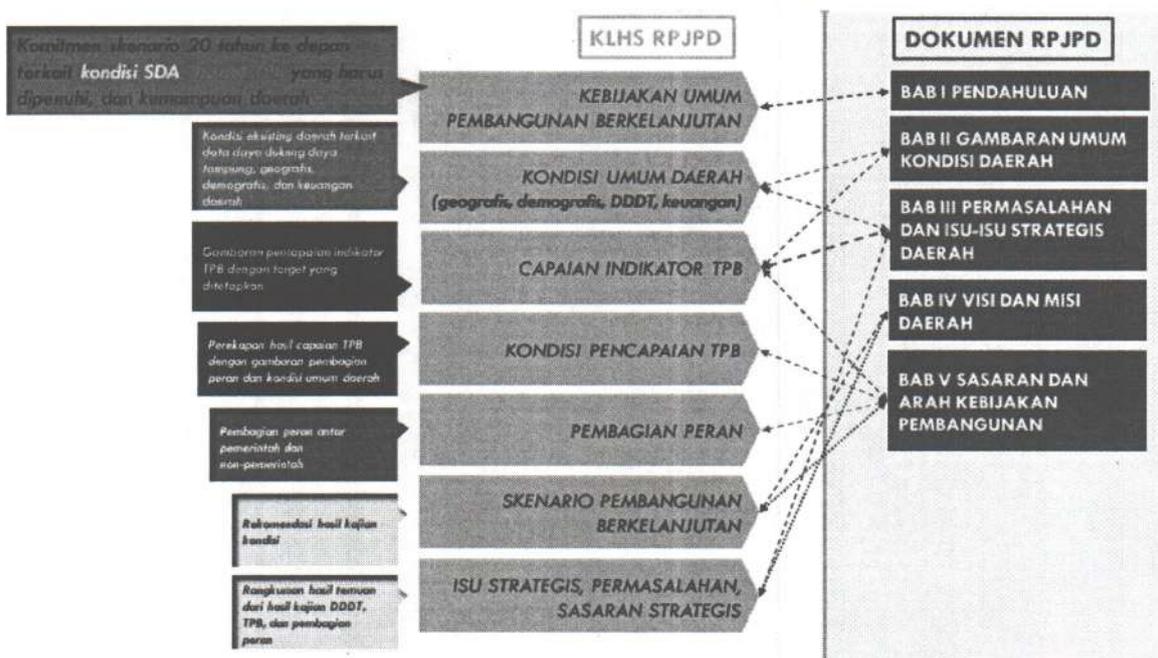
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025–2045 agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang dapat tersusun secara sinergis meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD dengan RTRW

Pembangunan jangka panjang juga harus memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pemanfaatan ruang, pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan dokumen RTRW.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Pedoman Umum RPJPD dan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan pedoman dari Bappenas terkait penyelarasan RPJPN dan RPJPD, terutama tentang sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan dan dokumen perencanaan multi sektoral, antara lain : KLHS dan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.



Gambar 1.1.
Integrasi Muatan Laporan KLHS RPJPD ke Dalam RPJPD

Berdasarkan analisis perumusan hasil isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Karanganyar yang dituangkan dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Karanganyar, maka dapat ditentukan sasaran strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

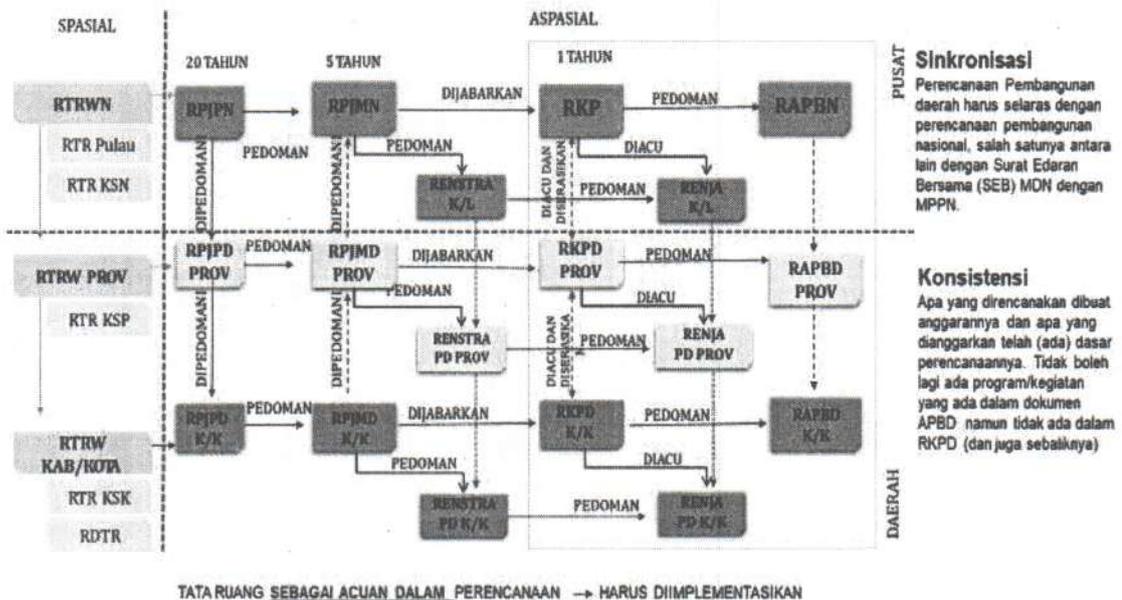
**Perumusan Isu dan Sasaran Strategis
KLHS RPJPD Kabupaten Karanganyar**

No. dan Tujuan TPB	Isu Prioritas PB	Sasaran Strategis
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan	Kemiskinan	Meningkatnya kehidupan sosial bagi masyarakat miskin
		Meningkatnya kehidupan ekonomi bagi masyarakat miskin dengan

No. dan Tujuan TPB	Isu Prioritas PB	Sasaran Strategis
		<p>adanya : peningkatan kesempatan bekerja, dan berwirausaha</p> <p>Meningkatnya kehidupan ekonomi bagi masyarakat miskin dengan adanya : peningkatan kompetensi dan skill tenaga kerja</p>
<p>Tujuan 8 : Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Peningkatan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi (mengurangi pengangguran, keterpihakan kepada pelaku usaha dan UMKM, pembangunan perekonomian yang bertumpu pada potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata)</p>	<p>Meningkatnya kesempatan bekerja, dan berwirausaha</p> <p>Meningkatnya kompetensi dan skill tenaga kerja</p> <p>Keberlanjutan dan peningkatan sektor industri</p> <p>Meningkatnya sektor ekonomi daerah unggulan dan IMKM</p> <p>Keberlanjutan dan peningkatan sektor pertanian</p> <p>Keberlanjutan dan peningkatan sektor pariwisata</p> <p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p>
<p>Tujuan 9 : Industri, inovasi, & infrastruktur</p>	<p>Peningkatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur (pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih (ketersediaan air bersih), jalan, jaringan drainase, air limbah)</p>	<p>Meningkatnya penyediaan dan pembangunan infrastruktur</p>
<p>Tujuan 3 : Kehidupan sehat & Prasejahtera Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas Tujuan 5 : Kesetaraan Gender</p>	<p>Peningkatan kualitas SDM (melalui peningkatan layanan jasa kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan gender, perlindungan anak)</p>	<p>Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan</p> <p>Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan pendidikan</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan</p> <p>Meningkatnya perlindungan pada anak</p>
<p>Tujuan 15: Ekosistem daratan</p>	<p>Alih Fungsi Lahan</p>	<p>Terkendalinya pengalih fungsi lahan menjadi lahan terbangun non hijau</p>
<p>Tujuan 11: Kota & Permukiman yang berkelanjutan Tujuan 12: Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab Tujuan 13: Penanganan dan perubahan iklim Tujuan 15: Ekosistem daratan</p>	<p>Peningkatan dan pengoptimalan pengelolaan persampahan, limbah medis, limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah B3</p>	<p>Meningkatnya pengurangan sampah dan sumbernya</p> <p>Meningkatnya kualitas dan jumlah prasarana persampahan</p> <p>Meningkatnya pengelolaan air limbah rumah tangga dan industri</p> <p>Meningkatnya pengelolaan B3, limbah medis</p> <p>Berkurangnya kerusakan lingkungan hidup</p>

No. dan Tujuan TPB	Isu Prioritas PB	Sasaran Strategis
Tujuan 11: Kota & Permukiman yang berkelanjutan	Kebencanaan	Meningkatnya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana
Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
		Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kapasitas kinerja pemerintah daerah

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikemukakan pada skema sebagai berikut :



Gambar 1.2.
Sinkronisasi Antara Perencanaan Pembangunan Pusat dan Pemerintah Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah sebagai pedoman penyusunan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dituangkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 adalah :

1. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

2. Pedoman dalam menyusun visi, misi, strategi dan kebijakan setiap periode pembangunan jangka menengah.
3. Pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah
4. Pedoman dalam melakukan evaluasi akhir pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045

Sistematika RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, tersusun dalam enam (6) bab, secara ringkas dikemukakan, sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi : latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika.
2. **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.** Bab ini memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, menguraikan secara singkat tentang hasil evaluasi RPJPD, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
3. **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.** Bab ini menjelaskan permasalahan setiap aspek pembangunan dan isu strategis daerah jangka Panjang dengan memperhatikan tantangan atau dimensi internasional, regional dan daerah.
4. **Bab IV Visi dan Misi Daerah.** Bab ini **menjelaskan** dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. **Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.** Bab ini memuat tentang Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target per periode.
6. **Bab VI Penutup.** Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dan transisi pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografis

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak antara 1100'40"- 1100'70" Bujur Timur dan 700'28" - 700'46" Lintang Selatan, dengan luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 76.778,64 Ha atau 2,36 persen dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 0,04 persen dari total luas Indonesia. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 2.004 rukun warga dan 6.508 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan, Kabupaten Magetan dan Ngawi dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta di sebelah barat.

Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur yang ada di Kabupaten Karanganyar, selama tahun 2022 hari hujan terbanyak adalah 21,67 hari di bulan Maret dengan curah hujan sebesar 611 mm, sedangkan hari hujan terendah adalah 3,17 hari pada bulan Juli dengan curah hujan hampir 29,83 mm.

Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.

Berdasarkan tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar, bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Topografi

Berdasarkan topografinya, rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar sekitar 511 meter di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 95 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut (mdpl).

Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 76.778,64 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 19.945,67 Ha dan lahan kering 56.832,97 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi 12.926 Ha, sedangkan sawah tidak berpengairan/ non irigasi sebesar 7.019 Ha. Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2022 menurut peta mencapai 76.778,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang.

Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:

a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah:

Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 4 kawasan bencana gerakan tanah:

- 1) Sangat rendah, meliputi wilayah Kecamatan Colomadu, sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Karanganyar, Mojogedang, Kerjo, Karangpandan, Jumantono dan Matesih.
- 2) Rendah, meliputi wilayah Kecamatan Gondangrejo, Jaten, Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, Karanganyar, Kerjo, Karangpandan, Jenawi, Ngargoyoso, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro dan Tawangmangu
- 3) Menengah, meliputi wilayah Kecamatan Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Karangpandan, Kerjo, Mojogedang, Kebakkramat, Karanganyar dan Gondangrejo
- 4) Tinggi, meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Tawangmangu dan Jatiyoso

b. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.

c. Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu.

Berdasarkan gambaran kondisi jasa ekosistem, menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi risiko bencana yang mungkin terjadi.

Daya Dukung Pangan

Analisis kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan luas lahan pertanian pangan (luas panen) dengan kebutuhan lahan pertanian pangan sesuai dengan standar kebutuhan pangan perkapita. Kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan dihitung dengan mempertimbangkan tren perkembangan penduduk yang mempengaruhi kebutuhan pangan perkapita, sehingga dapat diketahui kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan produktivitas lahan. Luas lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian sebagai supply (penyedia/ketersediaan pangan), sedangkan perkembangan penduduk sebagai demand (kebutuhan pangan). Pada Tahun 2021, luas panen sawah di Kabupaten Karanganyar seluas 51.998,20 ha dengan luas panen terbesar berada di Kecamatan Kebakramat yaitu seluas 5.958,70 ha. Selengkapnya pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Luas Tanam dan Luas Panen Beras Kabupaten Karanganyar Tahun 2021

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Bukan Sawah		Total	
		Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
1	Jatipuro	2.487,30	2.409,60	-	-	2.487,30	2.409,60
2	Jatiyoso	3.051,00	3.064,60	-	-	3.051,00	3.064,60
3	Jumapolo	3.046,30	2.835,00	48,00	48,00	3.094,30	2.883,00
4	Jumantono	2.809,70	2.767,20	-	-	2.809,70	2.767,20
5	Matesih	2.798,20	3.017,00	-	-	2.798,20	3.017,00
6	Tawangmangu	537,00	595,10	-	-	537,00	595,10
7	Ngargoyoso	590,90	580,20	-	-	590,90	580,20
8	Karangpandan	4.207,90	4.106,10	-	-	4.207,90	4.106,10
9	Karanganyar	4.079,20	4.105,40	-	-	4.079,20	4.105,40
10	Tasikmadu	5.127,20	4.980,20	-	-	5.127,20	4.980,20
11	Jaten	3.479,30	3.419,20	-	-	3.479,30	3.419,20
12	Colomadu	1.333,10	1.319,60	-	-	1.333,10	1.319,60
13	Gondangrejo	3.769,10	3.769,20	-	-	3.769,10	3.769,20
14	Kebakramat	5.949,10	5.958,70	-	-	5.949,10	5.958,70
15	Mojogedang	4.663,40	4.469,60	-	-	4.663,40	4.469,60

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Bukan Sawah		Total	
		Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen	Luas Tanam	Luas Panen
16	Kerjo	3.228,10	3.007,20	-	-	3.228,10	3.007,20
17	Jenawi	1.638,30	1.546,30	-	-	1.638,30	1.546,30
Kabupaten Karanganyar		52.795,10	51.950,20	48,00	48,00	52.843,10	51.998,20

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Dari hasil analisis, diperoleh bahwa daya dukung pangan pada Tahun 2021 berada pada kategori baik hingga Tahun 2045. Data yang digunakan terkait luas tanam dan luas panen pada Tahun 2021 menggunakan data BPS, sedangkan pada Tahun 2045 diasumsikan bahwa luasan KP2B di dalam RTRW Kabupaten Karanganyar merupakan luas tanam yang dipertahankan hingga Tahun 2045. Luas panen pada Tahun 2045 diasumsikan sebesar 3 x (tiga kali) luas tanam.

Adapun dilihat dari sebarannya, daya dukung pangan pada Tahun 2021 tidak sepenuhnya berada pada kategori baik, namun terdapat beberapa kecamatan yang berada pada kategori buruk yaitu Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Colomadu. Namun, walaupun ada beberapa kecamatan yang berada pada kategori buruk, namun secara total Kabupaten Karanganyar memiliki daya dukung pangan yang baik. Hal ini juga sama dengan kondisi daya dukung pangan pada Tahun 2045, hampir seluruh kecamatan berada pada kategori baik, hanya Kecamatan Tawangmangu, Colomadu, Gondangrejo, dan Karanganyar yang berada pada kondisi buruk.

Perubahan tingkat kecenderungan pangan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan berubahnya tingkat kecenderungan ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar adalah meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan pangan masyarakat juga meningkat disetiap tahunnya. Jumlah penduduk yang meningkat tidak hanya menyebabkan kebutuhan pangan juga meningkat namun juga berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan lahan pertaniannya.

Dari hasil analisis, kebutuhan luas panen pada Tahun 2022 idealnya sebesar 28.068 ha dan meningkat menjadi 42.858 ha pada Tahun 2045. Nilai tersebut sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan luas panen sebenarnya pada Tahun 2021 yaitu sebesar 51.998,20 ha. Hal ini menandakan bahwa pada Tahun 2021 dan 2045 memiliki luasan lahan pertanian yang sebenarnya mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, walaupun terdapat beberapa kecamatan yang mengalami kategori daya dukung pangan buruk. Namun ini sudah tertutupi dengan masukan luas panen dari kecamatan lainnya yang memiliki kategori daya dukung pangan yang tinggi. Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Kebutuhan Luas Panen
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2045

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kebutuhan Luas Panen		
		2022	2033	2045	2022	2033	2045
1	Jatipuro	35.010	45.499	73.271	1.033	1.343	2.162
2	Jatiyoso	40.081	45.493	57.274	1.183	1.342	1.690
3	Jumapolo	43.431	55.760	87.826	1.282	1.645	2.592
4	Jumantono	50.536	63.186	94.848	1.491	1.864	2.799
5	Matesih	45.328	52.692	69.281	1.338	1.555	2.044
6	Tawangmangu	47.666	52.504	62.594	1.406	1.549	1.847
7	Ngargoyoso	37.613	45.197	63.116	1.110	1.334	1.862
8	Karangpandan	44.386	51.348	66.921	1.310	1.515	1.975
9	Karanganyar	86.602	98.536	124.602	2.555	2.908	3.677
10	Tasikmadu	67.484	80.240	109.925	1.991	2.368	3.244
11	Jaten	84.833	89.587	98.923	2.503	2.643	2.919
12	Colomadu	75.662	79.104	85.768	2.233	2.334	2.531
13	Gondangrejo	89.786	109.526	157.196	2.649	3.232	4.638
14	Kebakkramat	65.163	70.680	81.936	1.923	2.086	2.418
15	Mojogedang	71.514	87.247	125.245	2.110	2.574	3.696
16	Kerjo	38.406	44.317	57.493	1.133	1.308	1.696
17	Jenawi	27.714	30.484	36.248	818	899	1.070
Kabupaten Karanganyar		951.215	1.101.398	1.452.468	28.068	32.499	42.858

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Dari hasil analisis, kebutuhan lahan pertanian pada Tahun 2045 sebesar 14.286 ha. Jika dibandingkan dengan ketersediaan lahan di Kabupaten Karanganyar, luas lahan yang dipertahankan seluas 21.015,93 ha, maka status daya dukung pangannya berada pada kategori surplus, walaupun terdapat beberapa kecamatan yang berada pada kategori defisit yaitu Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, dan Tawangmangu. Hal ini dikarenakan memang di Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo pengembangan wilayahnya diarahkan pada kegiatan perkotaan, sedangkan Kecamatan Tawangmangu memiliki karakteristik sebagai kawasan perlindungan bagi kawasan di bawahnya/ resapan air.

Tabel 2.3.
Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2045

No.	Kecamatan	Kebutuhan Lahan Pertanian	KP2B Rencana Pola Ruang RTRW	Nilai Ketersediaan/ Kebutuhan	Status
1	Jatipuro	721	1.542,21	2,14	Surplus
2	Jatiyoso	563	699,79	1,24	Surplus
3	Jumapolo	864	2.924,73	3,39	Surplus
4	Jumantono	933	2.234,14	2,39	Surplus
5	Matesih	681	1.206,14	1,77	Surplus
6	Tawangmangu	616	522,06	0,85	Defisit
7	Ngargoyoso	621	624,33	1,01	Surplus
8	Karangpandan	658	1.376,02	2,09	Surplus

No.	Kecamatan	Kebutuhan Lahan Pertanian	KP2B Rencana Pola Ruang RTRW	Nilai Ketersediaan/ Kebutuhan	Status
9	Karanganyar	1.226	1.018,79	0,83	Surplus
10	Tasikmadu	1.081	1.355,60	1,25	Surplus
11	Jaten	973	982,45	1,01	Surplus
12	Colomadu	844	252,54	0,30	Defisit
13	Gondangrejo	1.546	567,24	0,37	Defisit
14	Kebakkramat	806	2.038,31	2,53	Surplus
15	Mojogedang	1.232	2.192,34	1,78	Surplus
16	Kerjo	565	1.067,94	1,89	Surplus
17	Jenawi	357	411,32	1,15	Surplus
Kabupaten Karanganyar		14.286	21.015,93	1,47	Surplus

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Daya Dukung Air

Perhitungan kebutuhan air menggunakan pendekatan jumlah penduduk dikarenakan semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar beban daya dukung lingkungannya. Peningkatan jumlah penduduk akan menuntut peningkatan kebutuhan pokok, kebutuhan lahan yang meningkat, perubahan social ekonomi, dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu juga menggunakan pendekatan penggunaan lahan yang membutuhkan air. Perhitungan ketersediaan air ditentukan melalui metode rasional (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung LH dalam Penatan Ruang Wilayah). Perhitungan ini dilakukan karena data ketersediaan air dari wilayah air sungai tidak tersedia. Adapun pemanfaatan air menggunakan asumsi sebesar 30% dari air limpasan. Semua data kemudian dibuat dalam bentuk grid untuk dilakukan analisis ketersediaan air, kebutuhan air dan status daya dukung airnya.

Kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar dihitung dari kebutuhan air domestik dan non domestik yang kemudian diakumulasi menjadi data kebutuhan air total berbasis penggunaan lahan. Kebutuhan air nantinya dibuat melalui pendekatan system grid dengan resolusi 5" x 5" ($\pm 0,150 \times 0,150$ km).

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kebutuhan air Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 sebesar 2.014.475.532,78 m³ dan meningkat menjadi 2.566.347.853,77 m³ pada tahun 2045. Volume tersebut meningkat sebesar 36,5% dari tahun 2022. Kebutuhan air terbesar berada di Kecamatan Gondangrejo dengan kebutuhan air pada Tahun 2022 sebesar 178.695.741,79 m³ dan pada Tahun 2045 meningkat menjadi 274.191.136,22 m³. Sedangkan kebutuhan air terendah berada di Kecamatan Jenawi dengan kebutuhan air mencapai 67.573.416,19 m³ pada Tahun 2022 dan menjadi 85.236.647,80 m³ pada Tahun 2045. Kebutuhan air yang besar tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang memang relatif banyak di Kecamatan Gondangrejo dan paling sedikit di Kecamatan Jenawi. Secara umum, kebutuhan air di Kabupaten

Karanganyar pada Tahun 2022 sampai pada Tahun 2045 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Kebutuhan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2045

No	Kecamatan	Tahun (m ³)		Perubahan Meningkat (m ³)	Persentase Perubahan
		2022	2045		
1	Colomadu	130.199.632,52	143.526.934,72	13.327.302,20	10,24
2	Gondangrejo	178.695.741,79	274.191.136,22	95.495.394,43	53,44
3	Jaten	157.643.567,23	177.545.134,16	19.901.566,93	12,62
4	Jatipuro	83.595.710,82	140.421.372,38	56.825.661,56	67,98
5	Jatiyoso	108.072.093,07	107.971.520,22	-100.572,85	-0,09
6	Jenawi	67.573.416,19	85.236.647,80	17.663.231,61	26,14
7	Jumantono	120.684.310,68	190.417.947,26	69.733.636,58	57,78
8	Jumapolo	109.215.306,88	176.928.408,39	67.713.101,51	62,00
9	Karanganyar	168.421.427,71	18.568.354,93	-149.853.072,78	-88,98
10	Karangpandan	97.602.254,36	132.119.107,53	34.516.853,17	35,36
11	Kebakkramat	136.234.809,84	161.652.218,77	25.417.408,93	18,66
12	Kerjo	96.190.624,10	124.027.894,60	27.837.270,50	28,94
13	Matesih	93.526.906,16	129.334.754,71	35.807.848,55	38,29
14	Mojogedang	150.388.856,05	234.417.648,54	84.028.792,49	55,87
15	Ngargoyoso	88.461.301,90	130.711.508,85	42.250.206,95	47,76
16	Tasikmadu	129.131.937,14	194.587.601,05	65.455.663,91	50,69
17	Tawangmangu	98.837.636,36	144.689.663,66	45.852.027,30	46,39
Kabupaten Karanganyar		2.014.475.532,78	2.566.347.853,77	551.872.320,99	27,40

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Ketersediaan air pada suatu lahan merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsi air tanah sebagai sumber pasokan air bersih untuk berbagai kebutuhan, terutama di saat kemarau panjang dimana air permukaan tidak mencukupi. Perhitungan ketersediaan air juga dilakukan melalui pendekatan system grid dengan resolusi 5" x 5" ($\pm 0,150 \times 0,150$ km). Perhitungan ketersediaan air menggunakan metode rasional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung LH dalam Penataan Ruang Wilayah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan data debit DAS di wilayah Kabupaten Karanganyar. Adapun dari limpasan air hujan tersebut, volume ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan diasumsikan sebesar 30% dari volume total. Adapun ketersediaan air diasumsikan menggunakan air permukaan dan bukan air tanah, yang berarti kegiatan pemanfaatan ruang secara eksisting mendayagunakan sumber air terbarukan yang lebih cepat dibandingkan air tanah dengan resiko keberlanjutan yang lebih besar.

Dari hasil analisis, ketersediaan air di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 sebesar 61.889.895.932,62 m³ dan yang dapat dimanfaatkan sebesar 49.511.916.746,08 m³. Ketersediaan air terbesar berada di Kecamatan Ngargoyoso yaitu sebesar 6,006,936,301 m³ dan terkecil berada di Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 532,478,756 m³.

Tabel 2.5.
Ketersediaan Air Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Persentase (%)
1	Colomadu	199.679.533	1,08
2	Gondangrejo	996.217.137	5,37
3	Jaten	405.537.744	2,18
4	Jatipuro	860.998.931	4,64
5	Jatiyoso	2.126.120.023	11,45
6	Jenawi	1.598.204.737	8,61
7	Jumantono	1.050.552.826	5,66
8	Jumapolo	1.251.290.837	6,74
9	Karanganyar	809.497.855	4,36
10	Karangpandan	1.047.152.272	5,64
11	Kebakkramat	631.681.705	3,40
12	Kerjo	1.162.991.337	6,26
13	Matesih	775.376.931	4,18
14	Mojogedang	996.634.513	5,37
15	Ngargoyoso	2.252.601.113	12,13
16	Tasikmadu	476.773.264	2,57
17	Tawangmangu	1.925.658.022	10,37
Kabupaten Karanganyar		18.566.968.780	100,00

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Kebutuhan air di Kabupaten Karanganyar dihitung dari kebutuhan air domestik dan non domestik. Status daya dukung air merupakan perbandingan antara ketersediaan air (SA) dengan kebutuhan air (DA), semakin besar kebutuhan air maka ketersediaan air semakin lama semakin berkurang. Berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan D3TLH Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Bila ketersediaan air (SA) > kebutuhan air (DA), maka daya dukung air dinyatakan surplus (baik);
- Bila ketersediaan air (SA) < kebutuhan air (DA), maka daya dukung air dinyatakan defisit (buruk).

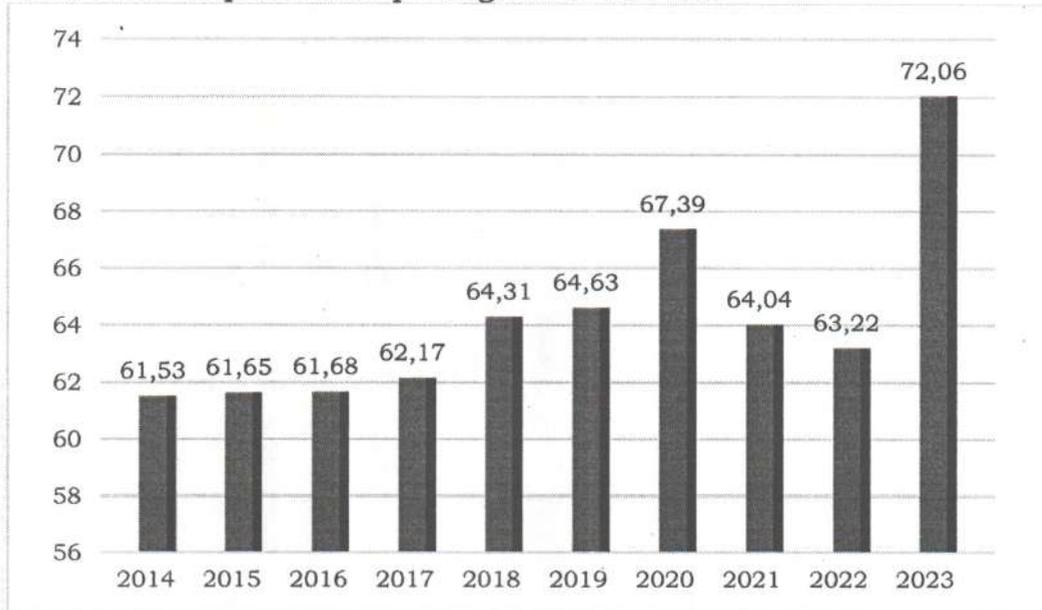
Tabel 2.6.
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³)	Kebutuhan Air 2022 (m ³)	Nilai	Kebutuhan Air 2045 (m ³)	Nilai	Status
1	Colomadu	199.679.533	130.199.632,52	1,53	143.526.934,72	1,39	Tidak melampaui
2	Gondangrejo	996.217.137	178.695.741,79	5,57	274.191.136,22	3,63	Tidak melampaui
3	Jaten	405.537.744	157.643.567,23	2,57	177.545.134,16	2,28	Tidak melampaui
4	Jatipuro	860.998.931	83.595.710,82	10,30	140.421.372,38	6,13	Tidak melampaui
5	Jatiyoso	2.126.120.023	108.072.093,07	19,67	107.971.520,22	19,69	Tidak melampaui
6	Jenawi	1.598.204.737	67.573.416,19	23,65	85.236.647,80	18,75	Tidak melampaui
7	Jumantono	1.050.552.826	120.684.310,68	8,70	190.417.947,26	5,52	Tidak melampaui
8	Jumapolo	1.251.290.837	109.215.306,88	11,46	176.928.408,39	7,07	Tidak melampaui
9	Karanganyar	809.497.855	168.421.427,71	4,81	18.568.354,93	43,60	Tidak melampaui
10	Karangpandan	1.047.152.272	97.602.254,36	10,73	132.119.107,53	7,93	Tidak melampaui
11	Kebakkramat	631.681.705	136.234.809,84	4,64	161.652.218,77	3,91	Tidak melampaui
12	Kerjo	1.162.991.337	96.190.624,10	12,09	124.027.894,60	9,38	Tidak melampaui
13	Matesih	775.376.931	93.526.906,16	8,29	129.334.754,71	6,00	Tidak melampaui
14	Mojogedang	996.634.513	150.388.856,05	6,63	234.417.648,54	4,25	Tidak melampaui
15	Ngargoyoso	2.252.601.113	88.461.301,90	25,46	130.711.508,85	17,23	Tidak melampaui
16	Tasikmadu	476.773.264	129.131.937,14	3,69	194.587.601,05	2,45	Tidak melampaui
17	Tawangmangu	1.925.658.022	98.837.636,36	19,48	144.689.663,66	13,31	Tidak melampaui
Kabupaten Karanganyar		18.566.968.780	2.014.475.532,78	9,22	2.566.347.853,77	7,23	Tidak melampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Kualitas Lingkungan Hidup

Gambaran kualitas lingkungan hidup dapat ditunjukkan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan/hutan. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2014 sebesar 61,53. IKLH terus mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 64,63 dan tahun 2021 sebesar 67,39. Peningkatan angka IKLH yang cukup signifikan di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pengaruh dari adanya pandemi covid-19 (pembatasan kegiatan bersosialisasi). Sehingga potensi untuk terjadinya polusi juga menurun. Berdasarkan Surat Sekditjen PPKL Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 terkait konversi capaian IKLH Tahun 2023, maka hasil pengukuran IKLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 menjadi IKLH sebesar 72,06. Selengkapannya terkait perkembangan capaian IKLH Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

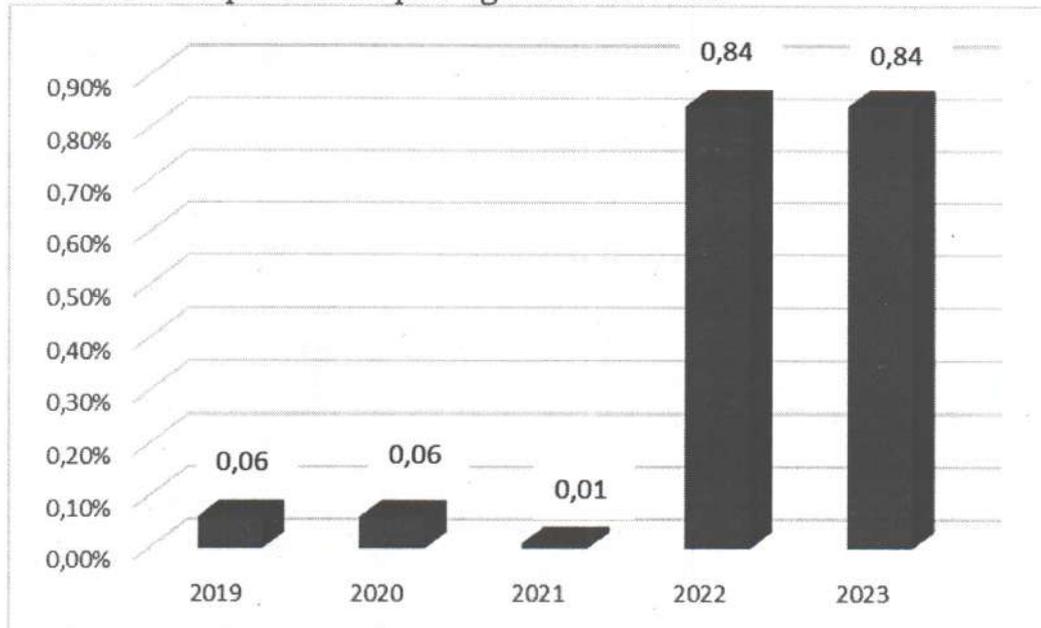


Gambar 2.1.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Kualitas lingkungan hidup disuatu daerah juga dilihat dari pengelolaan sampah. Persampahan telah menjadi permasalahan penting di wilayah kabupaten Karanganyar, khususnya pada kawasan permukiman perkotaan. Volume sampah yang semakin meningkat, tempat pembuangan sampah yang semakin sempit dan sulitnya mencari tempat pembuangan sampah baru merupakan permasalahan utama yang mendesak untuk segera dijadikan alternatif solusinya. Indikator kinerja terkait pengelolaan sampah meliputi : persentase pengurangan sampah, persentase pengangkutan sampah, persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoperasian TPA.

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 0,06% sampah yang terolah, terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 0,84%. Selengkapnya terkait perkembangan capaian Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Karanganyar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2.

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2023 diperoleh berdasarkan perhitungan neraca pengelolaan sampah sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

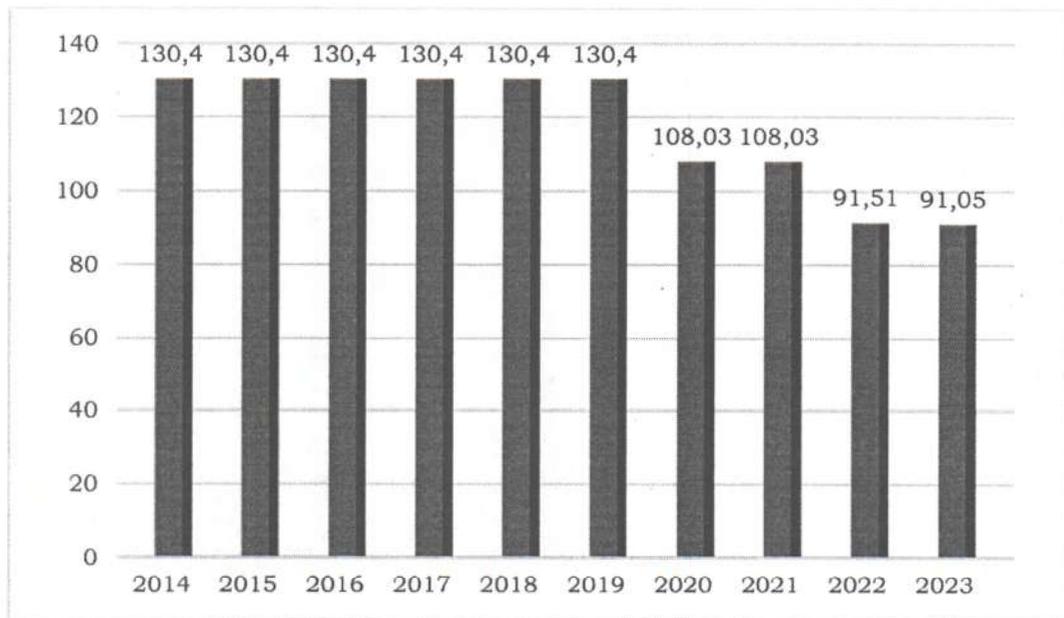
No	Keterangan	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	137.065,97
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	4.921,23
	Persentase pengurangan sampah	3,59
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	3.764,23
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	1.157
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	32.850
	Persentase penanganan sampah	23,97
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	

No	Keterangan	NILAI (Ton/tahun)
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	0
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan <i>upcycle</i>)	0
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	32.850
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	32.850
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	37.771,23
	Persentase sampah terkelola	27,56
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	99.294,74
	Persentase sampah tidak terkelola	72,44

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 sebesar 0,84 %. Sedangkan sampah terkelola sebesar 27,56 dan sampah tidak terkelola sebesar 72,44%.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan bahwa Kabupaten Karanganyar Tingkat ancaman bencana Kabupaten Karanganyar berdasarkan IRBI tahun 2023 menunjukkan tingkat ancaman sedang dengan skor terakhir sebesar 91,05. IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Indeks risiko bencana di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.



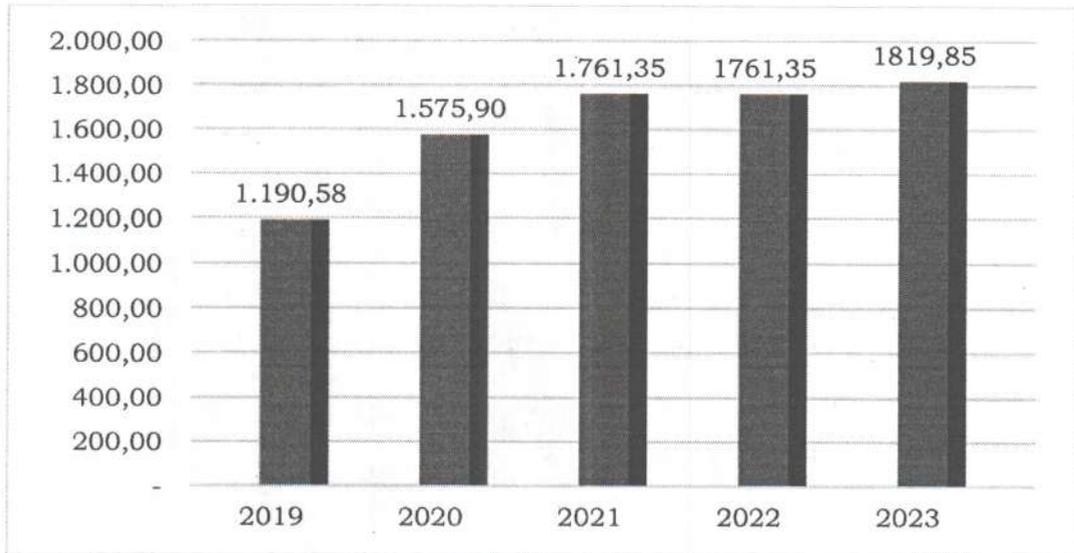
Gambar 2.3.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023

Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas yang menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Beberapa GRK utama termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan gas-gas berfluorinasi seperti hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₆). Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Ketika intensitas emisi GRK menurun, ini menunjukkan bahwa ekonomi atau sektor tertentu menjadi lebih efisien dalam menggunakan energi dan menghasilkan lebih sedikit emisi GRK per unit output. Namun, penurunan intensitas emisi tidak selalu berarti bahwa total emisi GRK juga menurun, terutama jika ekonomi atau sektor tersebut tumbuh dengan cepat. Meski intensitas emisi bisa menurun, total emisi GRK dapat tetap meningkat jika ada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Misalnya, jika produk domestik regional bruto meningkat dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan penurunan intensitas emisi, maka emisi total tetap bisa meningkat.

Penurunan emisi GRK di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 1.190,58 TonCO₂eq, kemudian meningkat sebesar 629,27 TonCO₂eq di tahun 2023 menjadi 1.819,85 TonCO₂eq. Selengkapnya terkait penurunan emisi GRK di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4.

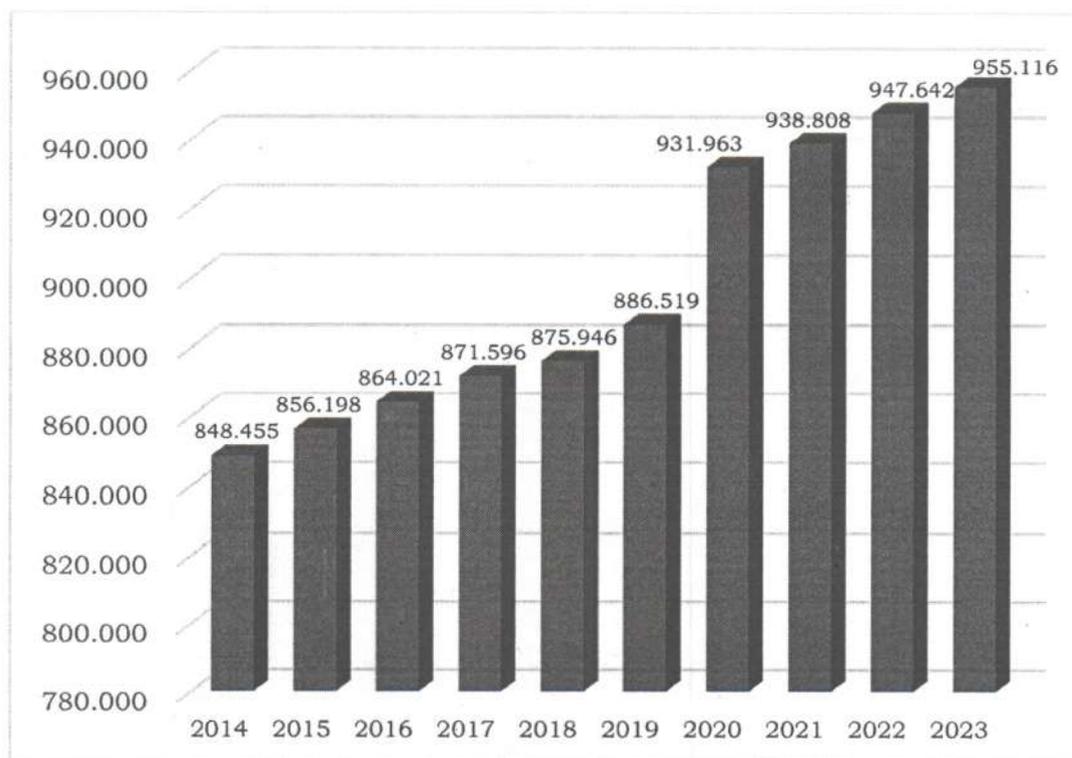
Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (TonCO2eq)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

2.1.2. Kondisi Demografis

Kondisi demografi menunjukkan potensi sumber daya manusia yang merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya pembangunan dan partisipasinya sangat diperlukan agar kinerja pembangunan daerah makin pesat. Kondisi demografi menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi penduduk lainnya.

Penduduk Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sejak 2014-2023, cenderung menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 848.455 jiwa, meningkat menjadi 955.116 jiwa di tahun 2023.



Gambar 2.5.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan kurang merata dan konsentrasi penduduk terpusat di daerah Colomadu atau daerah pusat pemerintahan dan perdagangan. Persebaran yang tidak merata ini mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Colomadu, Jaten dan Tasikmadu. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gondangrejo, yaitu 90.296 jiwa (9,45%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Jenawi, yaitu 27.735 jiwa (2,90%).

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2023

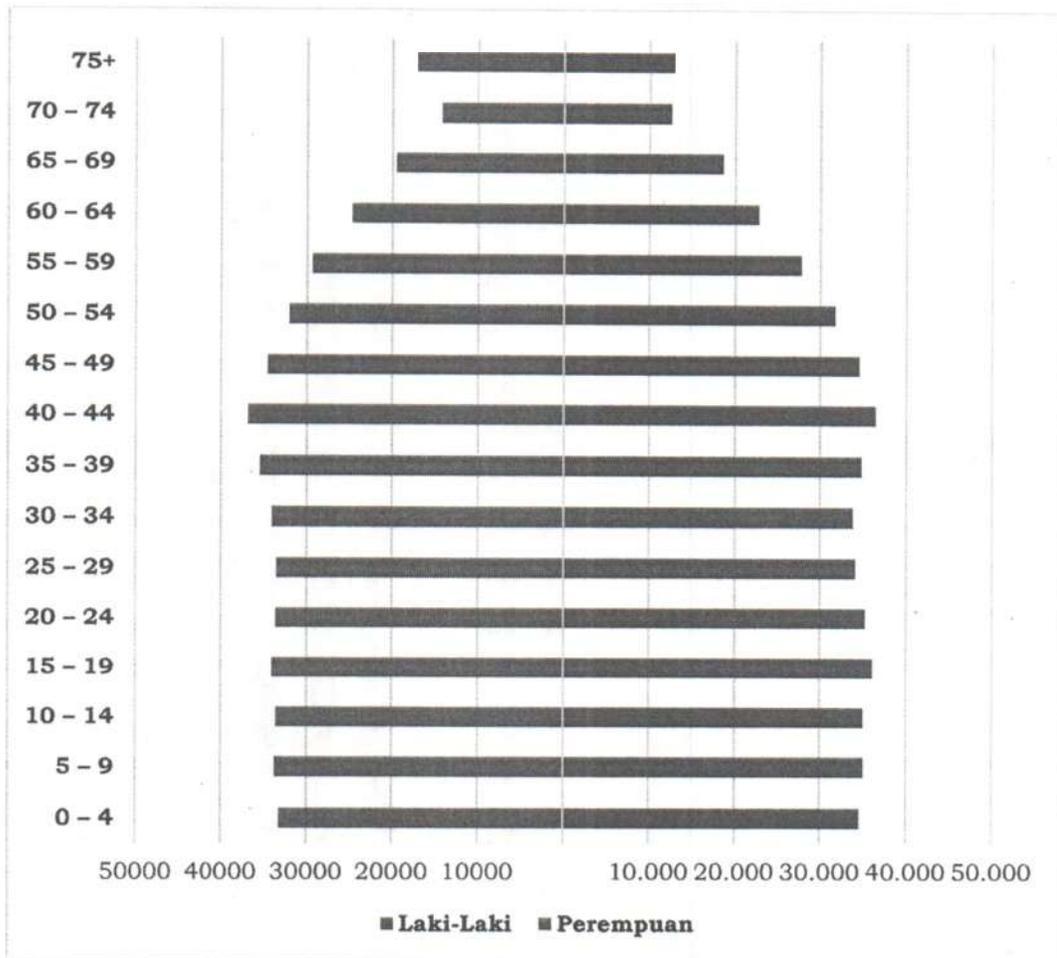
Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Jatipuro	17.500	17.791	35.291	3,69	98,36	1.027
Jatiyoso	20.253	19.918	40.171	4,21	101,68	598
Jumapolo	21.845	21.910	43.755	4,58	99,7	786
Jumantono	25.234	25.612	50.846	5,32	98,52	950
Matesih	22.702	22.763	45.465	4,76	99,73	1.731
Tawangmangu	24.064	23.633	47.697	4,99	101,82	681
Ngargoyoso	18.822	18.967	37.789	3,96	99,24	578
Karangpandan	22.043	22.469	44.512	4,66	98,1	1.305
Karanganyar	43.180	43.631	86.811	9,09	98,97	2.017

Kecamatan	Penduduk (jiwa)			%	Sex Ratio (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Tasikmadu	34.123	34.922	69.045	7,23	97,71	2.502
Jaten	42.411	42.299	84.710	8,87	100,26	3.315
Colomadu	37.493	37.917	75.410	7,9	98,88	4.822
Gondangrejo	45.370	44.926	90.296	9,45	100,99	1.590
Kebakkramat	32.437	32.731	65.168	6,82	99,1	1.787
Mojogedang	35.682	36.220	71.902	7,53	98,51	1.349
Kerjo	19.193	19.320	38.513	4,03	99,34	823
Jenawi	13.901	13.834	27.735	2,9	100,48	495
Kabupaten Karanganyar	476.253	478.863	955.116	100	99,45	1.244

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2024

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan angka 99,45 pada tahun 2023. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 99 laki-laki. Perincian jumlah, dan kepadatan penduduk dikemukakan sebagai berikut.

Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut kelompok umur pada tahun 2023, terbesar adalah : (1) kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 655.369 jiwa (68,62%); (2) kelompok belum produktif (usia <15 tahun) sebesar 205.068 jiwa (21,47%) dan (3) kelompok tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) sebesar 94.679 jiwa (9,91%). Rasio beban ketergantungan sebesar 45,74 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang usia tidak produktif, hal ini termasuk sangat baik, sehingga Kabupaten Karanganyar telah memasuki "bonus demografi" yang sangat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

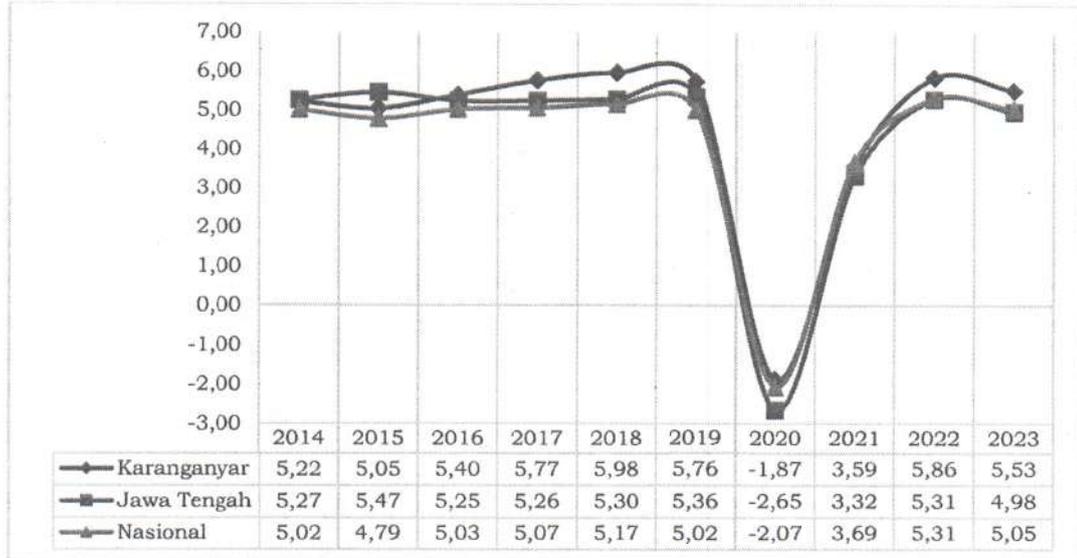
Pertumbuhan penduduk tidak hanya mengubah jumlah penduduk yang ada tetapi juga mempengaruhi struktur kependudukan (transisi demografi) di mana jumlah penduduk usia produktif terus mengalami peningkatan sedangkan jumlah kelahiran (fertilitas) dan angka kematian mengalami penurunan, sejalan dengan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Dengan demikian maka perhatian akan peningkatan pendidikan, keterampilan dan standardisasi keahlian bagi tenaga kerja usia produktif semakin penting di masa mendatang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dalam periode 2014-2023 selalu diatas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020 dan 2021 dibawah 5%, hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga pada tahun 2020 dan 2021 masih dalam masa pemulihan ekonomi. Setelah masa pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 5,87%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi

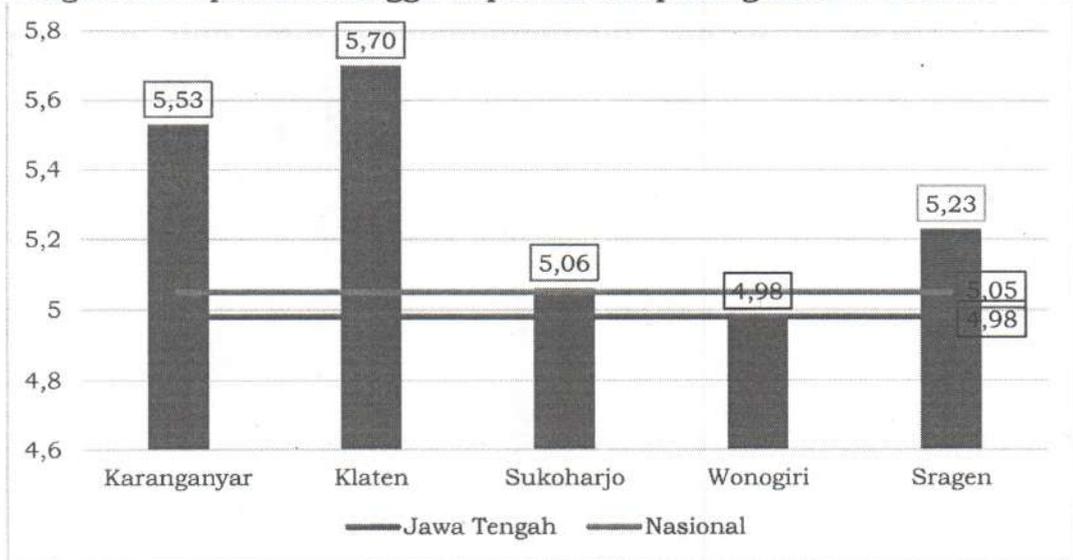
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.7.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga masih berada di bawah Kabupaten Klaten, namun berada di atas Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada gambar berikut.



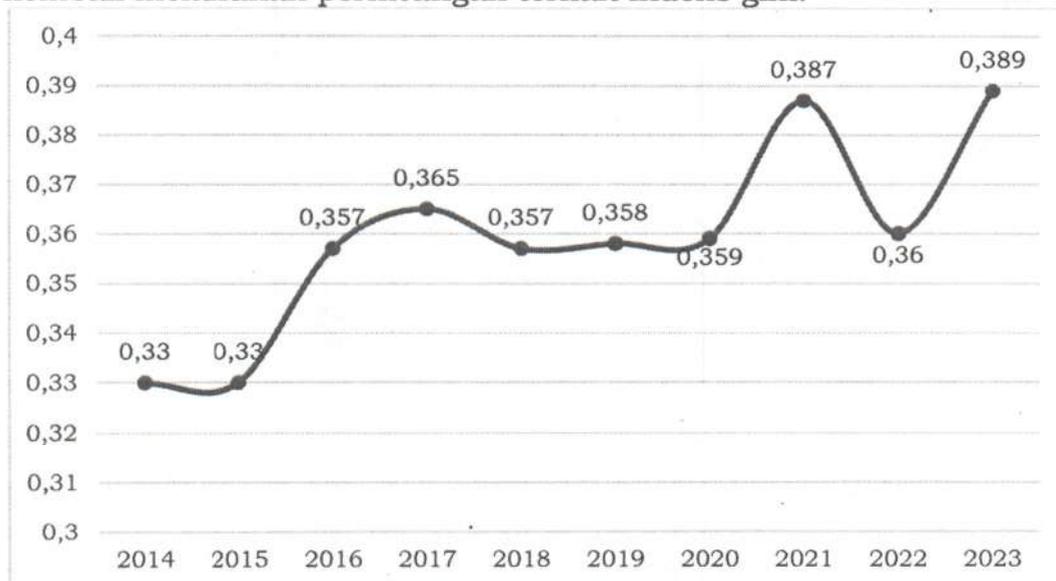
Gambar 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tetangga, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa distribusi pendapatan yang merata dapat meningkatkan ketimpangan, terutama jika keuntungan dari pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Ketimpangan yang tinggi (indeks Gini tinggi) bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena dapat mengurangi investasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang esensial untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar pada interval tahun 2013-2022 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2013 indeks gini Kabupaten Karanganyar sebesar 0,33 kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,36 di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, BPS Kabupaten Karanganyar tidak melakukan perhitungan Indeks Gini lagi. Angka koefisien sebesar 0,36 tersebut menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Karanganyar masuk dalam katagori ketimpangan moderat.

Menurunnya indeks Gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan sejalan dengan tujuan ke-10 SDG's yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Sehingga meletakkan angka indeks gini tahun 2016 – 2020 menggunakan angka Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2021-2023 BPS kembali melakukan perhitungan terkait indeks gini.



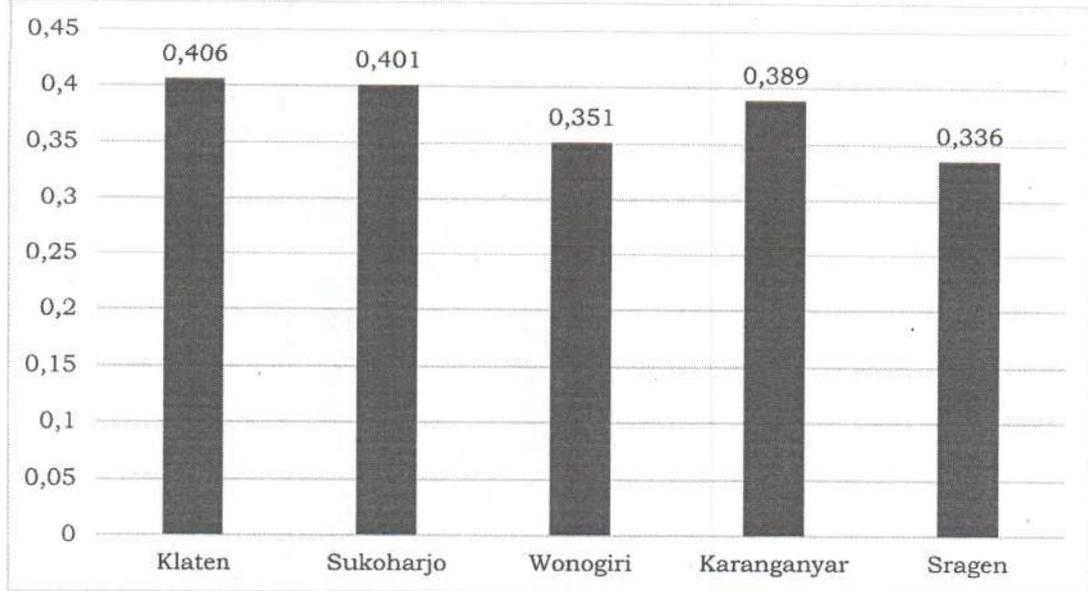
Gambar 2.9.

Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Indeks gini Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaiannya masih berada di bawah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo dan berada di atas capaian Kabupaten Wonogiri dan Sragen. Selengkapnya terkait perbandingan indeks gini Kabupaten

Karanganyar dan kabupaten lain di sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.

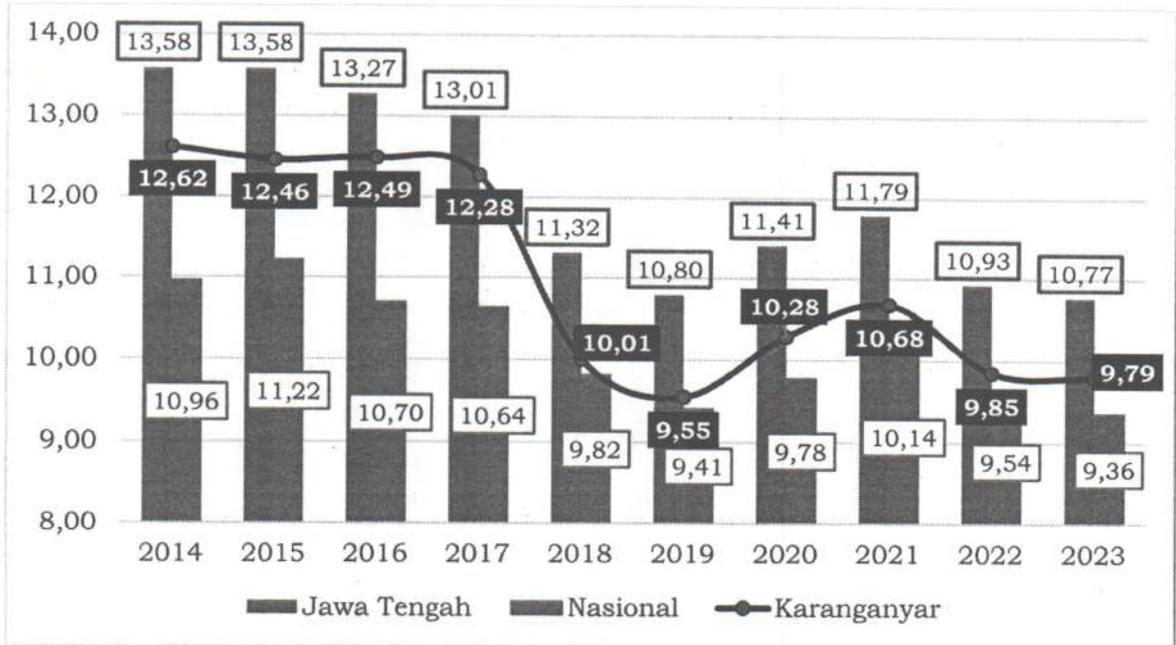


Gambar 2.10.
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan perubahan iklim ekstrem yang terjadi, pada tahun 2014 sebesar 12,62% menurun menjadi 9,55% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 10,28% dan tahun 2021 menjadi 10,68%, Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat. Angka kemiskinan dapat turun kembali pada tahun 2022 menjadi 9,85%, dan di tahun 2023 menjadi 9,79%.

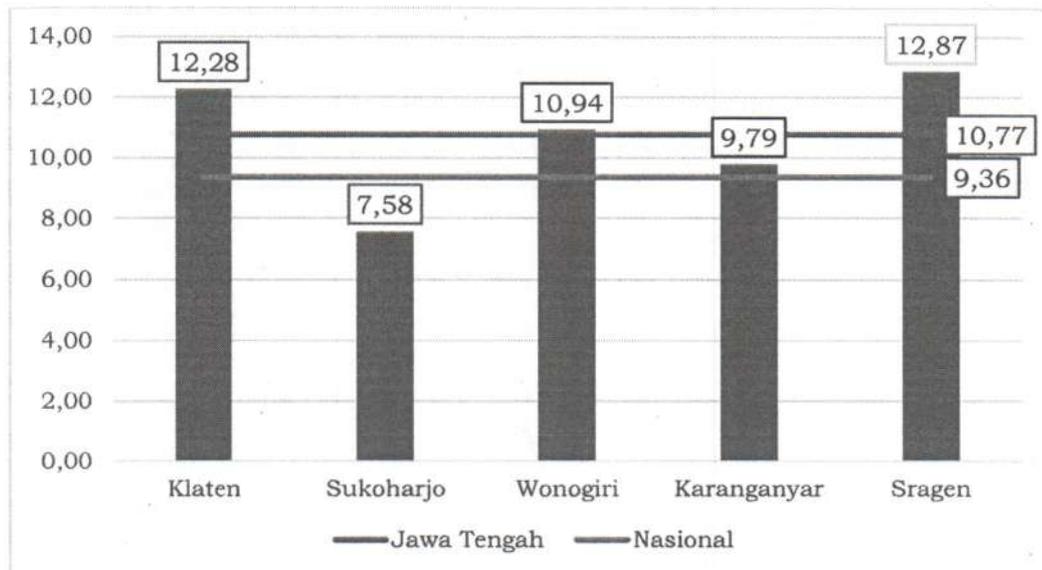
Jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah, capaian Kemiskinan Kabupaten Karanganyar relatif lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar lebih tinggi. Selengkapnya terkait perkembangan angka kemiskinan dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.11.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2023 (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

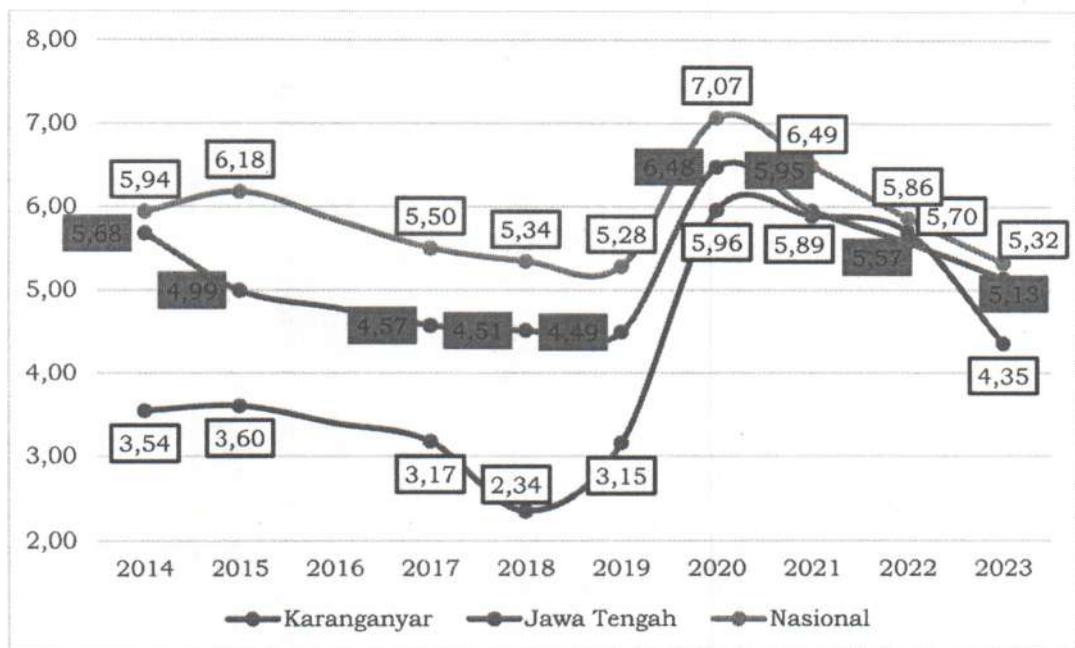
Pada tahun 2023, Persentase penduduk miskin Kabupaten Karanganyar sebesar 9,79%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan diatas Nasional sebesar 9,36% serta berada di posisi ke-4 dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.12.
Persentase Penduduk Miskin Kab. Karanganyar Dibandingkan
Dengan Kabupaten Sekitar dan Prov. Jawa Tengah dan Nasional,
Tahun 2023

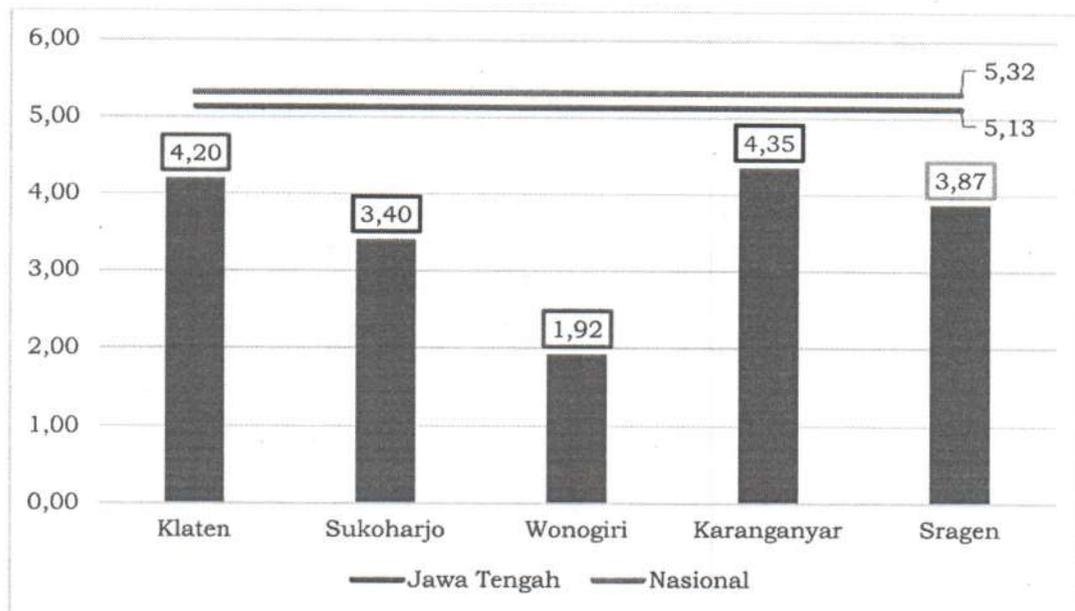
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Karanganyar. TPT pada periode tahun 2014-2023 mengalami fluktuatif dan tren meningkat di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2014 TPT Kabupaten Karanganyar sebesar 3,54% terus menurun sampai tahun 2018 sebesar 2,34%. Namun, meningkat menjadi sebesar 5,96% pada tahun 2020 dan 5,89% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang diberhentikan. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 4,35%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa tengah dan Nasional capaian TPT Kabupaten Karanganyar lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.13.
Persentase TPT Kab. Karanganyar Tahun 2014-2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

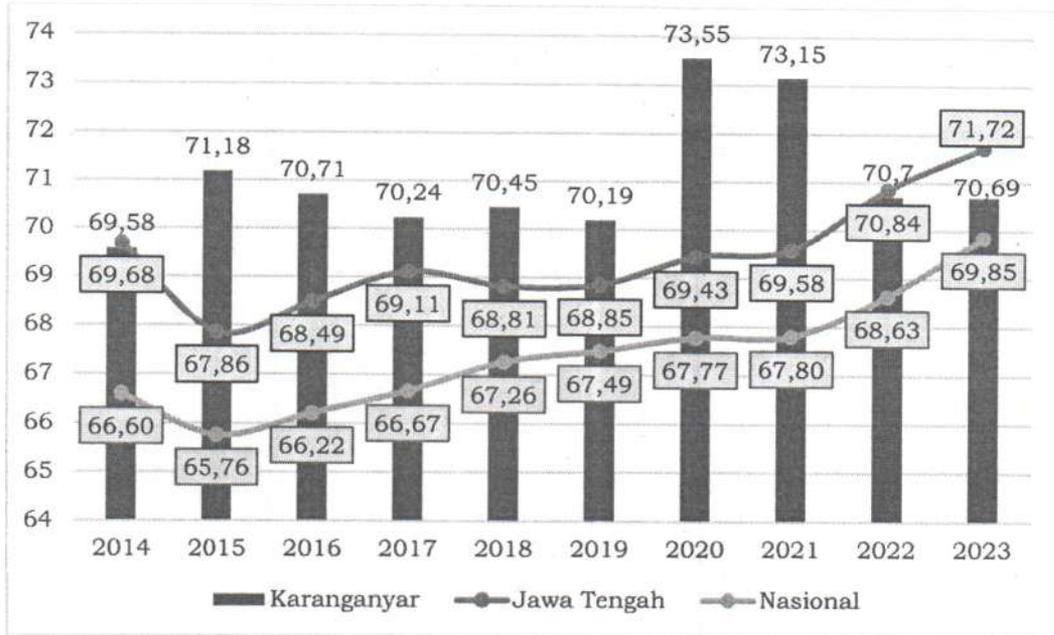
TPT Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten di sekitarnya, posisinya lebih tinggi daripada TPT Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

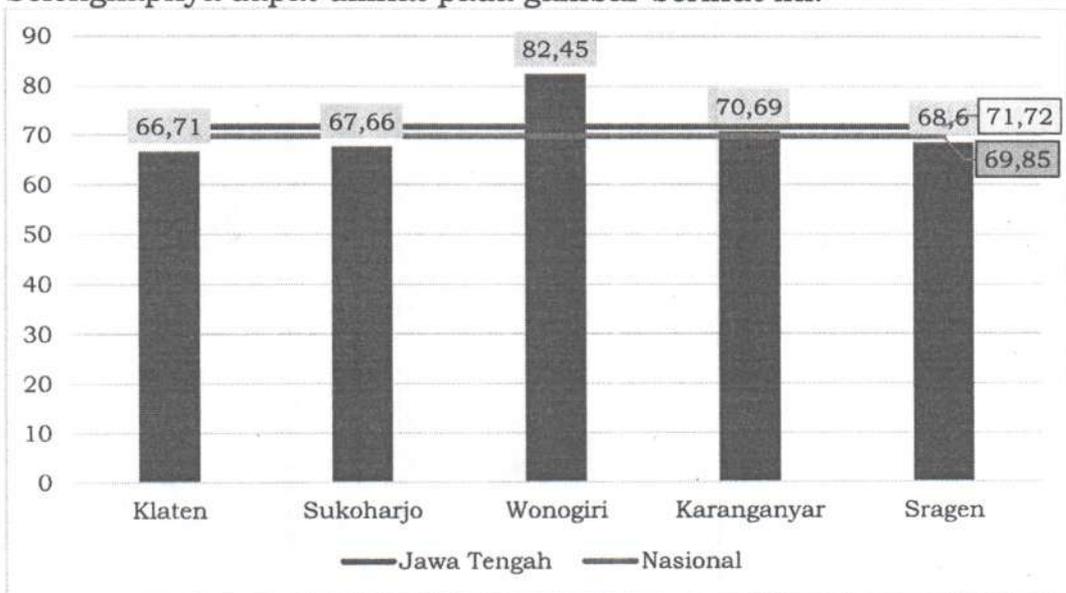
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Besarnya TPAK menunjukkan kondisi yang baik dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar yang bersifat fluktuatif, yaitu tahun 2014 sebesar 69,58% meningkat menjadi 70,69% pada tahun 2023. TPAK pada tahun 2023 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan capaian sebesar 70,69% termasuk cukup baik, hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karanganyar.

Capaian TPAK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 berada di bawah capaian Jawa Tengah dan di atas capaian Nasional. Selengkapnya terkait perkembangan TPAK Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



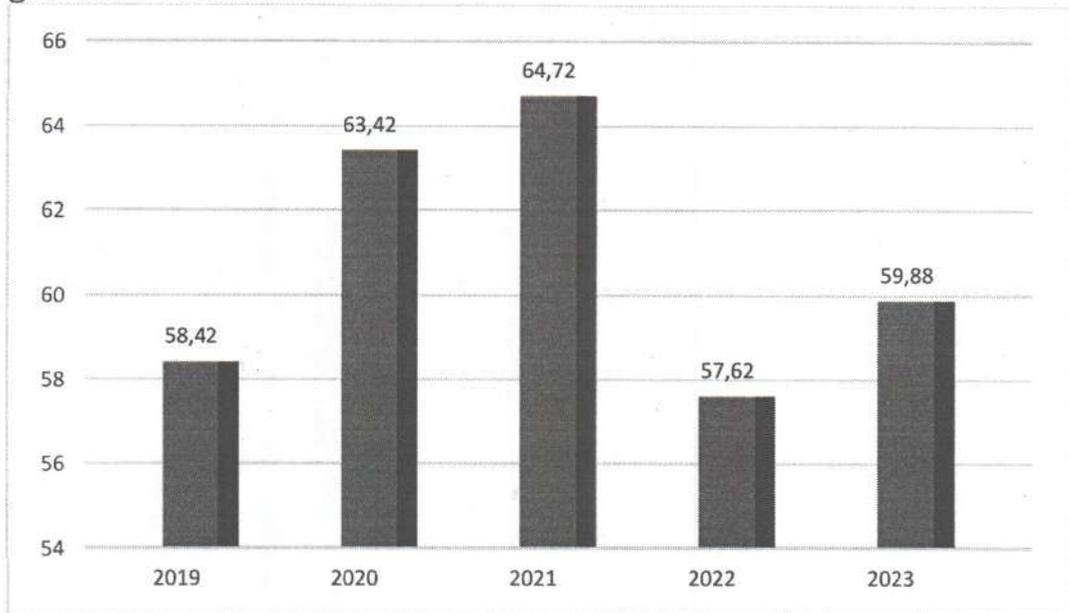
Gambar 2.15.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

TPAK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaiannya masih dibawah Kabupaten Wonogiri dan berada di atas capaian Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.16.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

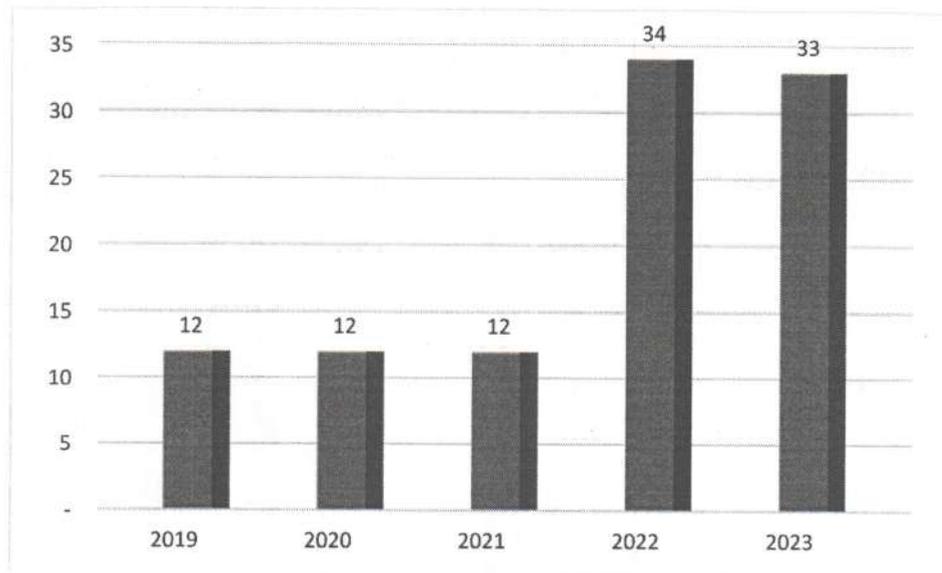
TPAK perempuan menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja perempuan (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Pada tahun 2019 TPAK perempuan sebesar 58,42%, kemudian di tahun 2023 sebesar 59,88%. Semakin tinggi TPAK perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.17.
TPAK Perempuan Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kabupaten Karanganyar. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 12%, kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2022 menjadi 34%. Namun di tahun 2023 turun menjadi 33%. Selengkapnya terkait cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



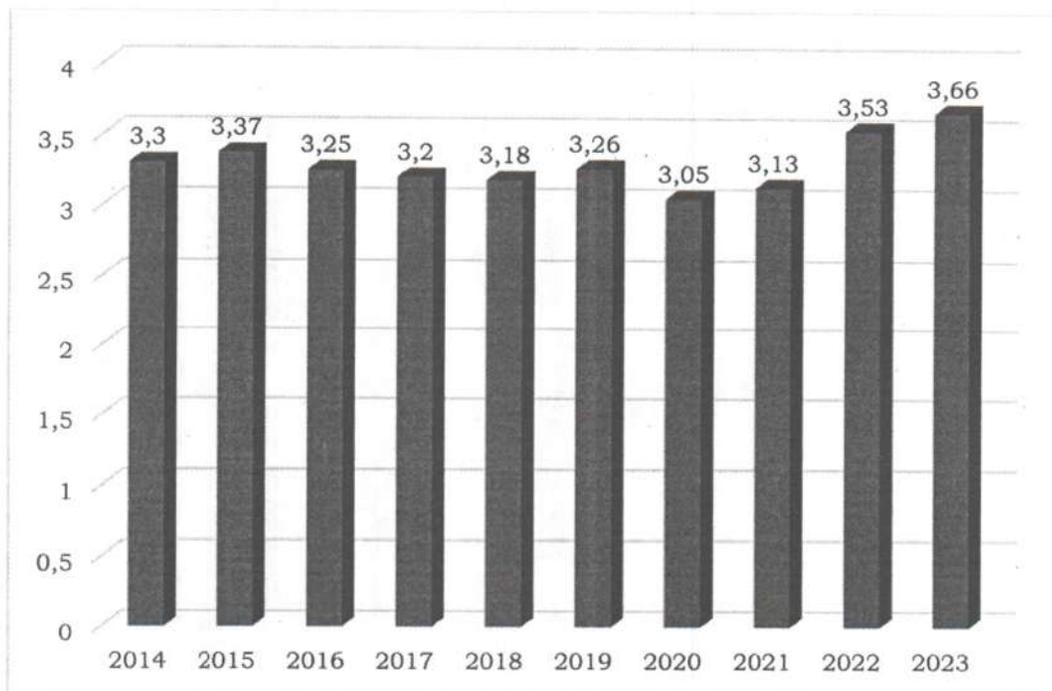
Gambar 2.18.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Salah satu Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2014 proporsinya sebesar 3,30%, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 3,66%. Peningkatan Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Karanganyar juga mengalami peningkatan. Selengkapnya terkait perkembangan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



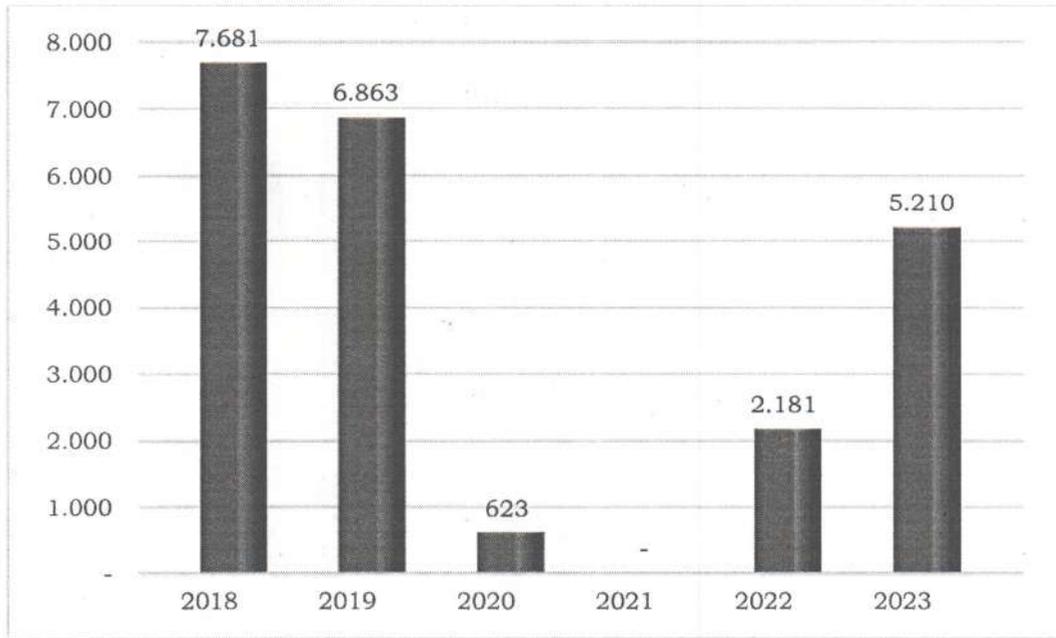
Gambar 2.19.

**PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023 (%)**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Jumlah tamu wisatawan mancanegara dilihat dari data Jumlah Wisatawan Mancanegara yang menginap di setiap hotel yang berada di Kabupaten Karanganyar. Semakin banyak jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel yang berada di Kabupaten Karanganyar maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Pada tahun 2018 jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Karanganyar sebanyak 7.681 orang, namun pada tahun 2021 tidak ada jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Karanganyar karena dampak adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2023 wisatawan mancanegara di Kabupaten Karanganyar meningkat kembali menjadi 5.210 orang. Selengkapannya terkait perkembangan jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut.



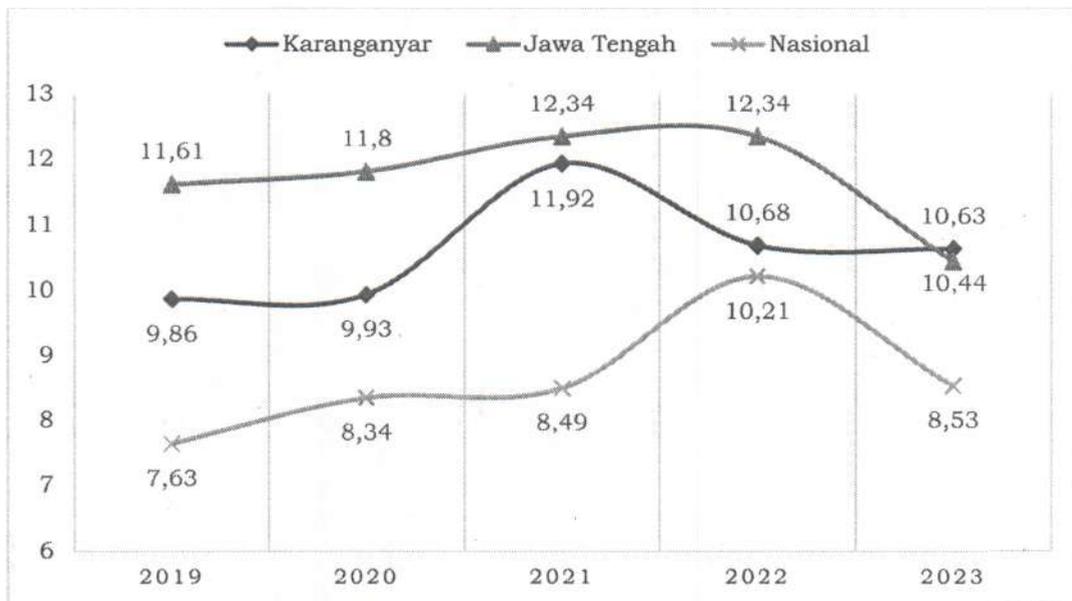
Gambar 2.20.
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
 Tahun 2024

Ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau merupakan salah satu dasar penting bagi stabilitas ekonomi. Ketika kebutuhan dasar pangan terpenuhi, masyarakat cenderung lebih produktif dan stabil secara sosial, yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan pangan dapat dilihat dari indikator *Prevalence of Undernourishment/PoU* dan indeks ketahanan pangan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase, atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data PoU Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 9,86% menjadi 9,93%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 merupakan awal dimulainya pandemi dan dimulai pembatasan-pembatasan atau PPKM. Pada tahun 2021 angka PoU kembali naik menjadi 11,92% disebabkan pada tahun 2021 merupakan puncak pandemi yang ditandai dengan seluruh kegiatan bekerja dan belajar dilakukan dari rumah (*Pembelajaran Jarak Jauh* dan *Work From Home*). Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka kemiskinannya, menjadi 10,63% dengan penurunan sebesar 0,05%.

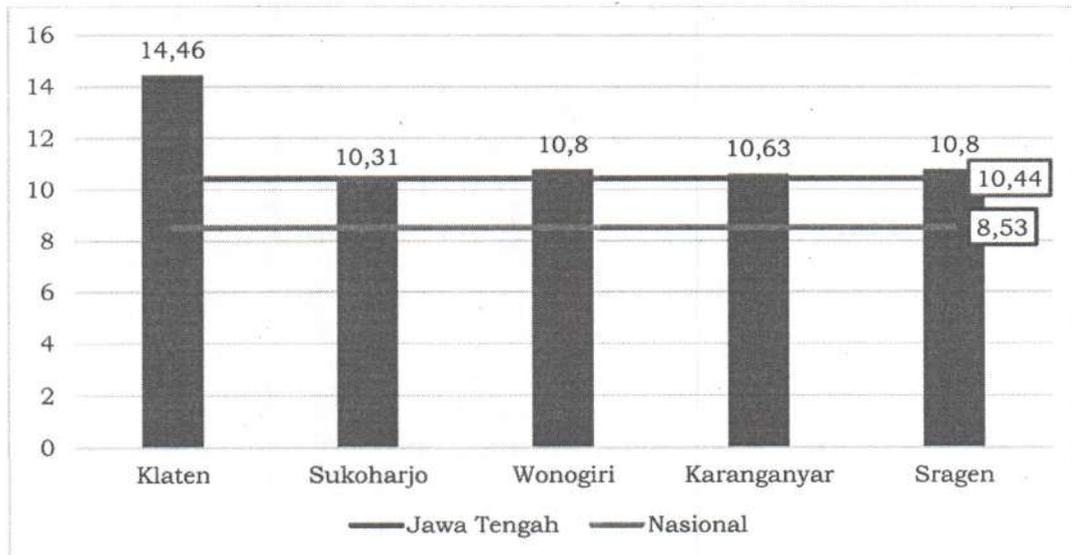


Gambar 2.21.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya capaiannya masih berada di bawah Kabupaten Klaten dan berada di atas capaian Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



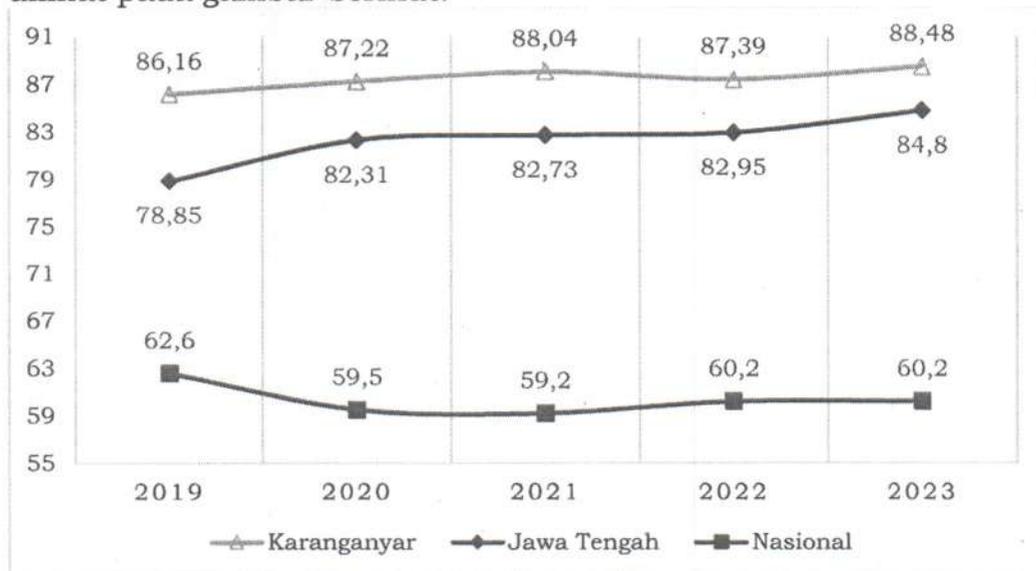
Gambar 2.22.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

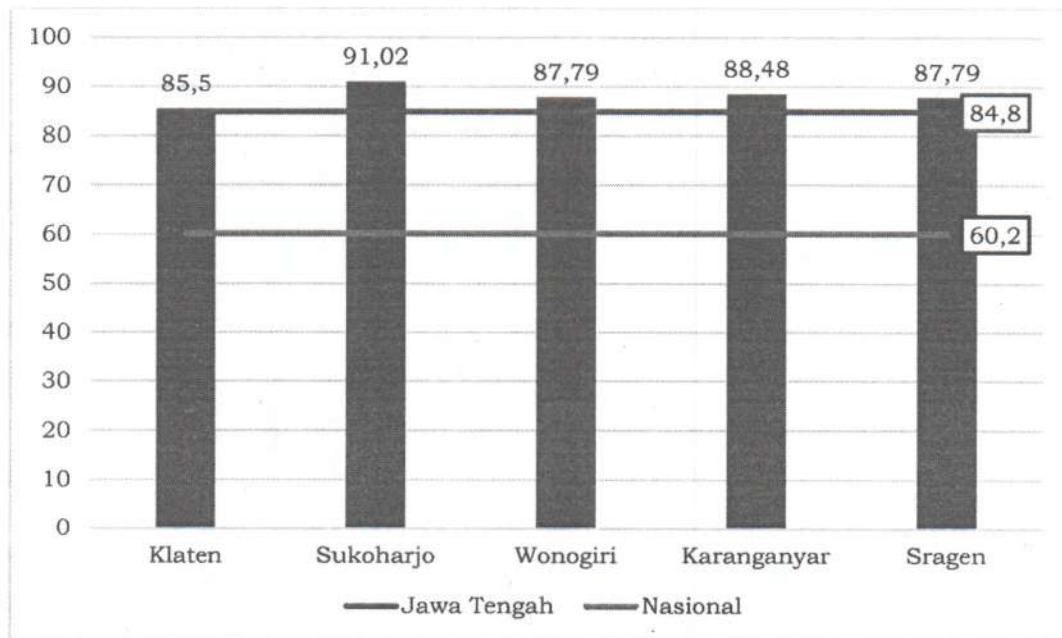
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan kecuali di tahun 2022. Pada tahun 2019 IKP Kabupaten Karanganyar sebesar 86,16% terus meningkat sampai di angka 88,04% di tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 87,39%. Penurunan skor di tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan. Skor IKP Kabupaten Karanganyar kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 88,48%. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Jawa Tengah, IKP Kabupaten Karanganyar masih berada di atas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.23.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

IKP Kabupaten Karanganyar tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian IKP Kabupaten di sekitarnya masih di bawah capaian Kabupaten Sukoharjo (91,02%), namun masih di atas capaian Kabupaten Klaten (85,50%), Kabupaten Wonogiri (87,79%), dan Kabupaten Sragen (87,79%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



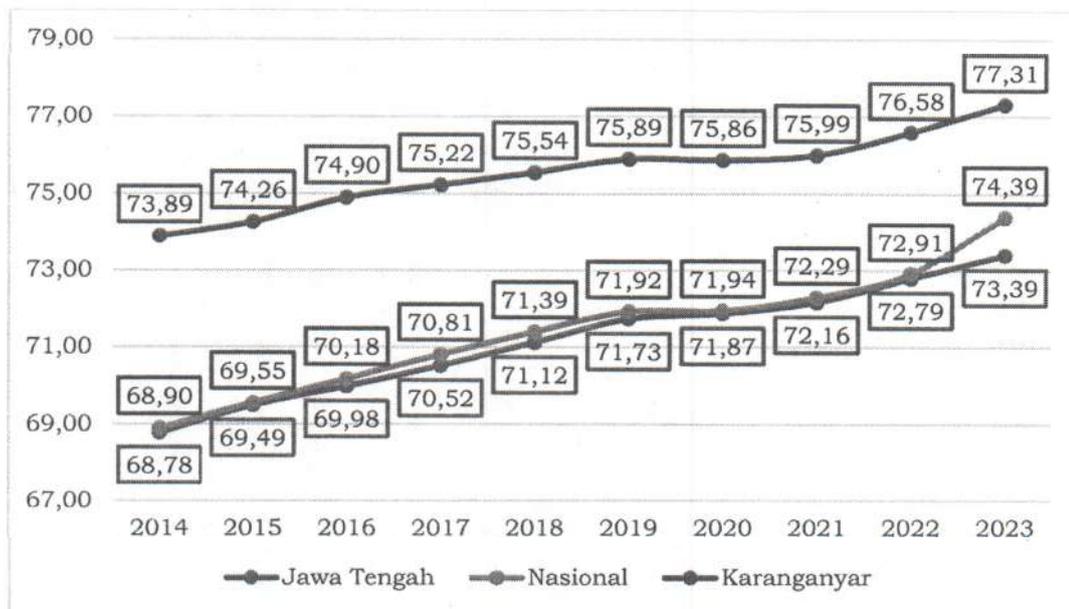
Gambar 2.24.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

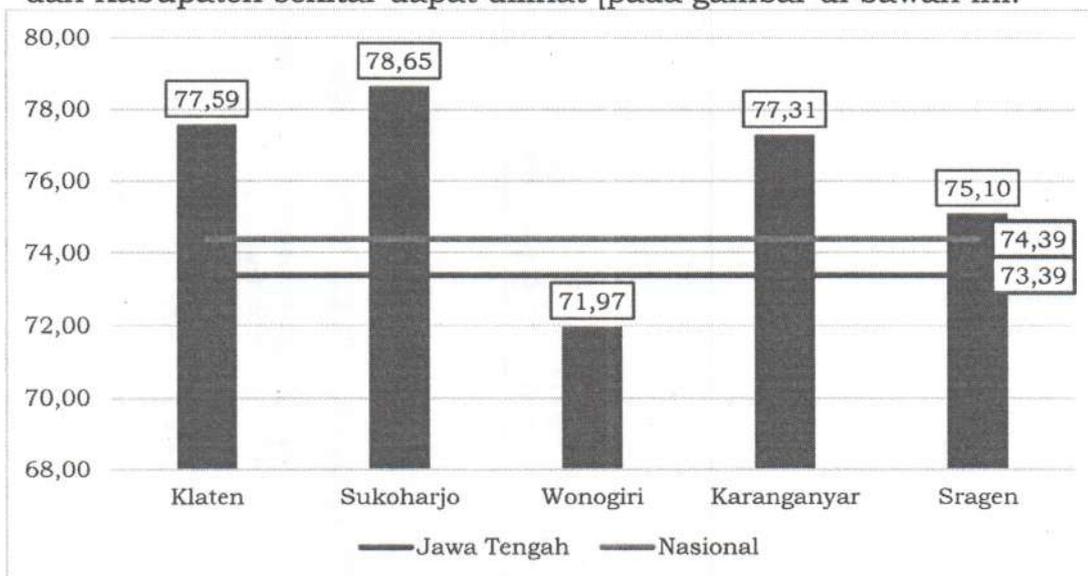
Meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari tahun 2014-2023 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 nilai IPM menurun 0,03 poin. Pada tahun 2021, seiring lewatnya masa pandemic Covid-19 dan pemulihan ekonomi, IPM Kabupaten Karanganyar kembali berjalan naik menjadi 75,99 dan terus meningkat sampai di angka 77,31 pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan IPM Jawa tengah dan Provinsi, IPM Kabupaten Karanganyar capaiannya lebih tinggi. Selengkapnya terkait perkembangan IPM di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.25.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

IPM Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya berada di bawah capaian Kabupaten Klaten sebesar 77,59 dan Kabupaten Sukoharjo 78,65. Namun, IPM Kabupaten Karanganyar berada di atas capaian Kabupaten Sragen sebesar 75,10 dan Kabupaten Wonogiri sebesar 71,97. Selengkapnya terkait capaian IPM Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten sekitar dapat dilihat [pada gambar di bawah ini].



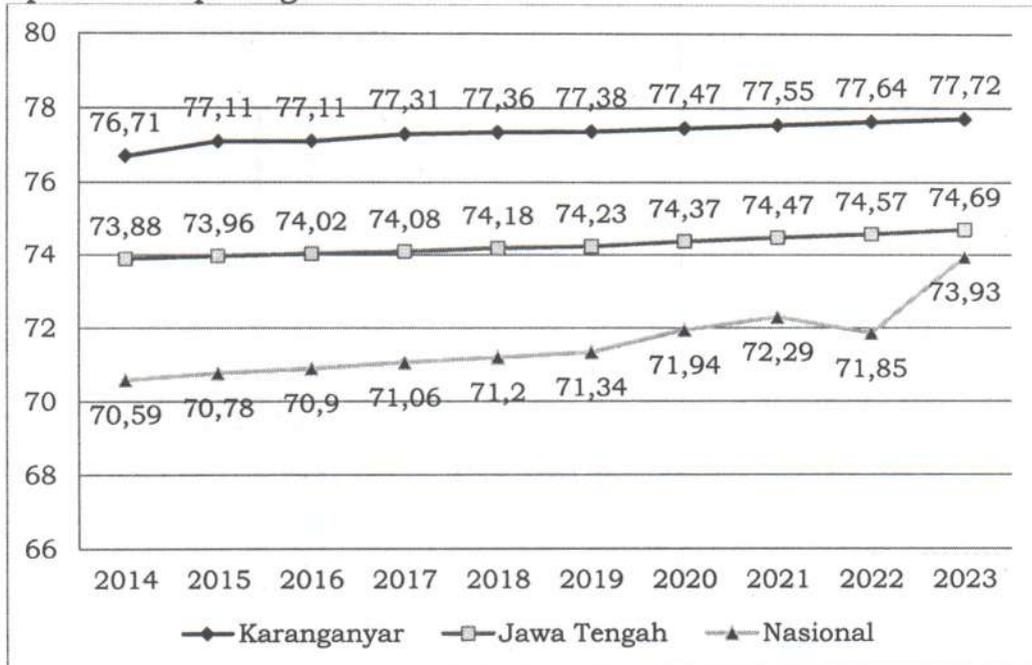
Gambar 2.26.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Sementara itu, berdasarkan indeks pembentuk IPM Kabupaten Karanganyar meliputi : (1) angka harapan hidup (tahun);

(2) harapan lama sekolah (tahun); (3) rata-rata lama sekolah (tahun) dan (4) pengeluaran per kapita (rupiah) dapat diuraikan berikut ini.

Angka Harapan Hidup (AHH)

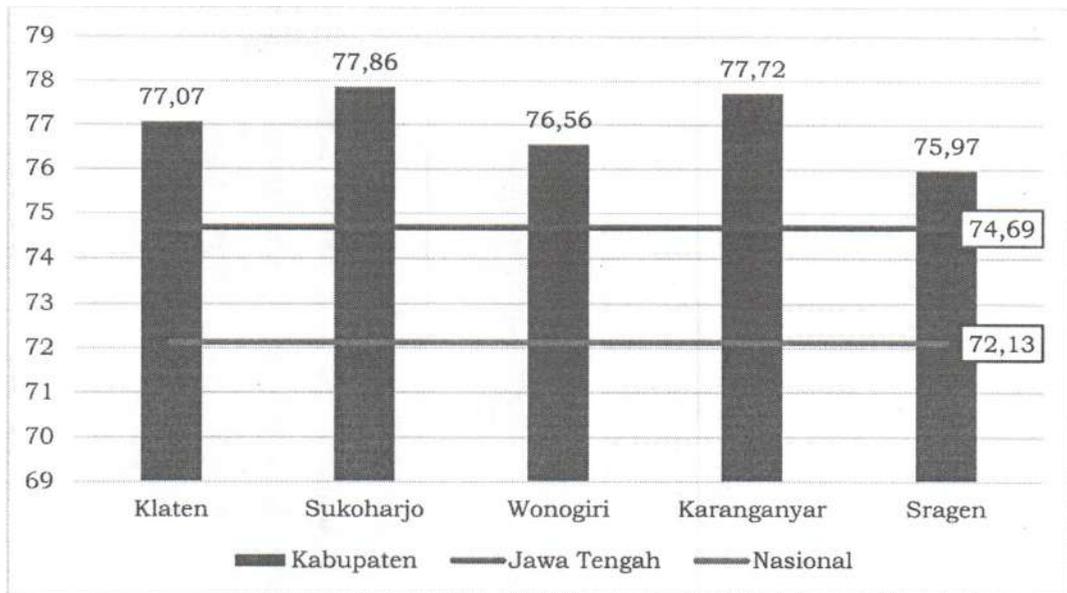
Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Karanganyar periode 2014 hingga tahun 2023 dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan 3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pada tahun 2014 capaian angka harapan hidup Kabupaten Karanganyar sebesar 76,71 meningkat menjadi 77,72 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan rata-rata capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2014 hingga tahun 2023 capaian Kabupaten Karanganyar masih di atas Provinsi Jawa Tengah dan atas capaian angka Nasional. Selengkapnya terkait perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.27.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

AHH Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten tetangga pada tahun 2023, capaiannya lebih tinggi di bandingkan Kabupaten Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Namun, AHH Kabupaten Karanganyar masih di bawah capaian Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya terkait perkembangan AHH Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



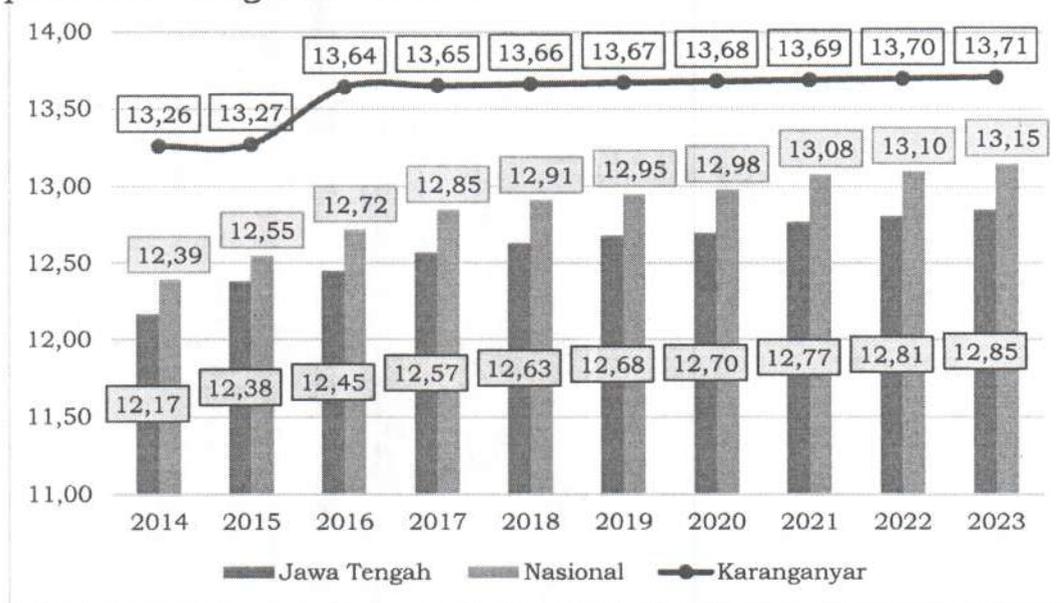
Gambar 2.28.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari Tahun 2014 sebesar 13,26 menjadi 13,71 di Tahun 2023. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 12,85 dan Nasional sebesar 13,15. Perkembangan HLS selama 2014-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

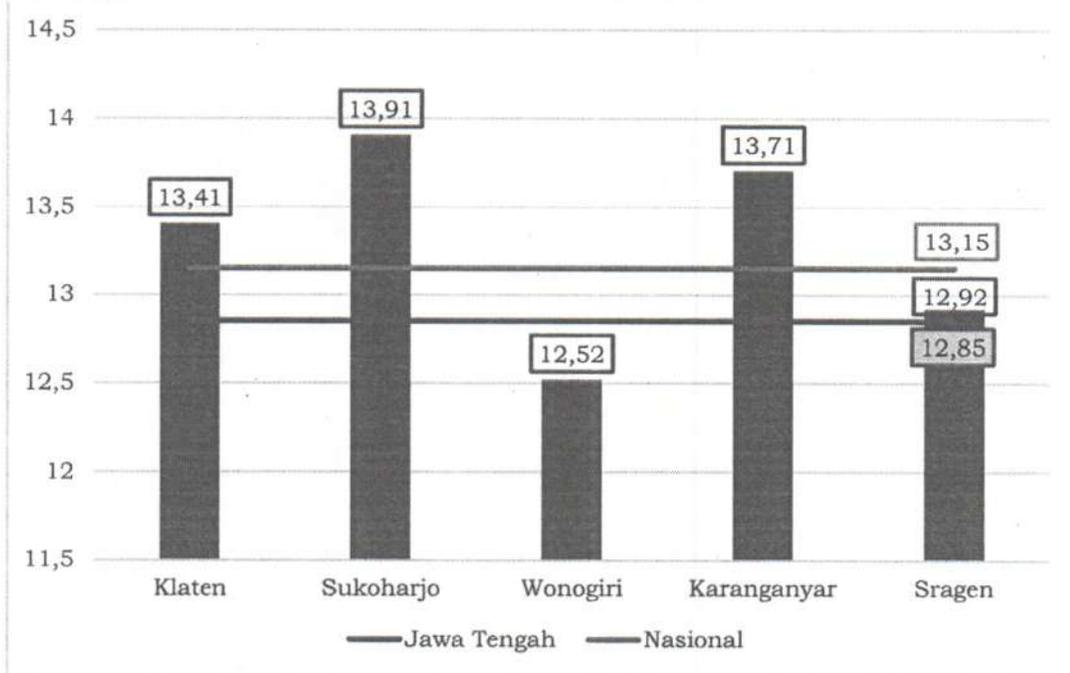


Gambar 2.29.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaian HLS Kabupaten Karanganyar tahun 2023 masih di bawah Kabupaten Sukoharjo, dan di atas capaian Kabupaten Klaten (13,41). Kabupaten Wonogiri (12,52), dan Kabupaten Sragen (12,92). Selengkapnya terkait capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dan kabupaten tetangga dapat dilihat pada gambar berikut.

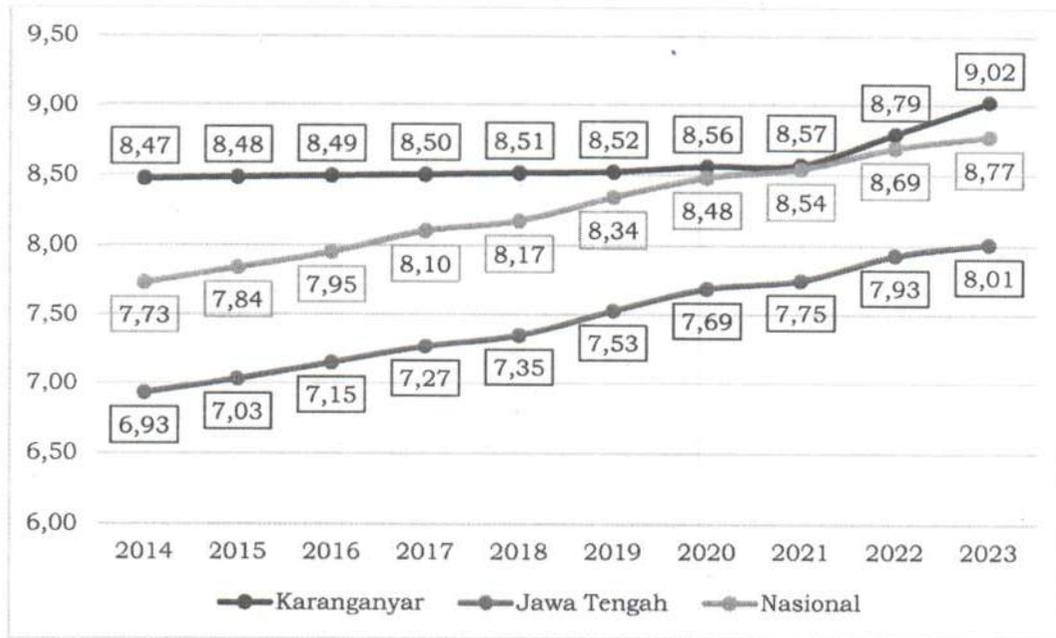


Gambar 2.30.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

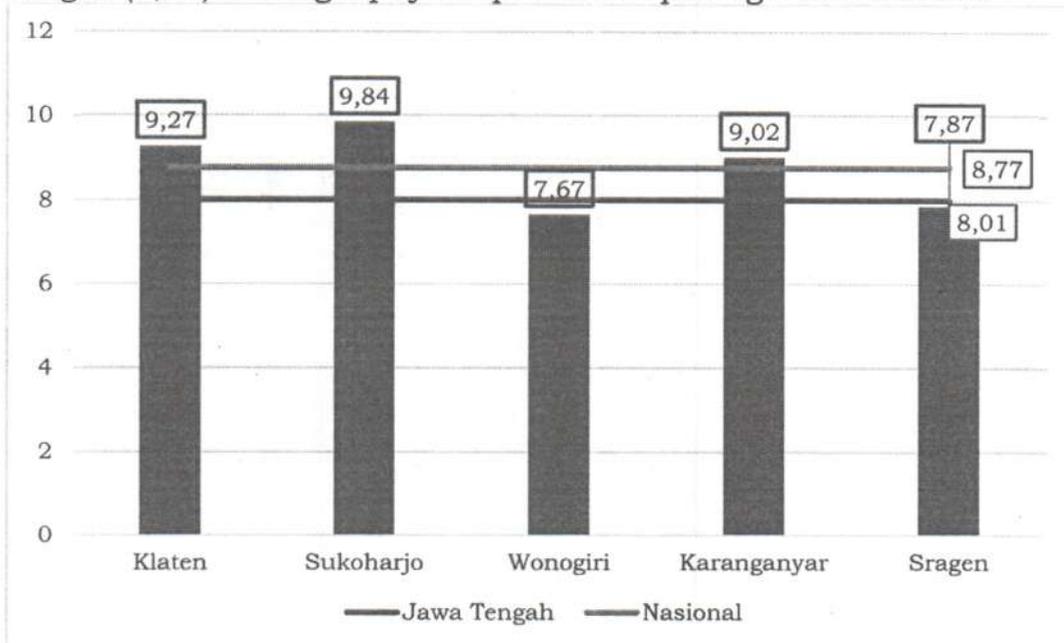
Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014- 2023 mengalami peningkatan, pada Tahun 2014 sebesar 8,47 menjadi 9,02 pada Tahun 2023. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 berada di atas angka Jawa Tengah (8,01) dan Nasional (8,77). Selengkapnya terkait perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Gambar 2.31.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023 (Tahun)
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

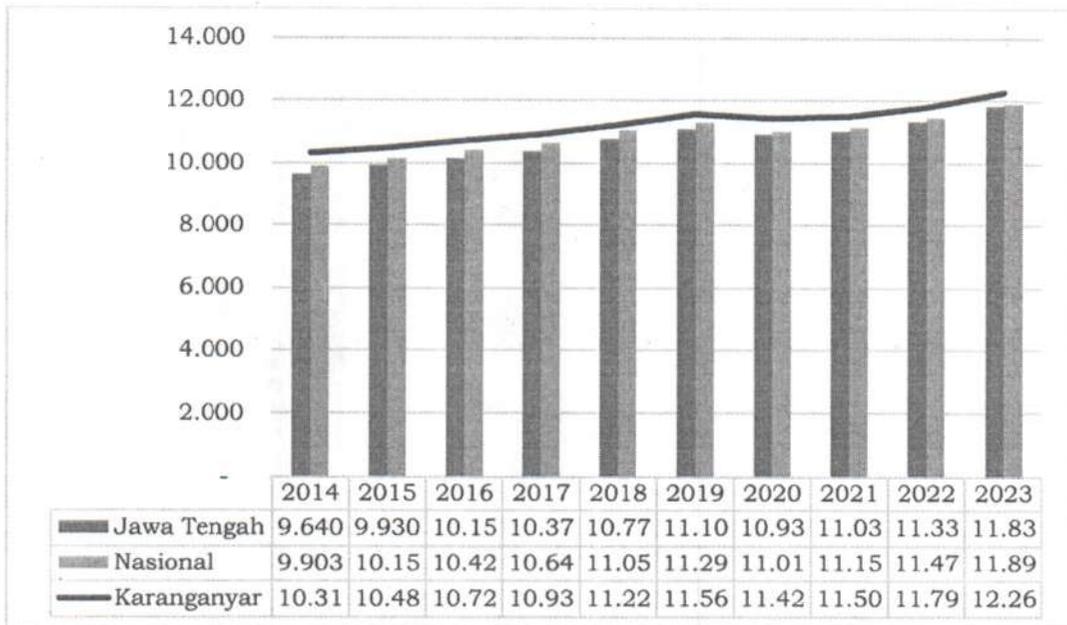
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaiannya masih di bawah Kabupaten Klaten sebesar 9,27 dan Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,84, serta di atas capaian Wonogiri (7,67) dan Sragen (7,87). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.32.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2023 (Tahun)
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Pengeluaran Per Kapita/Tahun

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.313 ribu per tahun pada tahun 2014 menjadi Rp.11.569 ribu pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pandemi covid menjadi Rp.11.428.000,00 dan kembali naik masa pemulihan ekonomi menjadi Rp. 12.260 ribu per tahun di tahun 2023. Pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat pada gambar berikut.

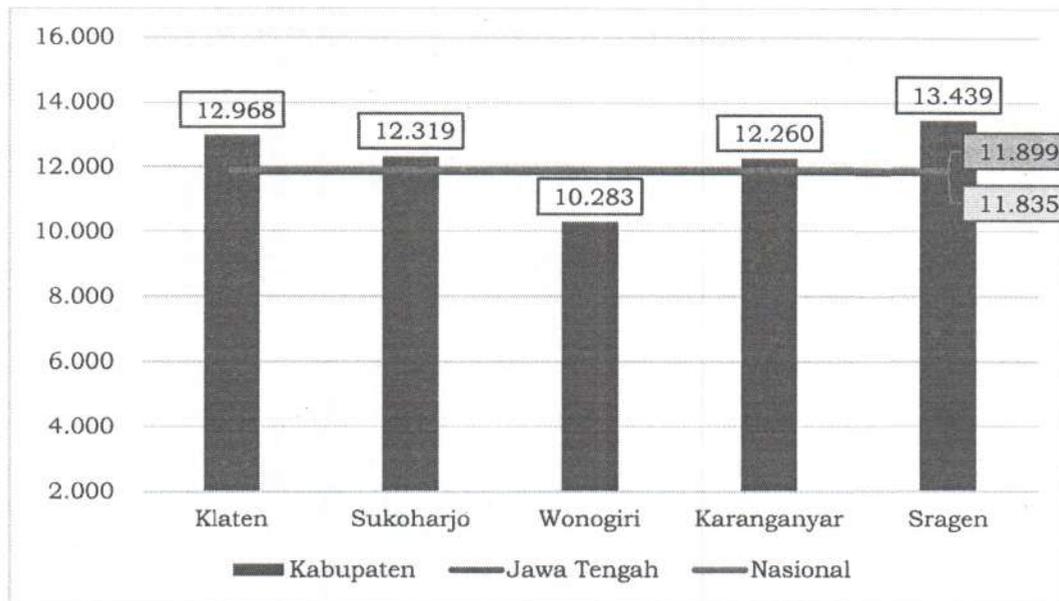


Gambar 2.33.

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2014-2023 (Ribu Rupiah)

Sumber : : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Pengeluaran perkapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya, capaiannya masih di bawah Kabupaten Klaten yang sebesar Rp12.968 ribu rupiah, Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp12.319 ribu rupiah, dan Kabupaten Sragen sebesar Rp 13.439 ribu rupiah. Namun pengeluaran perkapita Kabupaten Karanganyar tahun 2023 masih di atas Kabupaten Wonogiri yang sebesar Rp10.283 ribu rupiah. Selengkapnya terkait capaian pengeluaran per kapita kabupaten Karanganyar tahun 2023 dan Kabupaten tetangga dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.34.
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2024

Dalam rangka pemajuan kebudayaan salah satu unsurnya adalah satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian pada satuan pendidikan Sekolah Dasar pada di Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Guru pada sekolah Dasar ditugaskan sebagai guru kelas serta mengajar berbagai mata pelajaran mulai dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, termasuk Mulok Bahasa Daerah. Sedangkan persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sudah mencapai 87%.

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari kelestarian cagar budaya. Kondisi ini dilihat dari jumlah bangunan, benda, struktur, situs dan kawasan budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Terkait dengan warisan budaya tak benda dapat dilihat dari kelestarian budaya tak benda. Kondisi ini dilihat dari jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan menjadi budaya daerah. Jumlah kunjungan di tempat/lokasi yang mengandung nilai budaya atau sejarah adalah hal yang penting untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang ingin memahami budaya daerah dan sejarah sebuah wilayah.

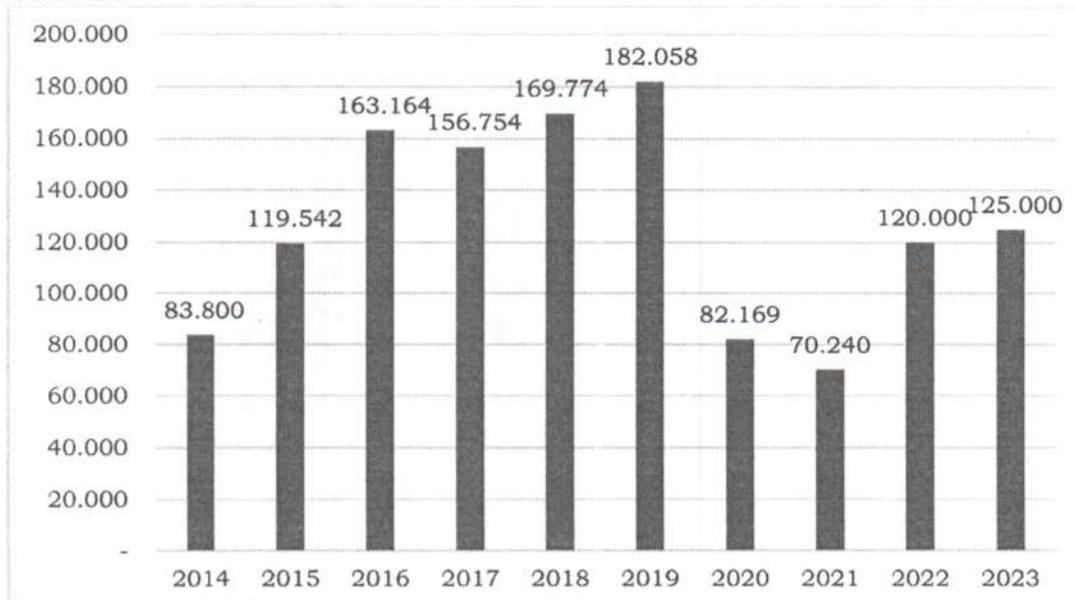
Cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan, sedangkan definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU No. 5 Th. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya (CB).

Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar beserta nilai pentingnya.

Cakupan CB dan WBTB yang dilestarikan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 30%. Indikator ini menggambarkan sejauhmana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar beserta nilai pentingnya. Jadi, semakin tinggi cakupan CB dan WBTB yang dilestarikan maka upaya pelestarian yang dilakukan oleh Kabupaten Karanganyar juga semakin tinggi.

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan. Seperti: museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya. Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah di Kabupaten Karanganyar.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah di kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 sebanyak 83.800 pengunjung terus meningkat menjadi 182.058 pengunjung di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi covid-19, dimana pengunjung hanya sebesar 82.169 pengunjung dan 70.240 pengunjung di tahun 2021. Pada tahun 2022 paska pandemi covid-19, pengunjung tempat bersejarah mulai meningkat kembali menjadi 120.000 pengunjung dan 125.000 pengunjung di tahun 2023 Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.35.

Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023 (Orang)

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Pemajuan kebudayaan terkait dengan obyek cagar budaya dapat dilihat dari persentase kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.

Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 20%. Indikator ini menggambarkan sejauhmana para pelaku seni di Jawa Tengah dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan.

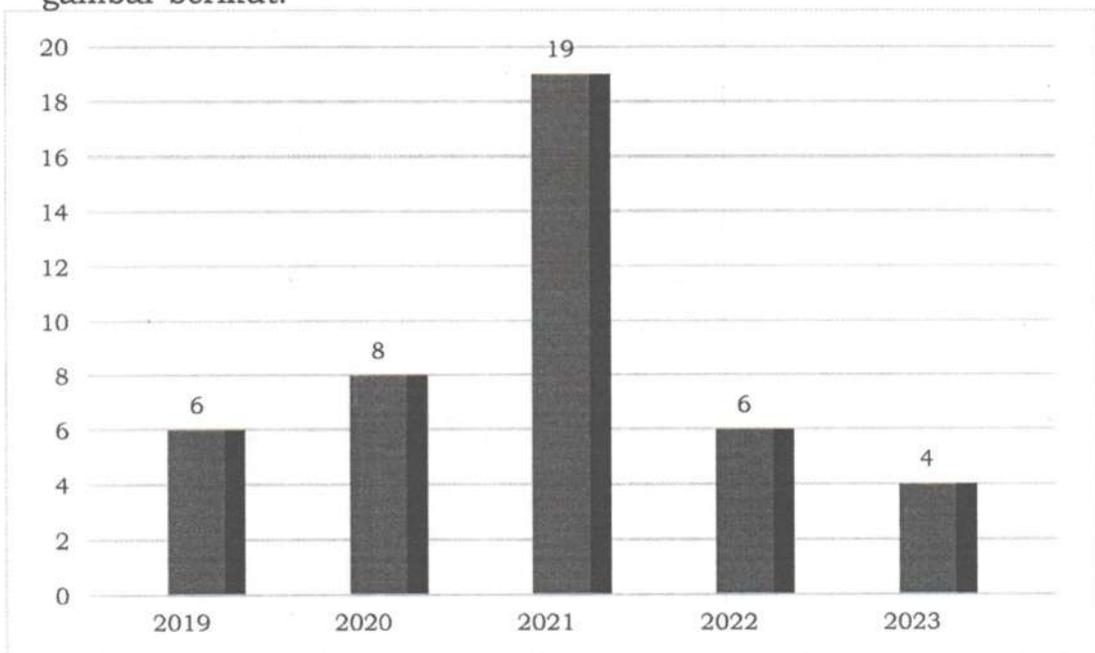
Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut. Dengan demikian pembangunan kesehatan juga mempunyai peranan yang amat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Di Kabupaten Karanganyar, pembangunan di bidang kesehatan juga tak luput dari perhatian dan peran dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Sementara itu tahun 2023 data dari Dinas Kesehatan menunjukkan jumlah tenaga medis dokter spesialis 131 orang, dokter umum sebanyak 137 orang, dokter gigi 39 orang, dokter gigi spesialis 1 orang, bidan 594 orang, dan perawat sebanyak 959 orang. Bila dilihat dari sarana kesehatan maka kondisi sarana kesehatan di Karanganyar secara umum sudah cukup memadai. Tahun 2023 jumlah rumah sakit 9 unit, puskesmas 21 unit, puskesmas pembantu 56 unit, klinik pratama 46 unit, dan klinik utama 10 unit.

Jumlah kasus kematian ibu merupakan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Jumlah kasus kematian ibu merupakan ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebanyak 6 kasus kematian. Kasus kematian ibu meningkat pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus. Meningkatnya kasus kematian ibu hamil selain disebabkan

adanya pandemi covid-19, juga disebabkan oleh keterlambatan dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan selama kehamilan, persalinan, atau setelah melahirkan sehingga meningkatkan risiko komplikasi yang fatal. Beberapa kondisi kesehatan yang bisa berisiko, seperti hipertensi, diabetes, anemia, atau infeksi, tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan baik selama kehamilan. Dukungan dari keluarga, termasuk suami, dalam memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang diperlukan sangat penting. Kurangnya dukungan ini dapat meningkatkan risiko kematian ibu.

Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu menurun, hanya ditemukan 4 kasus kematian ibu di kabupaten Karanganyar. Penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar adalah hasil dari kombinasi berbagai upaya yang melibatkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, edukasi masyarakat, perbaikan sistem rujukan, serta dukungan kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, angka kematian ibu dapat ditekan secara signifikan, dan kesehatan ibu secara keseluruhan dapat lebih terjamin. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.36.
Jumlah Kematian Ibu Hamil Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023

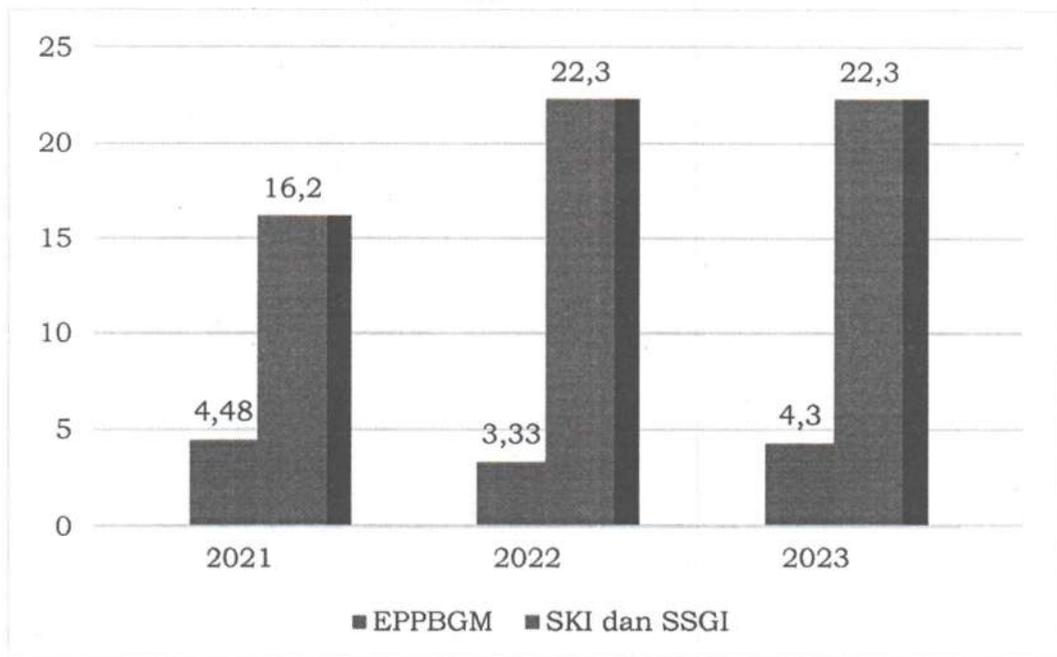
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Masalah stunting menjadi perhatian khusus dalam mencerminkan kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Karanganyar. Peningkatan prevalensi balita stunting disebabkan karena program stunting yang belum terfokus dan belum maksimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Penurunan ini disebabkan pula kondisi gizi saat remaja dan ibu hamil KEK di Kabupaten Karanganyar cukup tinggi. Dampaknya

melahirkan anak stunting pada generasi berikutnya. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang kognitif berkurang, beresiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak < -3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).

Prevalensi stunting di Kabupaten Karanganyar mencerminkan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Perkembangan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Karanganyar cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Karanganyar menurut data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebesar 4,48%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 3,33% dan 4,3% di tahun 2023. Sedangkan data menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi atunting di Kabupaten Karanganyar tahun 2021 sebesar 16,2% dan meningkat menjadi 22,3% di tahun 2023. Pada penentuan target untuk tahun 2025-2045 nantinya menggunakan capaian angka SKI dan SSGI.

Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Karanganyar disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas asupan gizi pada ibu hamil dan anak-anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Faktor lain yang turut berperan adalah praktik pemberian makanan pendamping ASI yang kurang tepat, yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan gizi seimbang. Selain itu, kondisi sanitasi dan akses terhadap air bersih yang masih kurang memadai di beberapa wilayah memperburuk situasi, menyebabkan anak-anak rentan terkena infeksi berulang seperti diare. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat juga memperparah permasalahan ini. Faktor kemiskinan yang masih cukup tinggi di sejumlah daerah di Karanganyar membuat keluarga sulit untuk menyediakan makanan bergizi yang cukup bagi anak-anak mereka, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan stunting. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

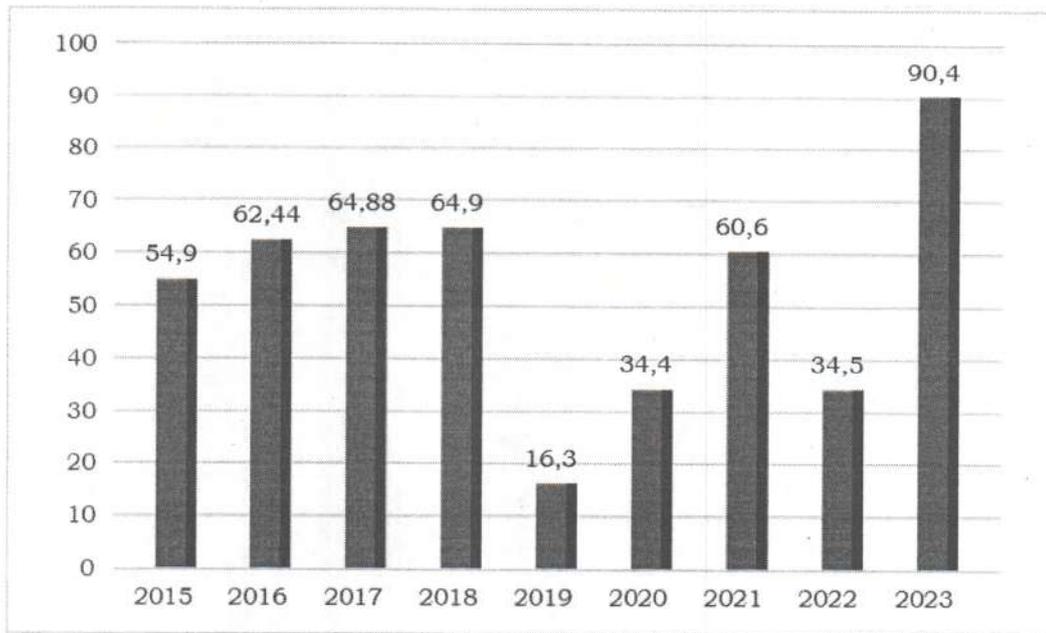


Gambar 2.37.
Prevalensi Stunting pada balita Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2023

Sumber : e-PPBGM dan SKI/SSGI, Tahun 2024

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

Pada tahun 2015 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) sebesar 54,9% dan mengalami kenaikan menjadi 90,4% di tahun 2023. Selengkapnya terkait perkembangan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.



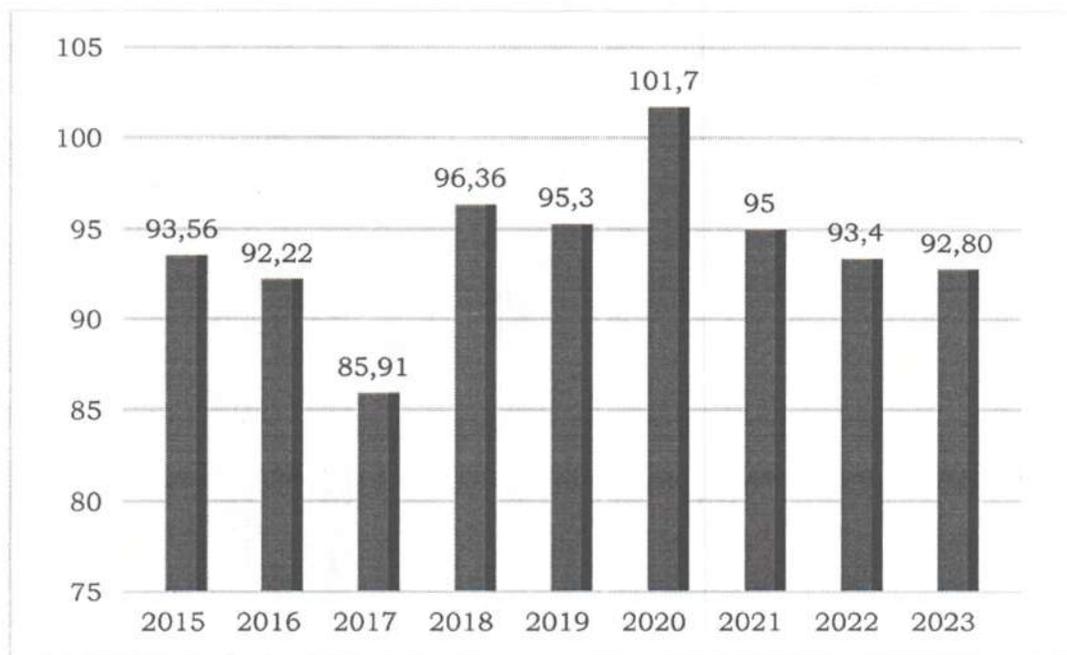
Gambar 2.38.

**Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Coverage) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2023**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 sebesar 93,56%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 91,80%. Selengkapnya terkait perkembangan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



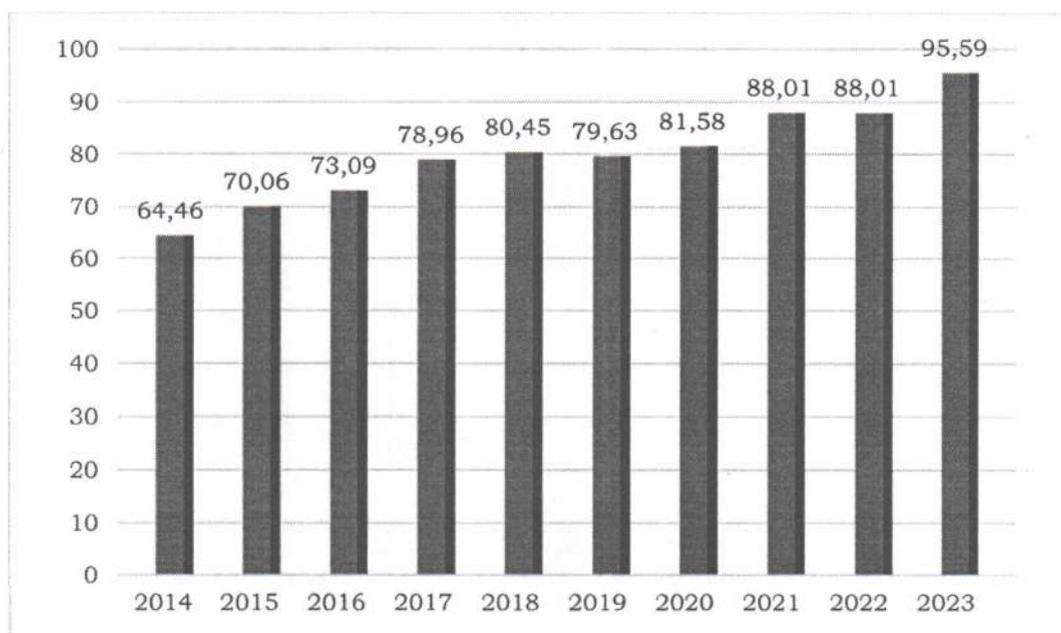
Gambar 2.39.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Setiap warga Kabupaten Karanganyar memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Hal tersebut diwujudkan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting yaitu Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; dan Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 64,46% menjadi 95,59% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

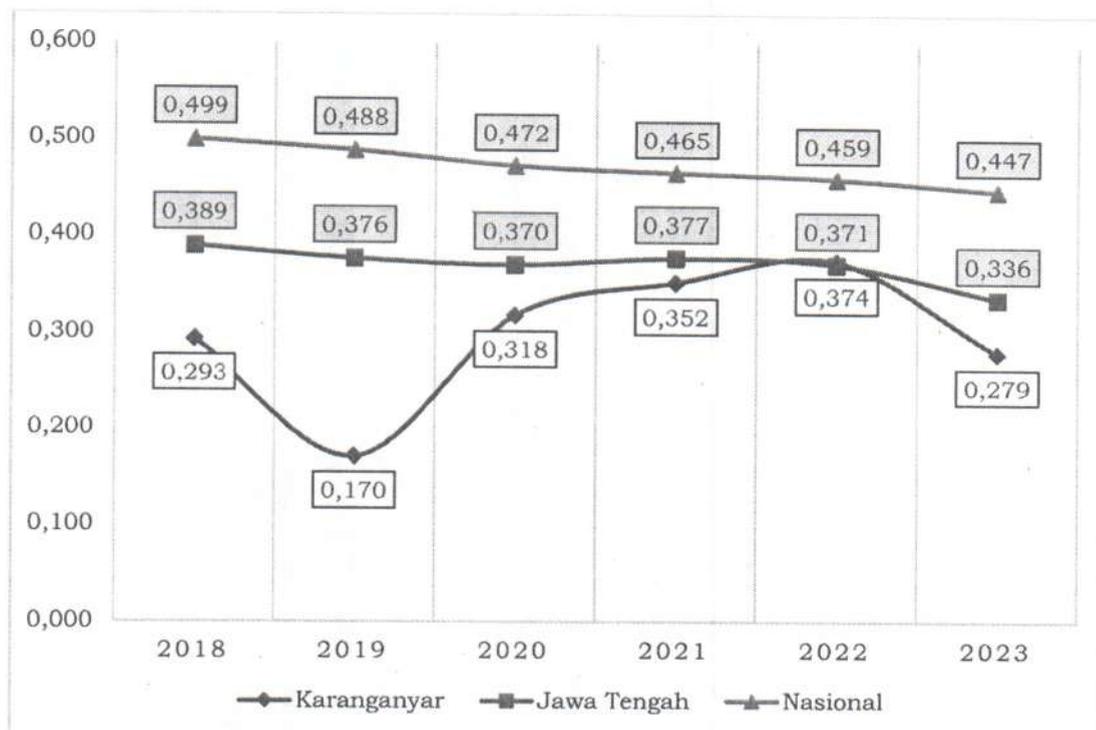


Gambar 2.40.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 66,62. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Pada tahun 2018 IKG Kabupaten Karanganyar sebesar 0,293 namun menurun menjadi 0,279 di tahun 2023. Capaian IKG Kabupaten Karanganyar masih di bawah nasional dan di atas Jawa Tengah. Penurunan ketimpangan gender harus terus ditekan. Angka tersebut menunjukkan kesetaraan antara pria dan perempuan semakin meningkat di Kabupaten Karanganyar. Artinya, ketimpangan gender semakin mengecil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

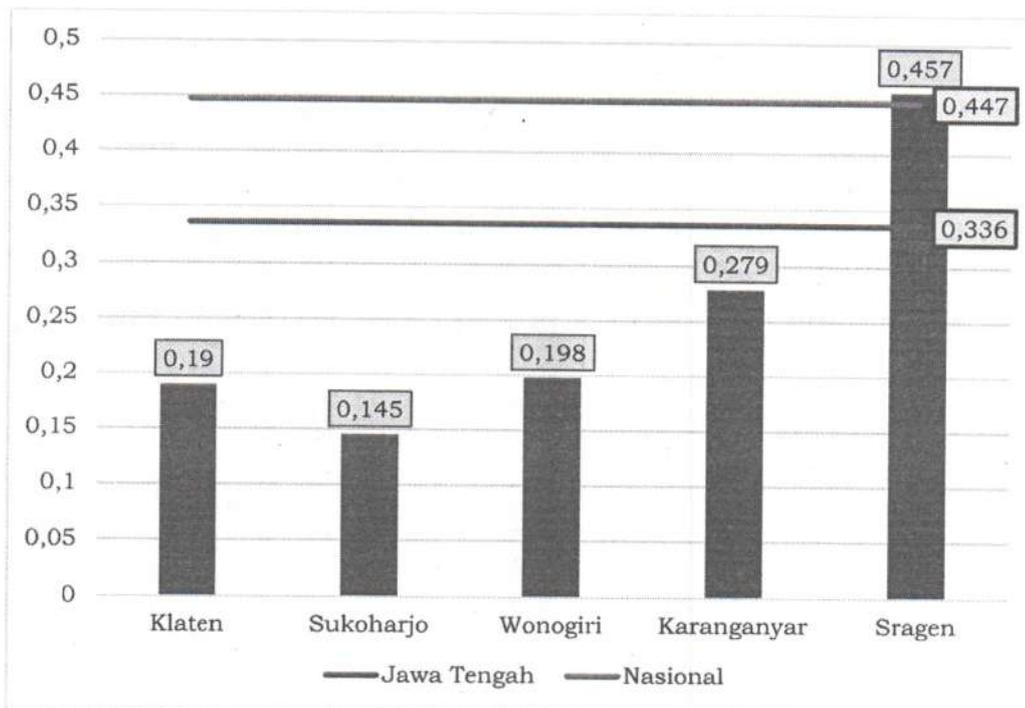


Gambar 2.41.

Perkembangan IKG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

IKG di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, angka capaiannya berada di atas Kabupaten Sragen (0,457). Namun capaian tersebut berada di atas capaian Kabupaten Klaten (0,190), Kabupaten Sukoharjo (0,145), dan Kabupaten Wonogiri (0,198). Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Karanganyar lebih tinggi daripada di Kabupaten Sragen. Sedangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi daripada di Karanganyar. Selengkapnya terkait IKG Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten lain di sekitarnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.42.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Kontribusi PDRB

Pada tahun 2022–2023 secara nasional dilaksanakan kebijakan pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta kebijakan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor riil, menumbuhkan iklim berusaha, pelayanan publik yang lebih baik untuk meningkatkan penanaman modal. Kondisi pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2014–2023 yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 24.635.058,52 juta rupiah,

kemudian meningkat menjadi 47.203.554,40 juta rupiah di tahun 2023.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 20.262.444,42 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 30.208.236,04 juta rupiah di tahun 2023.

Tabel 2.9.

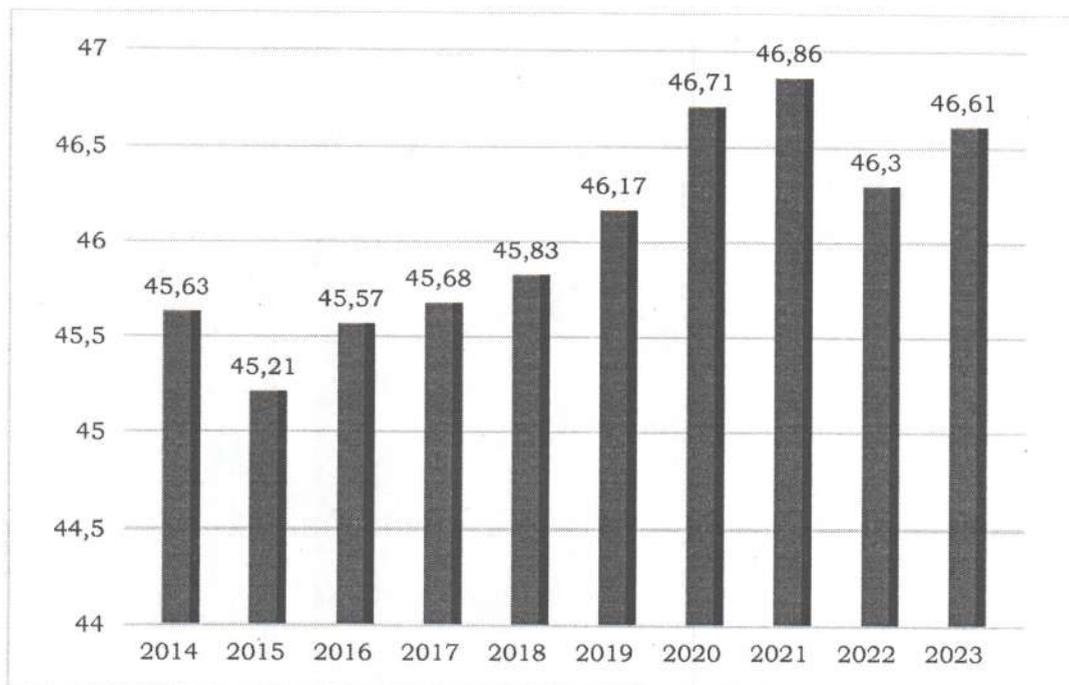
**PDRB ADHB & ADHK Kabupaten Karanganyar
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2023**

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2014	24.635.058,52	20.262.444,42
2015	26.904.049,89	21.286.287,14
2016	29.322.302,40	22.428.803,80
2017	31.538.339,97	23.731.952,05
2018	34.287.872,56	25.150.277,73
2019	37.013.093,96	26.641.186,38
2020	37.023.453,39	26.103.228,36
2021	39.157.212,60	27.039.607,96
2022	43.087.760,28	28.624.989,89
2023	47.203.554,40	30.208.236,04

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 45,63%, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 46,61%. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Selengkapnya terkait perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.43.

Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 menurun, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan PDRB ADHB 2014 sebesar 29.039,61 ribu rupiah, menjadi 49.421,80 ribu rupiah di tahun 2023. PDRB Per kapita ADHK 2010 tahun 2014 sebesar 23.885,21 ribu rupiah dan meningkat menjadi 31.627,82 ribu rupiah di tahun 2023. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang semakin baik. Selengkapnya terkait perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10.
PDRB Per kapita Tahun 2014-2023

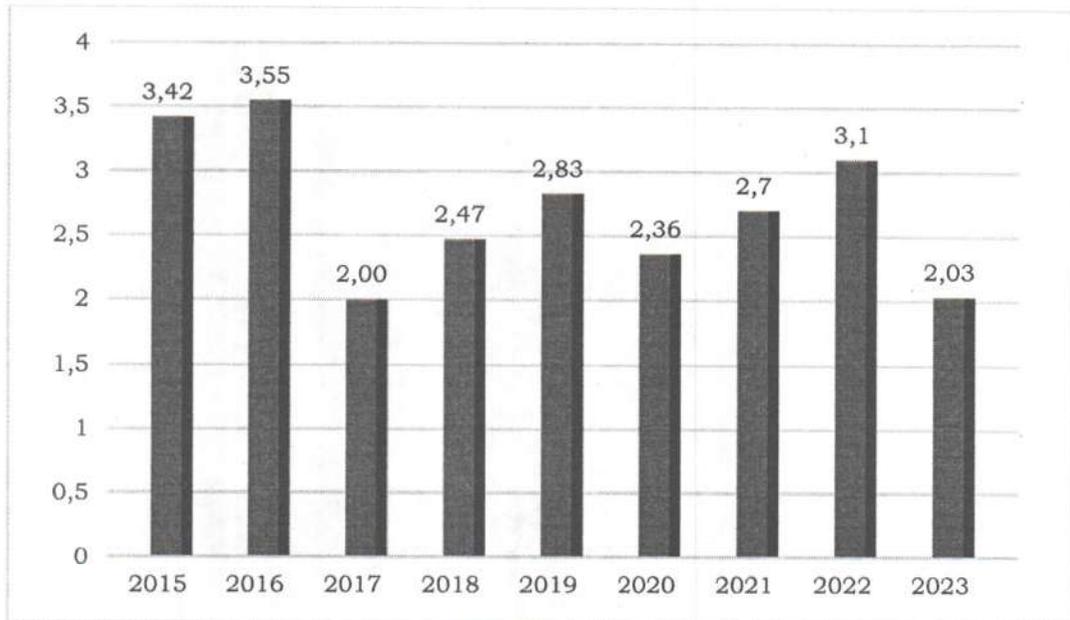
Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	
				ADHB	ADHK
2014	24.635.058.520,00	20.262.444.420,00	848.326	29.039,61	23.885,21
2015	26.904.049.890,00	21.286.287.140,00	856.198	31.422,70	24.861,41
2016	29.322.302.400,00	22.428.803.800,00	864.021	33.937,03	25.958,63
2017	31.538.339.970,00	23.731.952.050,00	871.596	36.184,59	27.228,16
2018	34.287.872.560,00	25.150.277.730,00	875.946	39.143,82	28.712,13
2019	37.013.093.960,00	26.641.186.380,00	886.519	41.751,04	30.051,46
2020	37.023.453.390,00	26.103.228.360,00	931.963	39.726,31	28.008,87
2021	39.157.212.600,00	27.039.607.960,00	938.808	41.709,50	28.802,06
2022	43.087.760.280,00	28.624.989.890,00	947.642	45.468,39	30.206,54
2023	47.203.554.400,00	30.208.236.040,00	955.116	49.421,80	31.627,82

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2024

Investasi Ekonomi Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2015-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 rasio kewirausahaan daerah di Kabupaten Karanganyar sebesar 3,42%, kemudian mengalami fluktuatif sampai di tahun 2023 menjadi 2,03%. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

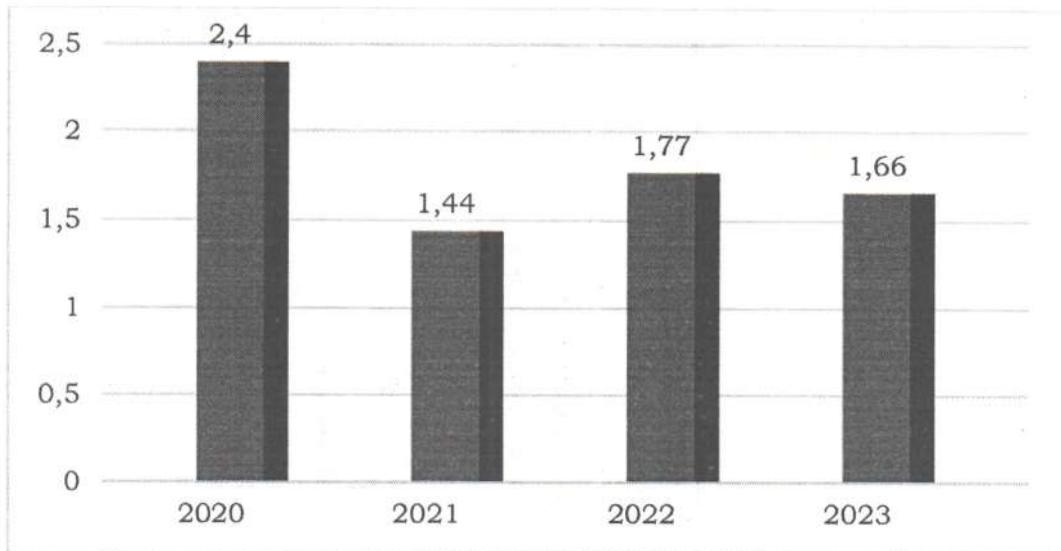


Gambar 2.44.
Rasio Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2015-2023

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Pada tahun 2020 rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 2,4%, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,66%. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Selengkapnya terkait rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut.



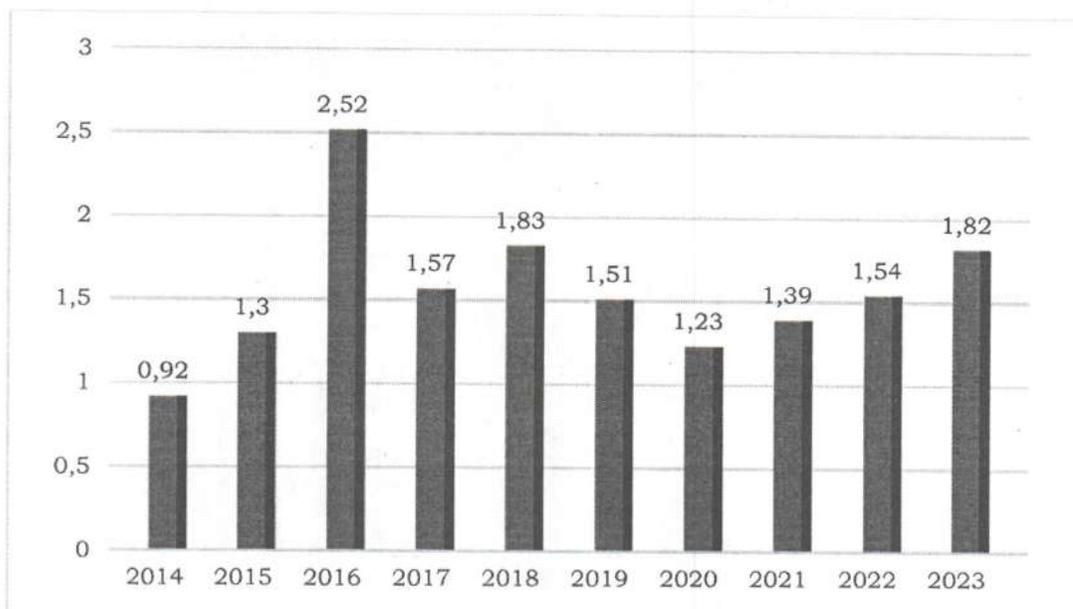
Gambar 2.45.

**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2023**

Sumber : DiskuktransESDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung menunjukkan fluktuatif. *Return On Asset (ROA)* BUMD di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 0,92% kemudian mengalami fluktuatif menjadi 1,82% di tahun 2023. Semakin tinggi tingkat ROA BUMD, maka dapat diketahui tingkat produktivitas juga semakin tinggi. Selengkapanya terkait perkembangan Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.46.
Return On Asset (ROA) BUMD di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2023

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. Terdapat 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok) yaitu Beras Medium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Minyak Goreng Kemasan Sederhana, Daging Sapi Paha Belakang, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Kedelai Impor, Cabe Merah Keriting, Cabe Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih Impor Kating, Ikan Kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

Tabel 2.11.
Disparitas Harga 13 Komoditas Barang Pokok
Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2023

No	Komoditas	2022	2023
1	Beras Medium	±0,01	±0,01
2	Gula Pasir	±0,02	±0,03
3	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	±0,08	±0,07
4	Daging Sapi Paha Belakang	±0,04	±0,06
5	Daging Ayam Ras	±0,04	±0,05
6	Telur Ayam Ras	-	-
7	Tepung Terigu	-	-
8	Kedelai Impor	±0,05	±0,07
9	Cabe Merah Keriting	±0,01	±0,09
10	Cabe Rawit Merah	±0,05	±0,06
11	Bawang Merah	±0,09	±0,06

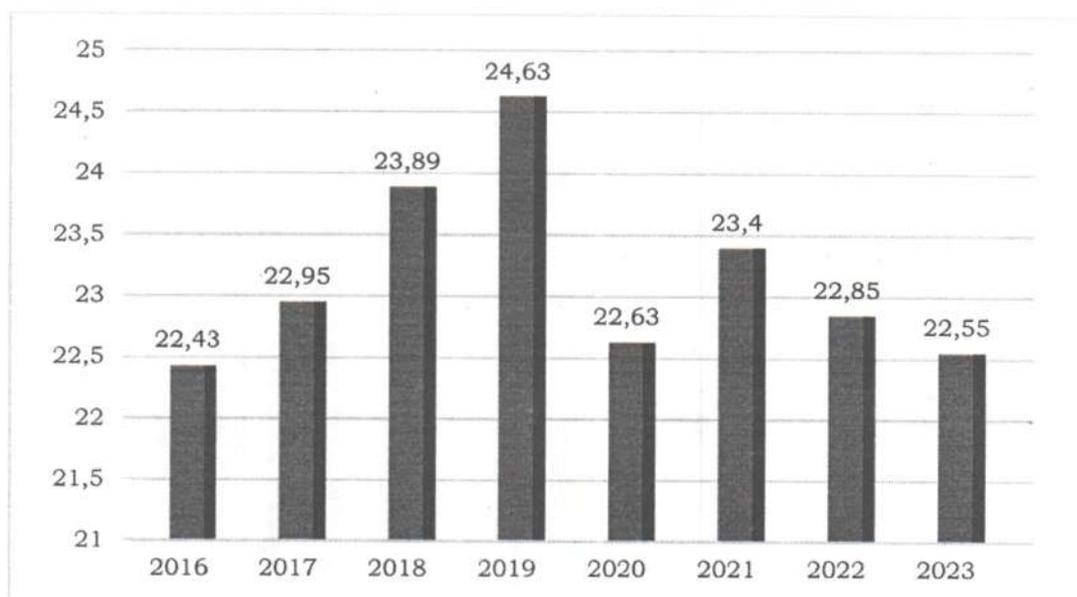
No	Komoditas	2022	2023
12	Bawang Putih Kating	±0,05	±0,04
13	Beras Medium	±0,01	±0,01

Sumber : DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar, 2024

Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Karanganyar salah satunya dapat dilakukan dengan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan produk dari usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Dengan memperbanyak penggunaan produk dalam negeri tau produk lokal, daerah menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko dari fluktuasi harga serta ketersediaan produk di pasar internasional. UMKM dan koperasi adalah tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan mendorong penggunaan produk lokal, pemerintah dan masyarakat berkontribusi pada pertumbuhan usaha kecil dan koperasi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penggunaan produk dalam negeri yang lebih luas membantu meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk lokal, sehingga bisa bersaing di pasar global. Ini juga membuka peluang ekspor dan memperluas pangsa pasar internasional. Kabupaten Karanganyar telah melakukan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan produk dari usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang tertuang dalam Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 027/9 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang di budidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Karanganyar sebesar 24,67%, mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 22,55%. Selengkapnya terkait perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

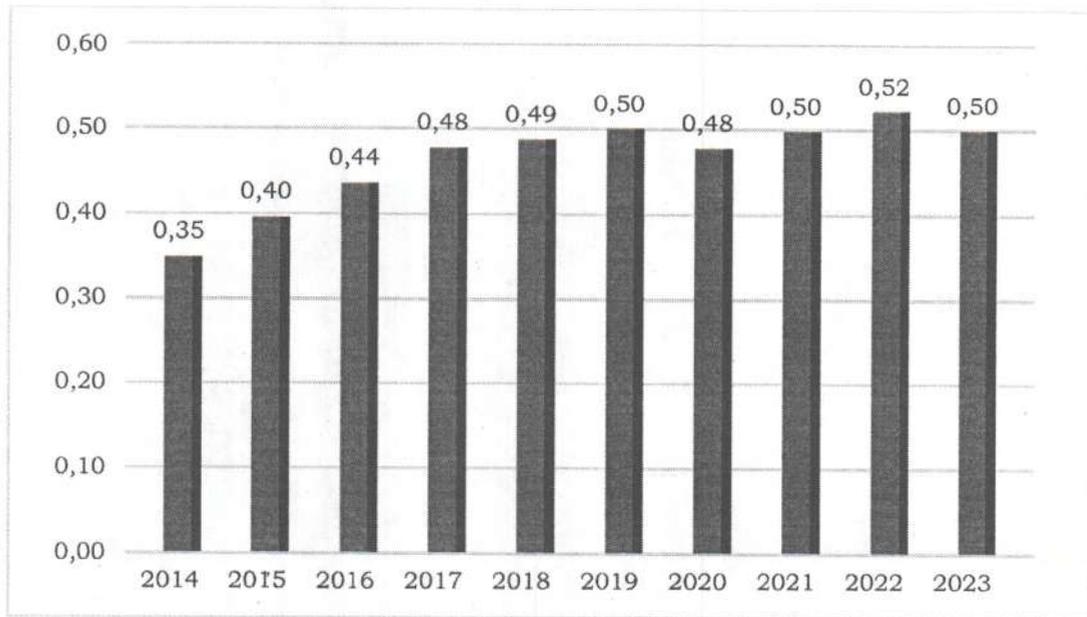


Gambar 2.47.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2023

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk dari pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU HKPD, hasil pajak harus digunakan untuk pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan. Rasio pajak yang tinggi idealnya diikuti dengan pengalokasian dana yang efisien untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung fluktuatif. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 4,25% kemudian mengalami fluktuatif menjadi 7,81% di tahun 2023. Jika rasio pajak rendah, ini bisa mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah belum dimaksimalkan, dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pemungutan pajak. Jika rasio pajak tinggi tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, ini bisa menjadi tanda bahwa beban pajak terhadap masyarakat dan bisnis terlalu tinggi, dan perlu ada penyesuaian kebijakan. Selengkapnya terkait Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.48.

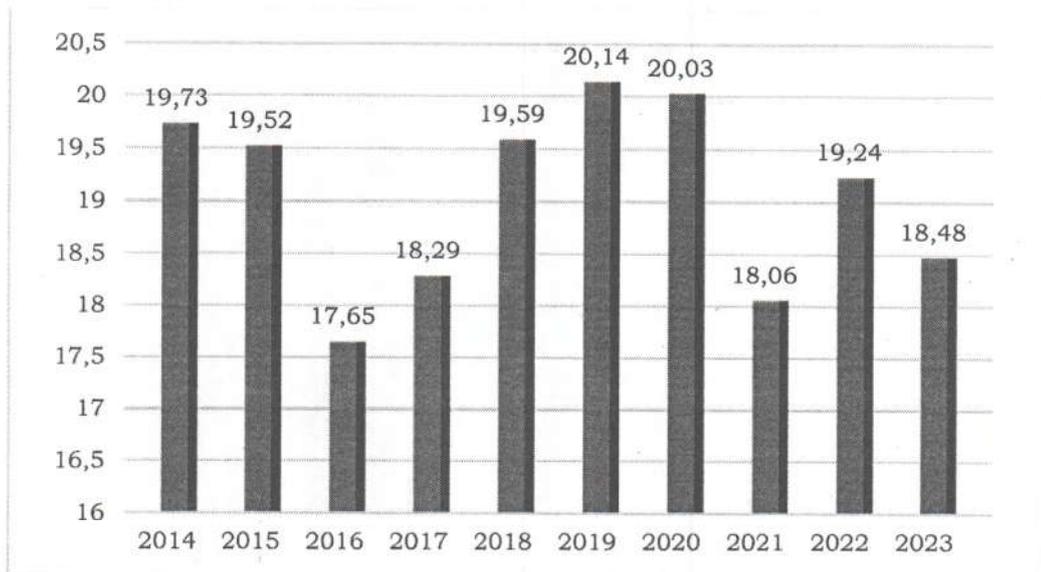
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal. Semakin besar penerimaan dari pajak daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dan layanan publik. Kemampuan daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (seperti dana perimbangan), karena mereka mampu membiayai kebutuhan mereka sendiri melalui pajak. Pada tahun 2023 indeks kapasitas fiskal Kabupaten Karanganyar sebesar 0,927 (sangat rendah), hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 19,73% dan mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 sebesar 18,48%. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan

moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.



Gambar 2.49.

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada Persentase Pengeluaran Kelompok 40 Persen Penduduk Terbawah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Perkembangan total dana pihak ketiga terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 total dana pihak ketiga terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 1,64% menjadi 1,61% di tahun 2023. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12.

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Dana Pihak Ketiga (Juta Rupiah)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
2019	37.013.093,96	605.171,10	1,64
2020	37.023.453,39	654.094,60	1,77
2021	39.157.212,60	702.515,50	1,79
2022	43.087.760,28	739.701,00	1,72
2023	47.203.554,40	758.849,40	1,61

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di Kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan total kredit terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 total kredit terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar sebesar 10,96% menjadi 11,92% di tahun 2023. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13.

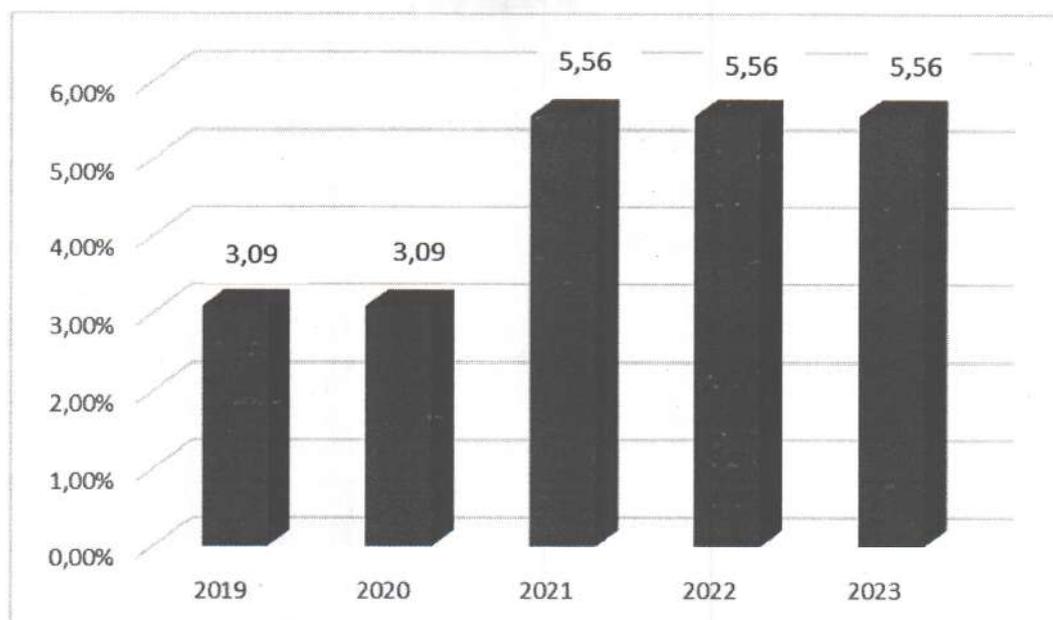
**Total Kredit terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023**

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	TOTAL KREDIT (Juta Rupiah)	Total Kredit/PDRB (%)
2019	37.013.093,96	4.055.585,00	10,96
2020	37.023.453,39	4.099.594,00	11,07
2021	39.157.212,60	4.652.675,00	11,88
2022	43.087.760,28	5.387.972,00	12,50
2023	47.203.554,40	5.627.929,00	11,92

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Untuk mendukung pemerataan pembangunan, pembangunan desa menjadi penting agar desa menjadi desa mandiri, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa Mandiri merupakan Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Persentase desa mandiri di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 s.d 2020 sebesar 3,095 atau sebanyak 5 (lima) desa dengan Status Mandiri, kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 5,56% di tahun 2021 hingga 2023, atau sebanyak 9 (Sembilan) desa di Kabupaten Karanganyar dengan status Desa Mandiri. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya. Selengkapnya terkait perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.50.
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023

Sumber : Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berikut adalah jumlah data indeks desa membangun Kabupaten Karanganyar berdasarkan klasifikasi desa.

Tabel 2.14.
Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berdasarkan Klasifikasi
Desa di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2019	4	40	111	7	-
2020	6	37	115	4	-
2021	7	36	117	2	-
2022	8	48	106	-	-
2023	9	58	95	-	-

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Perubahan dari IDM ke Indeks Desa akan memerlukan penyesuaian di berbagai tingkat, tetapi juga dapat membawa manfaat dalam hal relevansi dan efektivitas dalam menilai dan mendukung pembangunan desa. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) akan diganti dengan Indeks Desa yang baru, maka perubahan ini kemungkinan besar melibatkan penyesuaian terhadap cara pengukuran dan penilaian perkembangan desa-desa di Kabupaten Karanganyar.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang berdaya saing dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang diukur salah satunya dengan dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Literasi Membaca. . Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Indikator ini menggambarkan kualitas pendidikan terutama dalam literasi dan numerasi. Capaian Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022-2023

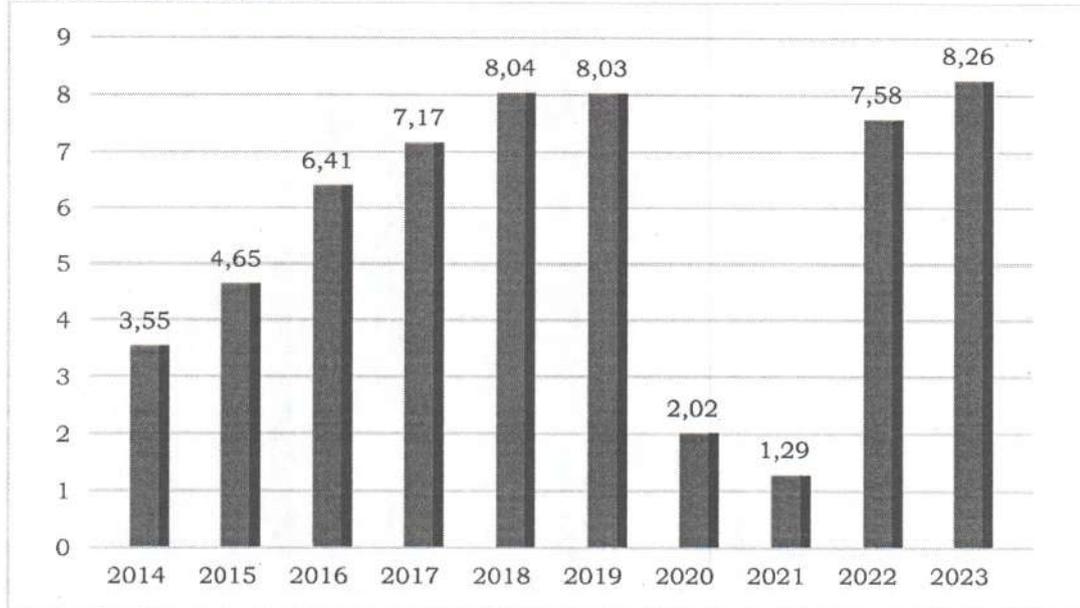
Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional (seluruh jenjang):	Satuan	2022	2023
a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	59,06	59,86
b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	55,29	56,69
c) Numerasi SD/Sederajat	%	43,6	45,45
d) Numerasi SMP/Sederajat	%	29,45	31,75

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 9,94%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 10,97%. Semakin meningkatnya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi maka dapat menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Taman baca sebagai wisata literasi merupakan suatu tempat yang mewadahi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Pemanfaatan taman baca ini dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kegiatan untuk menunjang budaya literasi. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Karanganyar terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai

tahun 2023, kecuali di tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2014, tingkat pemanfaatan perpustakaan sebesar 3,55% meningkat menjadi 8,03% di tahun 2019. Pada tahun 2020 capaiannya menurun menjadi 2,02% dan tahun 2021 sebesar 1,29. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi covid-19, dimana kunjungan perpustakaan secara *offline* ditutup sementara dan sekolah juga dilaksanakan secara daring. Namun pada tahun 2022 tingkat pemanfaatan perpustakaan kembali meningkat menjadi 7,58 dan 8,26% tahun 8,26%.

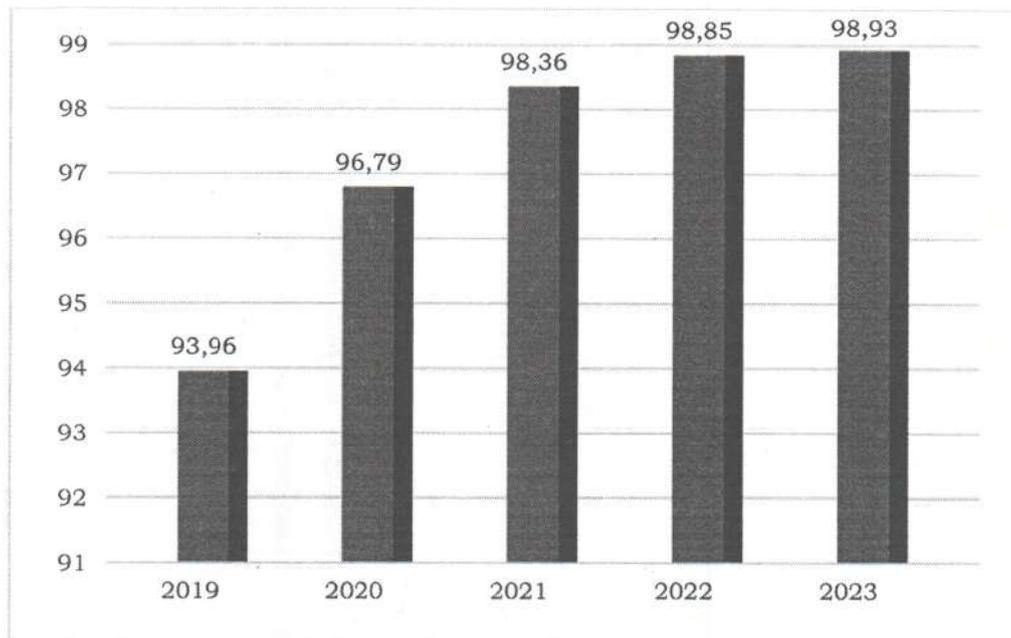


Gambar 2.51.

Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Disarpus Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun merupakan cakupan penduduk usia 5-6 th yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 93,96% kemudian meningkat menjadi 98,93% di tahun 2023.



Gambar 2.52.

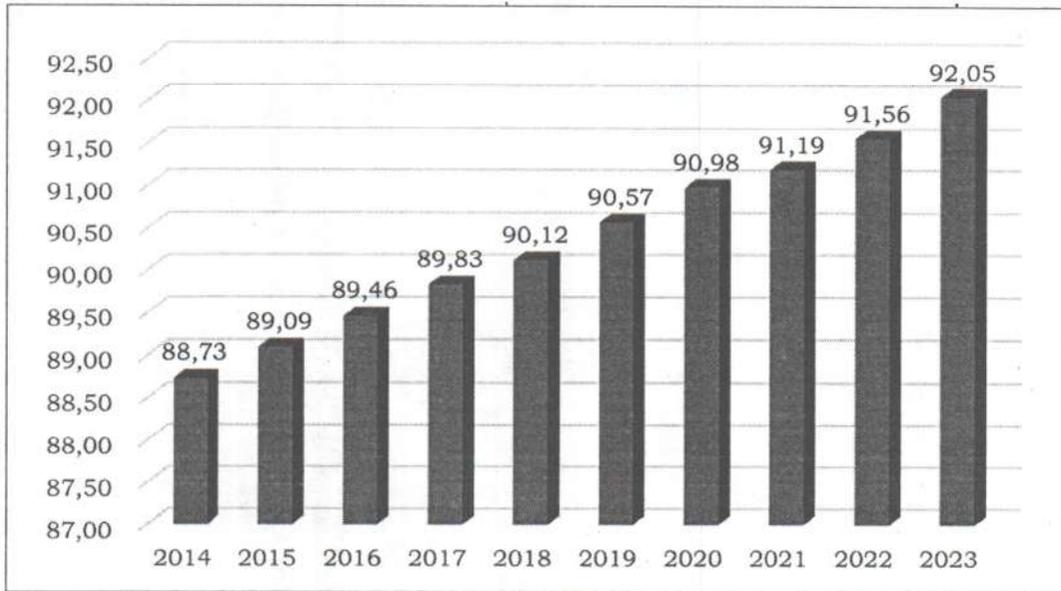
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah Perumahan dan Permukiman

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2014, rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 88,73%, terus mengalami kenaikan sampai di tahun 2023 sebesar 92,05%. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

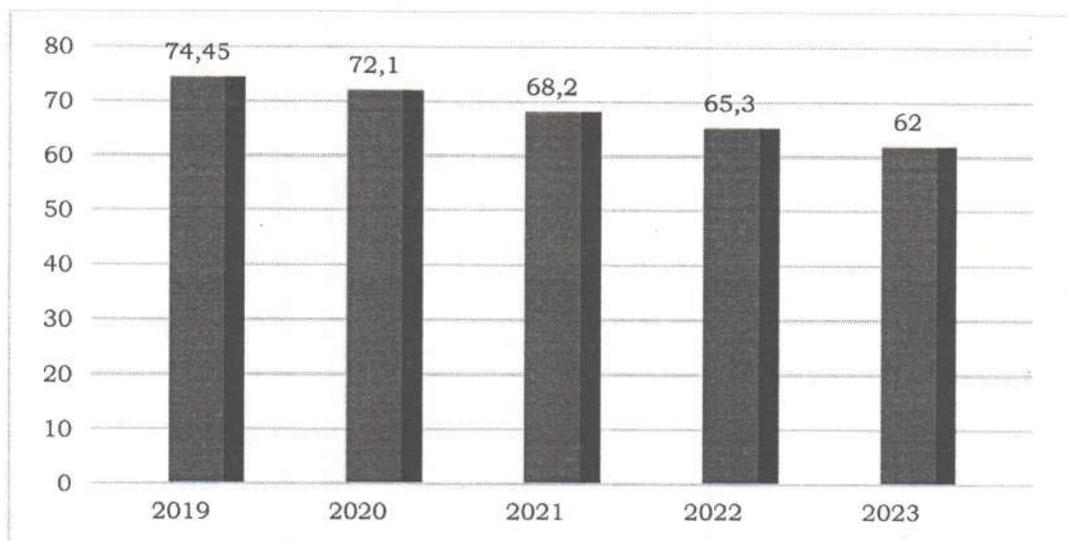


Gambar 2.53.

**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023**

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Permasalahan di kawasan kumuh merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Kawasan kumuh biasanya ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kondisi hidup yang buruk. Kawasan kumuh sering kali mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yang mengarah pada penggunaan ruang yang tidak efisien dan mengurangi kualitas hidup. Overpopulasi juga dapat menyebabkan masalah seperti penularan penyakit, kekurangan ruang untuk fasilitas umum, dan sulitnya penegakan hukum. Biasanya kawasan kumuh memiliki akses yang terbatas atau tidak ada sama sekali terhadap air bersih. Ini mempengaruhi kesehatan penduduk dan menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti diare dan kolera. Persentase kawasan kumuh yang ditangani kurang dari 10 ha di Kabupaten Karanganyar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

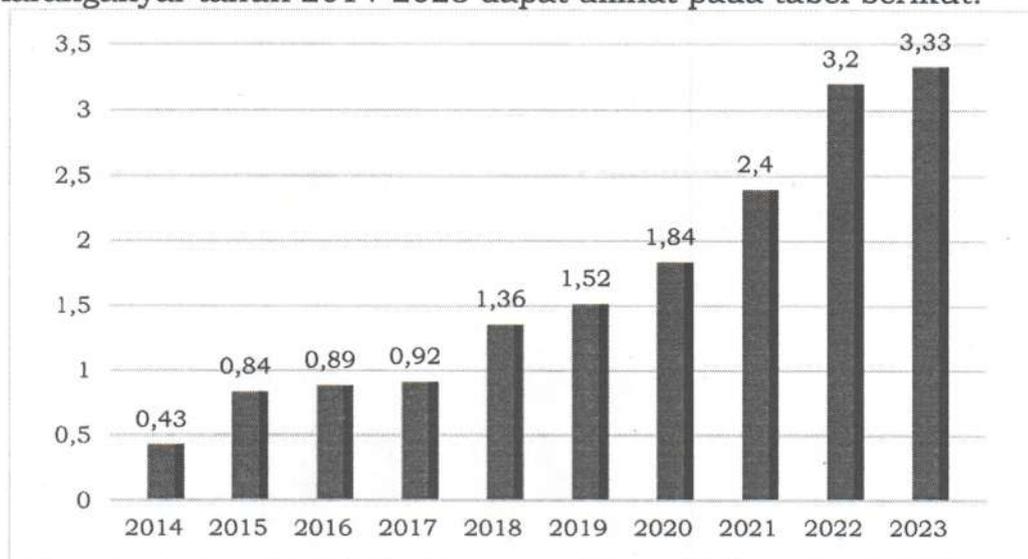


Gambar 2.54.

Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani Kurang dari 10 Ha Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : DPUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Rumah tangga di Kabupaten Karanganyar dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2014 sebesar 0,43%, terus mengalami peningkatan menjadi 3,33% di tahun 2023. Selengkapnya terkait perkembangan rumah tangga akses sanitasi aman di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



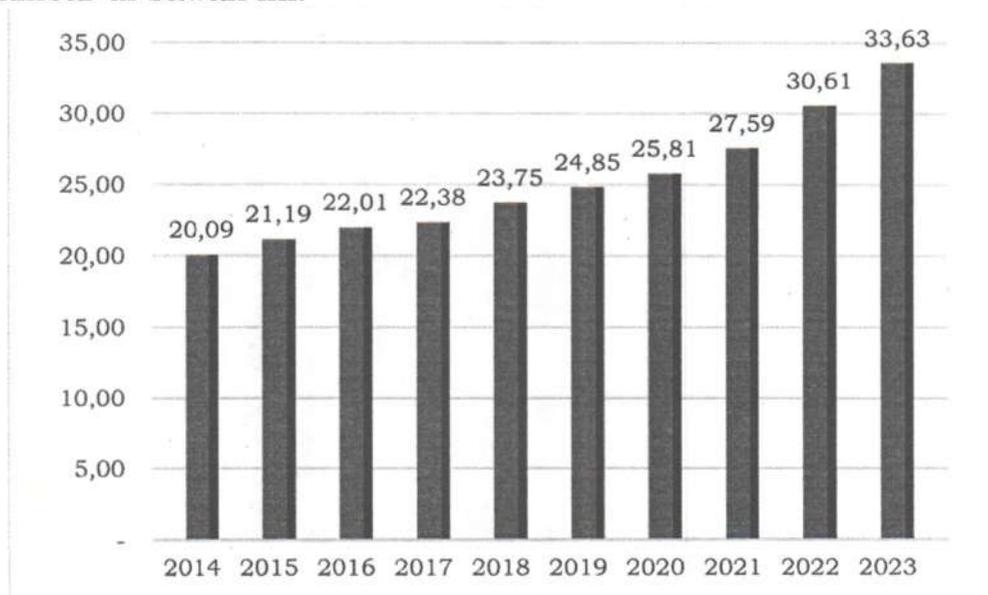
Gambar 2.55.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Perkembangan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 cenderung meningkat. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 20,09%, mengalami peningkatan menjadi 33,63% di tahun 2023. Selengkapnya terkait Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



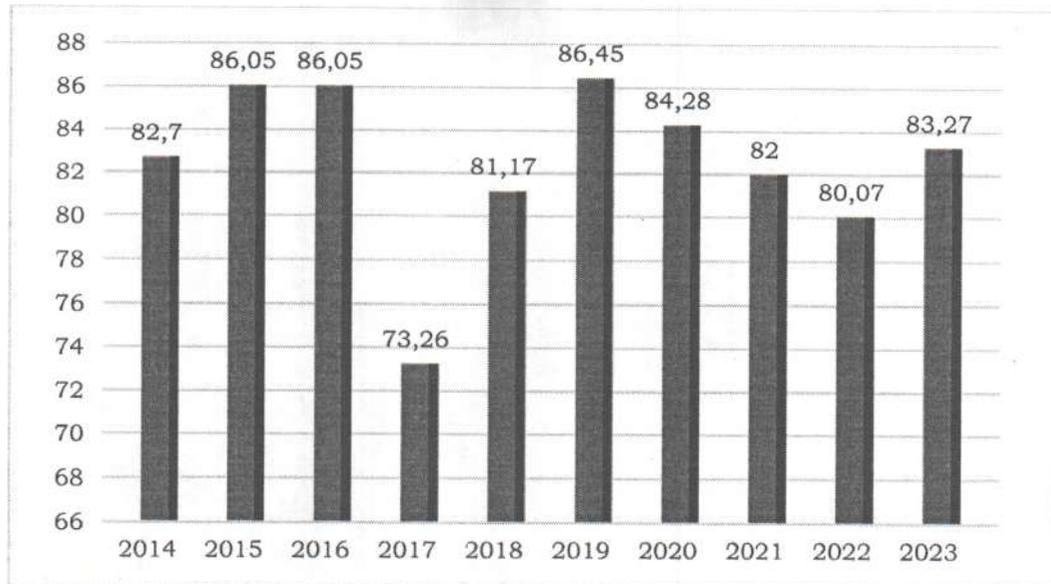
Gambar 2.56.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas PUPR dan PDAM Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Infrastruktur Transportasi

Jalan dengan kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 82,70%. Kondisi tersebut terus membaik sampai tahun 2016 menjadi 86,05% di tahun 2016. Setelah itu mengalami fluktuatif sampai tahun 2023 menjadi 83,27%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.57.
Persentase Jalan Mantap Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten / kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pada tahun 2023, kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 49,37%.

Secara keseluruhan, kondisi jalan yang baik dan kelengkapan jalan yang memadai merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan menurunkan angka kecelakaan. Jumlah kecelakaan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Jumlah dan Golongan Kecelakaan di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Jol	Berat	Sedang	Ringan
2017	940	1	125	808	6
2018	846	0	110	733	3
2019	1.466	0	110	1.350	6
2020	1.073	0	86	984	5
2021	1.141	0	99	1.036	6
2022	929	0	15	911	3

Sumber : Polres Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Rasio konektivitas memiliki hubungan yang signifikan dengan perekonomian, terutama dalam konteks bagaimana sistem ekonomi terhubung dan beroperasi. Konektivitas yang baik dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, seperti efisiensi pasar,

pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan inovasi. Rasio konektivitas Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar 0,67. Jumlah angkutan trayek (angkutan perdesaan) di Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebanyak 14 trayek, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

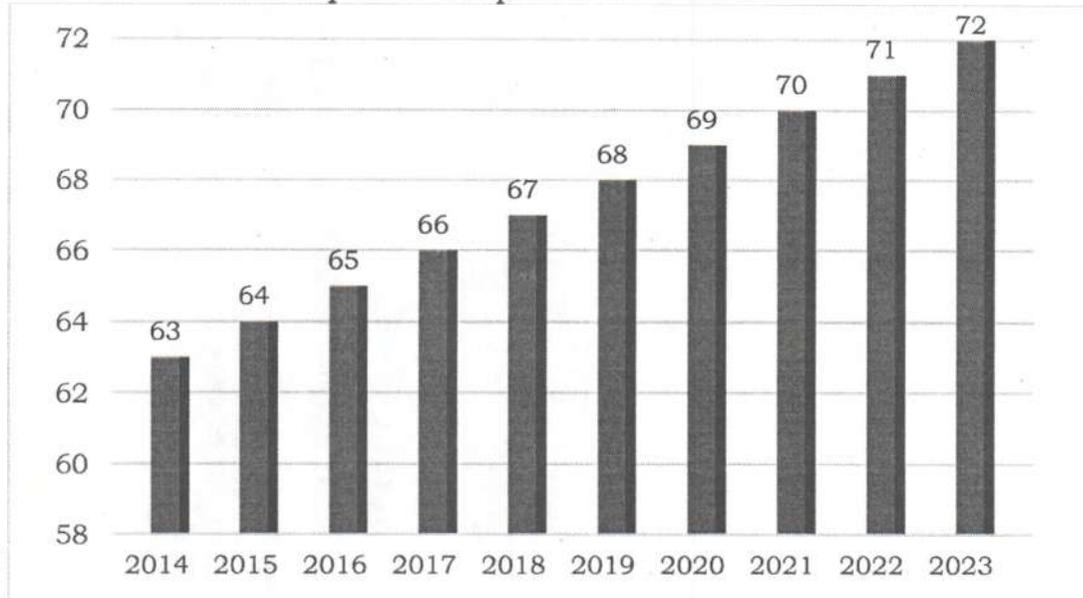
Tabel 2.17.
Angkutan Trayek (Angkutan Perdesaan) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Trayek	Rute Trayek	Kapasitas	Jumlah Kendaraan	Nama Perusahaan
1	Jalur A	Baen-Papahan-Palur	12	63	Kop Karanganyar Jaya
2	Jalur B	Bejen-Jongke-Tasikmadu-Nlarang-Kebakkramat-Palur	12	5	Kop Karanganyar Jaya
3	Jalur D	Bajen-Jongke-Pegadaian-RSU. Jengglong-Beji-Kelijirak-Gunung Watu-Mojoroto-Mojogedang-Sambirajo-Karangpandan	12	1	Kop Karanganyar Jaya
4	Jalur E	Jongke-Pengadaian-Bejen-Ngrawoh-Nongo-Gantiwarno-Klangon-Jloko-Matesih	12	12	Kop Karanganyar Jaya
5	Jalur F	Jongke-Pegadaian-Siwaluh-Songglon-Gembong-Sambirejo-Jumantono-Sringin-Matesih	12	2	Kop Karanganyar Jaya
6	Jalur G	Karangpandan-Gerdu-Gribangun-Matesih-Plaosan	12	8	Kop Roda Manunggal
7	Jalur G2	Matesih-Plaosan	12	1	Kop Roda Manunggal
8	Jalur L	Jongke-Jengglong-Dawon-Gaum-Bejen-Popongan-Delingan-Ngepos SDN 1 Bangsri-SMAN Karangpandan	12	1	Kop Sari Jati
9	Jalur N	Karangpandan-Jikut-Oandanamon-Dukuh	12	21	Kop Sari Jati
10	Perdesaan	Karanganyar (Terminal Tegal Gede-Terminal Bejen)-Jumapolo-Jatioso/Jatipuro	16	7	Koppakar
11	Perdesaan	Karangpandan-Kemuning-Ngargoyoso-Batujamus/Kerjo	16	53	Kop Sarwo Rukun dan Koppakar
12	Perdesaan	Karanganyar-Tunggal-Matesih-Karanglo-Tawangamangu	16	20	Kop Roda Manunggal
13	Perdesaan	Karanganyar-Mojogedang-Batu Janus-Sambirejo	16	19	Koppakar
14	Perdesaan	Jenawi (Bolong)-Sambirejo-Sragen	16	17	Kop Ageng Wahyu

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembapan yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2014-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar mencapai angka 63, kemudian terus mengalami kenaikan sampai 72 di tahun 2023. Selengkapnya terkait Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



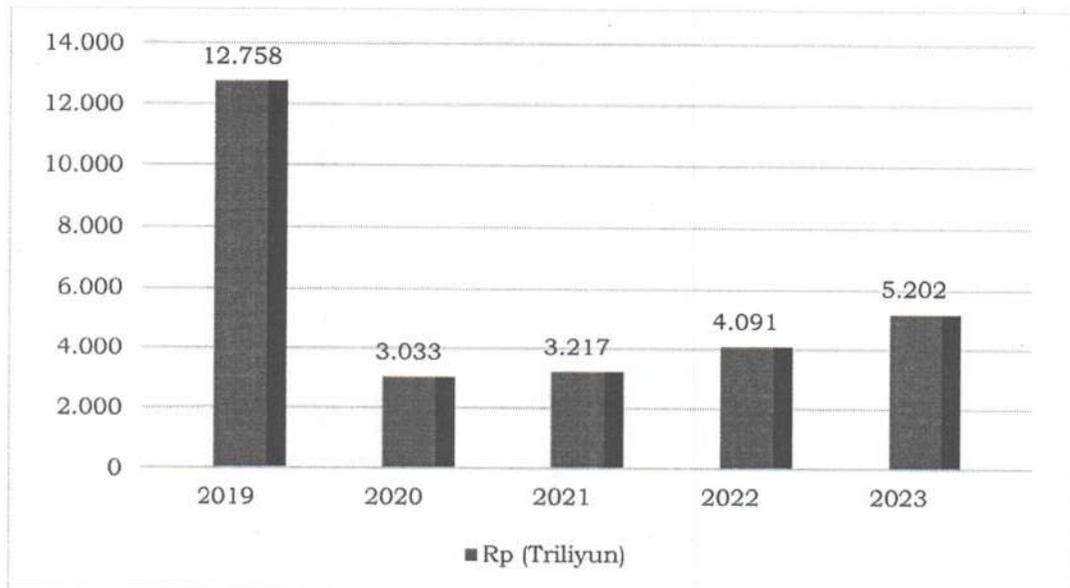
Gambar 2.58.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2023

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Realisasi investasi menunjukkan beberapa hal penting tentang kondisi ekonomi dan potensi pertumbuhan suatu daerah. Realisasi investasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019, sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19. Namin mulai tahun 2021 mengalami peningkatan smapai di tahun 2023. Perkembangan rekaisasi investasi Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.59.

Realisasi Investasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Realisasi investasi yang tinggi menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan potensi pertumbuhan di Kabupaten Karanganyar. Stabilitas ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondusifitas wilayah. Kondusifitas wilayah dilihat dari konflik SARA yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk ke dalam tahap pencegahan.

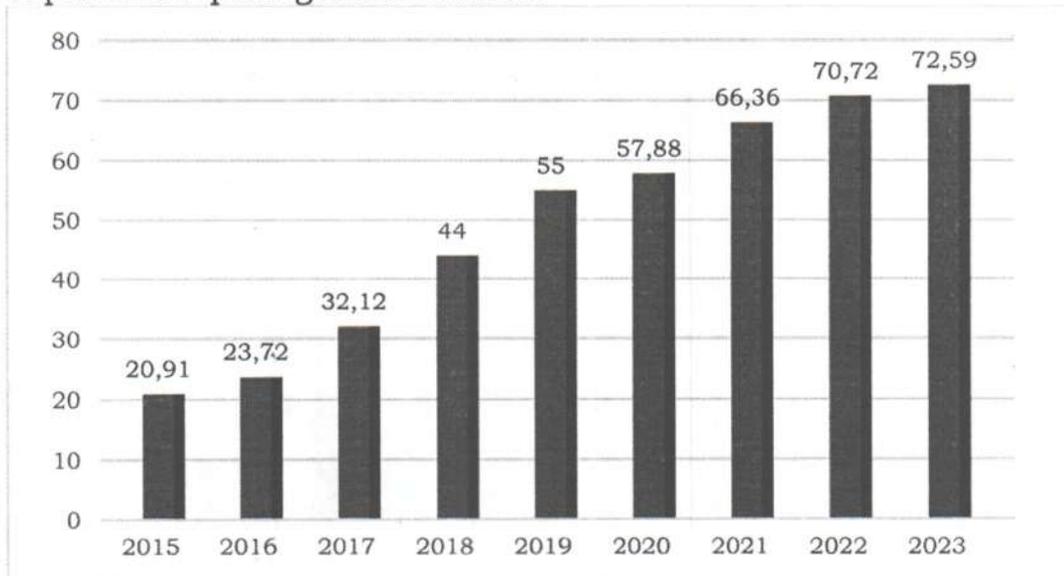
Konflik sara di Kabupaten Karanganyar terjadi pada tahun 2018-2019 sebanyak satu kasus. Selanjutnya sampai di tahun 2023 tidak ditemukan lagi adanya kasus sara di Kabupaten Karanganyar.

**2.4. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik

data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. IPP Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sebesar 4,15, meningkat menjadi 4,55 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 capaian IPP Kabupaten Karanganyar menurun 0,08 menjadi 4,47. Semakin tinggi nilai IPP menggambarkan semakin meningkatnya kinerja pelayanan publik di pemerintah daerah.

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Perkembangan rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015-2023 terus meningkat. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 20,91% terus meningkat menjadi 72,59% di tahun 2023. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

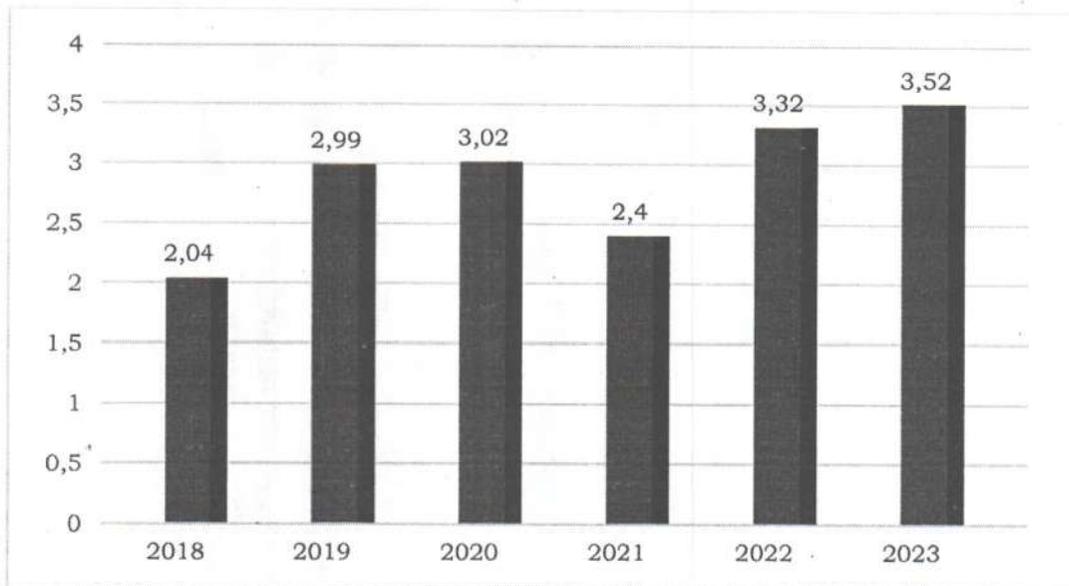


Gambar 2.60.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2023

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik. Indeks SPBE Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebesar 2,04 terus meningkat di menjadi 3,52% di tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.61.

Indeks SPBE Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

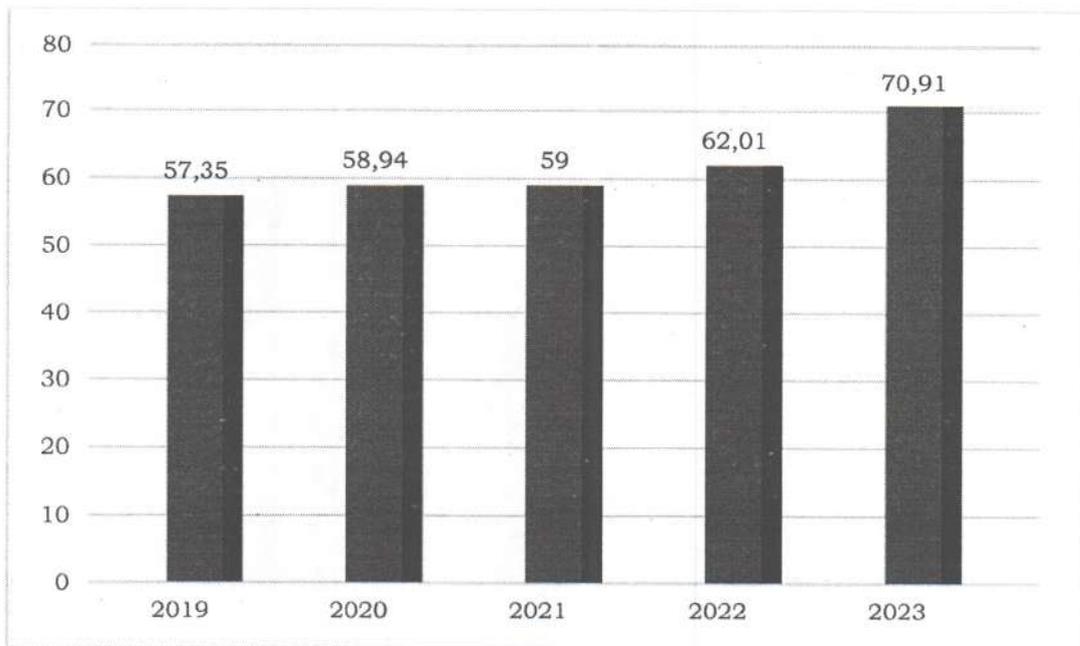
Sumber: Kominfo Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan kluster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Pada tahun 2022 kapabilitas inovasi di Kabupaten Karanganyar sebesar 2,09, meningkat menjadi 3,36 di tahun 2023.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 57,35 dan meningkat menjadi 70,91 di tahun 2023. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada didaerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Selengkapnya terkait perkembangan indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.62.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023

Sumber: Setda Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indeks Reformasi Hukum

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan Indeks Reformasi Hukum menjadi salah satu indikator penilaian dalam Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 yaitu:

- a. Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. Mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu;
- c. Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan;
- d. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.

Berdasarkan variabel tersebut, pelaksanaan IRH ini tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Bagian Hukum, namun demikian harus menjadi

tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

Nilai IRH Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 sebesar 49,66, kemudian meningkat menjadi 66,55 di tahun 2023. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/ PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.

IIN Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sebesar 75,5. Angka tersebut meningkat di tahun 2022 menjadi 78,00, sama halnya dengan nilai IIN di tahun 2023 juga meningkat menjadi 79,07.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, berikut ini kesimpulan yang dirumuskan:

1. Dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Visi Dokumen RPJPD adalah **“KARANGANYAR YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**. Visi ini akan diterjemahkan ke dalam Visi RPJMD. Pada Tahap I RPJPD terdapat Renstra Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, visi Renstra adalah **Visi : Terwujudnya Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur dan mandiri dalam suasana tenteram dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, yang didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, demokratis, berbudi luhur dan berkepribadian bangsa** pada Tahap II RPJPD, terdapat RPJMD Periode 2009-2013 dengan Visi: **“Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera”**, pada tahap III RPJPD terdapat RPJMD 2014-2018 memiliki visi **“Bersama Memajukan Karanganyar”** dan pada Tahap IV RPJPD Tahun 2018-2023 dengan misi **“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**.
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Karanganyar memiliki kesesuaian dengan dokumen RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. Visi RPJPD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional sama memiliki frase Sejahtera. Namun demikian walaupun frase maju dan mandiri tidak tertulis secara tersurat namun secara misi antara misi RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar terdapat konsistensi.

3. Hasil evaluasi sasaran pokok RPJPD dapat dilihat bahwa pencapaian indikator mengalami peningkatan setiap periodenya. Rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 sebesar **93,28%** dengan predikat Kinerja **Sangat Tinggi**. Namun apabila dilihat dari tercapai atau tidak tercapai pada periode Pertama (2005-2009) capaiannya tidak terlihat hal ini dikarenakan pada dokumen RPJPD periode tersebut tidak bersifat kuantitatif yang memiliki target.
4. Keberhasilan pembangunan selama 20 tahun dapat dilihat dari capaian indikator makro. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2005 sebesar 70,70% meningkat menjadi 76,58% pada tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian yang meningkat setiap tahunnya. Angka kemiskinan mengalami perkembangan yang baik, penurunan dari tahun 2005 sebesar 16,14% menjadi 9,85% pada tahun 2022. Sedangkan pada Angka pengangguran mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 5,49% menjadi 5,87% pada tahun 2022, peningkatan TPT ini dikarenakan pada periode akhir RPJPD terjadi pandemic COVID 19 yang menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan. Namun demikian PDRB Per Kapita mengalami peningkatan. Pada Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari 5,49% menjadi 5,87%. Secara umum pembangunan jangka Panjang atau selama 20 tahun mengalami perkembangan yang baik.
5. Renstra Daerah Kabupaten Karanganyar Tahap I Tahun 2005 - 2009 memiliki **Visi : Terwujudnya Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil, makmur dan mandiri dalam suasana tenteram dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, yang didukung oleh masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, demokratis, berbudi luhur dan berkepribadian bangsa**, memiliki 7 misi dan memiliki capaian yang baik.
6. RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 memiliki visi **"Terwujudnya Karanganyar yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera"**, dilaksanakan melalui 5 misi. RPJMD ini terdapat 78 indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi 126,65% dengan predikat sangat tinggi. Dari 78 indikator yang mendapat predikat sangat tinggi (ST) sebanyak 71,79% (56 indikator), predikat tinggi sebanyak 8,97% (7 indikator), predikat sedang (S) sebesar 3,85% (3 indikator), predikat rendah (R) sebesar 6,41% (5 indikator), dan predikat Sangat Rendah (SR) sebesar 8,97% (7 indikator).
7. Pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 memiliki visi **"Bersama Memajukan Karanganyar"**, dilaksanakan melalui 5 misi. RPJMD ini terdapat 96 indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi 138,65% dengan predikat sangat tinggi. Dari 96 indikator yang mendapat predikat sangat tinggi (ST) sebanyak 63,54% (61 indikator), predikat tinggi sebanyak 21,88% (21 indikator), predikat sedang (S) sebesar 3,13% (3 indikator), predikat rendah (R) sebesar 3,13% (3

indikator), dan predikat Sangat Rendah (SR) sebesar 8,33% (8 indikator).

8. Pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memiliki visi **"Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"**, dilaksanakan melalui 5 misi. RPJMD ini terdapat 55 indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi 302,94% dengan predikat sangat tinggi. Dari 55 indikator yang mendapat predikat sangat tinggi (ST) sebanyak 70,91% (39 indikator), predikat tinggi sebanyak 14,55% (8 indikator), predikat sedang (S) sebesar 5,45% (3 indikator), dan predikat Sangat Rendah (SR) sebesar 9,09% (5 indikator).

Berdasarkan analisis dan kesimpulan hasil evaluasi berikut ini rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan jangka panjang ke depan :

1. Peningkatan daya saing manusia dititikberatkan pada peningkatan indeks pembangunan manusia pada komponen pendidikan dengan meningkatkan anak usia sekolah untuk bersekolah, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada usia produktif dan lansia. Pada akhir tahun 2045 lansia kita akan meningkat sehingga kualitas usia produktif yang akan menjadi lansia menjadi prioritas. Peningkatan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu memiliki daya beli yang baik. Penurunan kemiskinan dititikberatkan pada penduduk yang betul-betul miskin dengan memberikan jaminan perlindungan sosial sehingga mengurangi beban biaya hidup penduduk miskin. Selain itu peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memberikan kompetensi menjadi prioritas ke depan.
2. Peningkatan daya saing ekonomi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas usaha mikro dan industri kecil serta menengah, pemerataan pembangunan antara wilayah harus menjadi prioritas pembangunan. Pengembangan Kawasan industri menjadi prioritas ke depan dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Karanganyar. Pengembangan destinasi wisata juga menjadi prioritas berikutnya dalam pengembangan kemandirian ekonomi. Berdasarkan PDRB Kabupaten Karanganyar dapat dilihat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar ke 2 setelah industri pengolahan. Hal ini mengandung arti bahwa Kabupaten Karanganyar harus mempertahankan produktivitas pertanian dalam arti luas. Pembangunan infrastruktur ke depan harus mampu membuka akses dan mendukung pembangunan ekonomi.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dititik beratkan pada peningkatan pengelolaan sampah, penanganan pencemaran udara dan air. Perubahan iklim menjadi isu yang cukup mendapat perhatian saat ini dan ke depan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan pembangunan 20 tahun yang akan datang. Gerakan dan pemberdayaan kampung proklamasi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi perubahan

iklim. Pembangunan Kawasan perkotaan yang sehat juga merupakan terobosan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4. Peningkatan reformasi birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan semakin ditingkatkan. Kualitas data menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembangunan.
5. Peningkatan pelibatan pada masyarakat rentan masih menjadi prioritas pada pembangunan 20 tahun ke depan. Menjadikan Kabupaten Karanganyar inklusif, dengan mendorong partisipasi perempuan, anak, difabel dan lansia dalam pelaksanaan pembangunan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Penduduk

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Karanganyar merupakan gambaran perkiraan penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2045 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data proyeksi ini memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pembangunan daerah, kebutuhan prasarana dan sarana dasar, kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan dari Tahun 2020–2045. Berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun 2020 diketahui sebanyak 933.457 jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 1.052.254 jiwa pada tahun 2045 atau meningkat sebanyak 118.797 jiwa selama 20 tahun menunjukkan pertumbuhan penduduk kategori rendah. Sedangkan proyeksi penduduk dari tahun 2020–2045 berdasarkan kelompok umur, dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.18.

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045 (jiwa)

Kelompok Umur	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	70.361	64.290	62.955	62.119	61.521	61.043
5-9	67.578	70.838	64.735	63.398	62.562	61.964
10-14	69.642	68.209	71.512	65.346	63.999	63.161
15-19	69.676	69.926	68.500	71.825	65.628	64.281
20-24	67.813	69.548	69.804	68.389	71.724	65.525
25-29	68.026	67.512	69.246	69.507	68.104	71.427
30-34	68.111	68.058	67.537	69.281	69.541	68.146
35-39	73.032	68.440	68.386	67.873	69.628	69.894
40-44	71.321	73.264	68.661	68.621	68.110	69.885
45-49	65.984	71.086	73.048	68.480	68.463	67.967

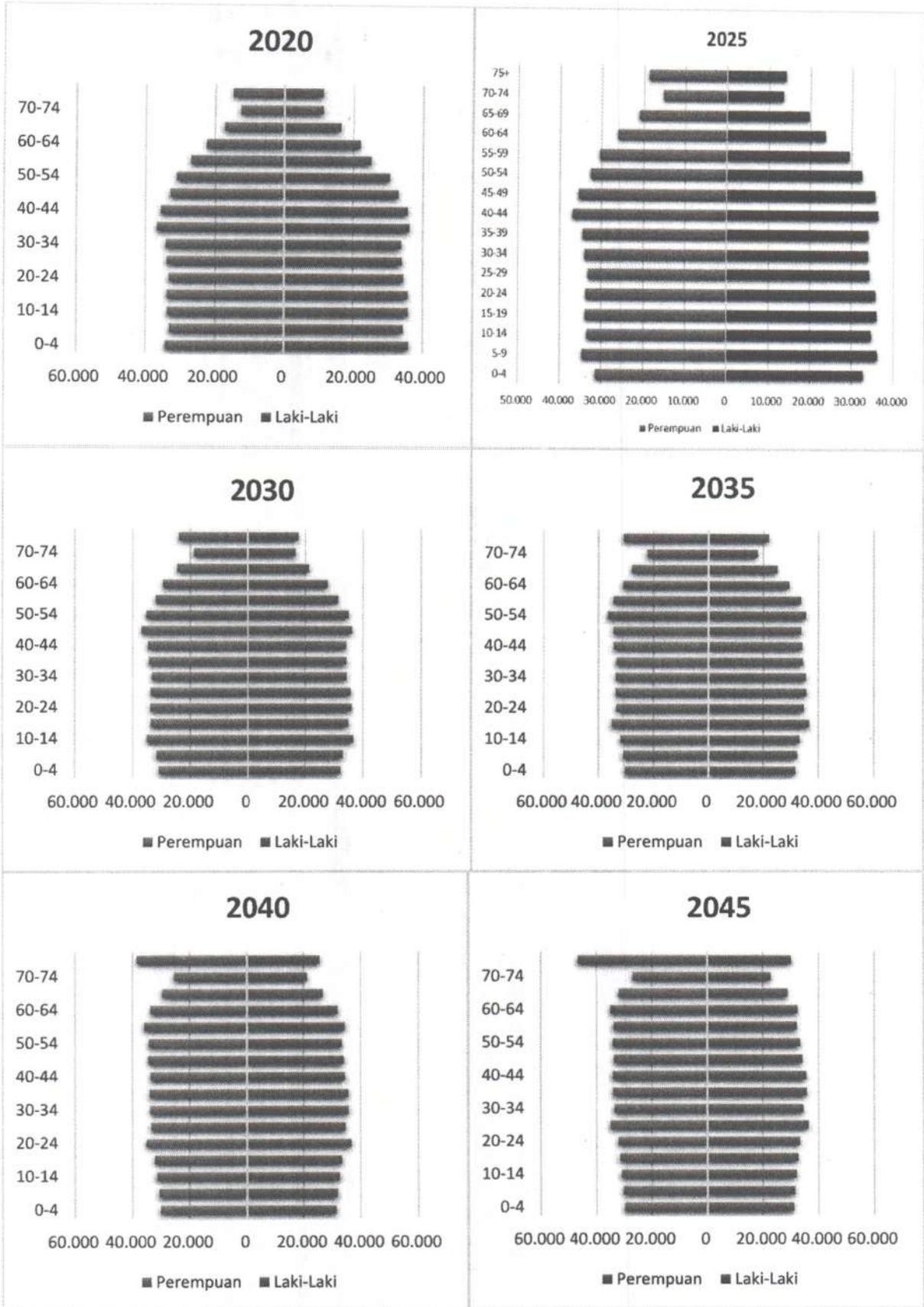
Kelompok Umur	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
50-54	61.682	65.041	70.125	72.112	67.643	67.654
55-59	52.223	59.938	63.293	68.342	70.358	66.057
60-64	44.456	49.743	57.214	60.544	65.509	67.541
65-69	33.539	40.801	45.897	52.980	56.251	61.023
70-74	23.914	28.896	35.424	40.211	46.659	49.766
75+	26.099	32.894	41.596	52.740	64.190	76.920
Jumlah	933.457	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Gambaran kependudukan tahun 2045 berdasarkan kelompok umur diketahui sebagai berikut :

- a) Kelompok umur belum produktif (usia 0-14 tahun) sebanyak 186.168 jiwa (17,69%).
- b) Kelompok tidak produktif (> 65 tahun) sebanyak 187.709 jiwa (19,28%).
- c) Kelompok umur produktif (15 - 64 tahun) sebanyak 678.379 jiwa (63,02%).

Dengan demikian maka diketahui angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk pada tahun 2045 relatif tinggi yaitu sebesar 460,58, yang artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebesar 460-461 orang tidak produktif. Perincian penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 2.63.
Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

2. Proyeksi Penduduk Laki-Laki Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Proyeksi penduduk laki-laki dengan pembahasan per kelompok umur adalah alat penting dalam memahami dinamika pertumbuhan dan perubahan populasi dalam kurun waktu berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2020–2045, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19.
Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	35.980	32.790	32.116	31.699	31.405	31.170
5-9	34.408	36.199	32.999	32.323	31.911	31.615
10-14	35.857	34.702	36.517	33.286	32.609	32.197
15-19	35.774	35.985	34.834	36.662	33.416	32.740
20-24	34.501	35.744	35.960	34.813	36.651	33.401
25-29	34.075	34.326	35.566	35.784	34.644	36.476
30-34	33.887	34.033	34.279	35.523	35.741	34.604
35-39	36.247	34.001	34.140	34.392	35.642	35.865
40-44	35.697	36.300	34.048	34.191	34.446	35.706
45-49	32.999	35.528	36.134	33.900	34.052	34.314
50-54	30.555	32.385	34.890	35.505	33.332	33.497
55-59	25.150	29.452	31.258	33.727	34.362	32.296
60-64	22.048	23.609	27.711	29.478	31.878	32.530
65-69	16.303	19.765	21.244	25.040	26.735	28.998
70-74	11.270	13.568	16.542	17.906	21.234	22.787
75+	11.207	14.087	17.563	21.906	25.594	30.298
Jumlah	465.958	482.474	495.801	506.135	513.652	518.494

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Jumlah penduduk laki-laki secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2045. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki adalah 465.958 jiwa dan kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai sebanyak 518.494 jiwa pada tahun 2045. Faktor-faktor seperti migrasi penduduk, dan meningkatnya usia harapan hidup (UHH) dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk laki-laki secara keseluruhan.

3. Proyeksi Penduduk Perempuan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Secara keseluruhan, total penduduk perempuan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 adalah 467.499 jiwa. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama periode proyeksi ini. Pada tahun 2045 total penduduk perempuan diperkirakan akan mencapai 533.760 jiwa. Perincian penduduk perempuan berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020–2045 dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045 (jiwa)

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	34.381	31.500	30.839	30.420	30.116	29.873
5-9	33.170	34.639	31.736	31.075	30.651	30.349
10-14	33.785	33.507	34.995	32.060	31.390	30.964
15-19	33.902	33.941	33.666	35.163	32.212	31.541
20-24	33.312	33.804	33.844	33.576	35.073	32.124
25-29	33.951	33.186	33.680	33.723	33.460	34.951
30-34	34.224	34.025	33.258	33.758	33.800	33.542
35-39	36.785	34.439	34.246	33.481	33.986	34.029
40-44	35.624	36.964	34.613	34.430	33.664	34.179
45-49	32.985	35.558	36.914	34.580	34.411	33.653
50-54	31.127	32.656	35.235	36.607	34.311	34.157
55-59	27.073	30.486	32.035	34.615	35.996	33.761
60-64	22.408	26.134	29.503	31.066	33.631	35.011
65-69	17.236	21.036	24.653	27.940	29.516	32.025
70-74	12.644	15.328	18.882	22.305	25.425	26.979
75+	14.892	18.807	24.033	30.834	38.596	46.622
Jumlah	467.499	486.010	502.132	515.633	526.238	533.760

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Faktor-faktor seperti migrasi penduduk, dan meningkatnya usia harapan hidup (UHH) yang lebih tinggi daripada laki-laki dan kesehatan semakin baik mempengaruhi jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki.

4. Fertilitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Diketuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia perkawinan, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Penting untuk memahami *Total Fertility Rate* (TFR) karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang muncul akibat perubahan dalam tingkat kelahiran. TFR adalah indikator penting dalam perencanaan populasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun perkiraan TFR Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Perkiraan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

No	Periode (Tahun)	Proyeksi TFR
1	Tahun 2020 - Total Fertility Rate (TFR) : 1,93	Pada tahun 2020, <i>Total Fertility Rate</i> Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 1,93. Ini berarti, rata-rata setiap wanita di wilayah ini diharapkan memiliki sekitar 1,93 anak selama hidupnya. Dalam konteks demografi, angka ini menunjukkan bahwa populasi Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan, mengingat angka TFR di bawah 2,0.
2	Tahun 2025 - Proyeksi Total Fertility Rate: 1,90	Proyeksi TFR untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan angka menjadi 1,90. Ini adalah indikasi pertama bahwa tingkat kelahiran perempuan di Kabupaten Karanganyar akan mengalami penurunan dalam lima tahun ke depan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mungkin mempengaruhi keputusan perempuan untuk memiliki anak.
3	Tahun 2030 - Proyeksi Total Fertility Rate: 1,87	Proyeksi TFR untuk tahun 2030 menunjukkan bahwa angka TFR akan turun lebih lanjut menjadi 1,87. Ini mengindikasikan bahwa tren penurunan kelahiran masih berlanjut. Penurunan ini bisa dijelaskan oleh semakin banyak wanita yang memilih mengejar pendidikan lebih tinggi, karier, serta perubahan dalam dinamika keluarga dan peran gender.
4	Tahun 2040 - Proyeksi Total Fertility Rate: 1,83	Proyeksi TFR untuk tahun 2040 menunjukkan penurunan lagi menjadi 1,83. Ini menegaskan tren penurunan dalam jumlah anak yang diharapkan oleh perempuan di Kabupaten Karanganyar. Penurunan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor seperti peningkatan akses terhadap kontrasepsi, perubahan norma sosial, serta perubahan dalam pola kehidupan masyarakat.
5	Tahun 2045 - Proyeksi Total Fertility Rate: 1,81	Proyeksi TFR untuk tahun 2045 menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar akan mengalami penurunan yang berkelanjutan dalam tingkat kelahiran, dengan angka TFR mencapai 1,81. Angka ini semakin mendekati ambang batas kestabilan populasi. Ini mengindikasikan bahwa populasi Kabupaten Karanganyar menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan perhitungan proyeksi yang telah dikemukakan di atas, maka diketahui perkembangan TFR di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020–2045 akan mengalami penurunan dalam tingkat kelahiran selama 20 tahun ke depan sebagaimana umumnya Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara dan wilayah mengalami penurunan TFR akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Penurunan TFR ini memiliki beberapa implikasi yang penting adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan penduduk yang Lebih Lambat: Penurunan TFR berarti pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar akan berlangsung dengan tingkat yang lebih lambat daripada sebelumnya. Ini dapat memiliki implikasi pada berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan fasilitas publik, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Penuaan Penduduk: Penurunan TFR juga dapat menyebabkan penuaan populasi. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit yang lahir, bagian penduduk yang lebih tua akan semakin besar, yang bisa mempengaruhi kebutuhan akan layanan kesehatan dan pensiun.
- 3) Perubahan Sosial dan Ekonomi: Penurunan TFR sering kali terkait dengan perubahan dalam pola sosial dan ekonomi. Wanita mungkin lebih banyak terlibat dalam angkatan kerja, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan keluarga mereka.
- 4) Kebijakan Keluarga dan Penduduk: Proyeksi TFR ini dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang program dan kebijakan yang mendukung perubahan demografis ini, seperti program pendidikan keluarga, program kontrasepsi, dan dukungan untuk perempuan yang ingin mengejar karier.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa proyeksi TFR dapat berubah seiring dengan perubahan dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap perkembangan demografis sangat penting untuk membantu Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan *Total Fertility Rate* untuk Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045 menunjukkan tren penurunan dalam tingkat kelahiran selama dua puluh lima tahun ke depan. Ini adalah hasil dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada keputusan perempuan tentang jumlah anak. Proyeksi ini memberikan pandangan penting tentang perkembangan penduduk Kabupaten Karanganyar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan perubahan demografis ini.

5. Mortalitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Infant Mortality Rate (IMR) adalah indikator yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per seribu kelahiran hidup dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. IMR merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan dan kondisi kesehatan suatu populasi.

Penting untuk dipahami bahwa IMR mencerminkan tingkat kematian bayi dalam suatu wilayah atau populasi, yang sering kali menjadi indikator penting dalam mengevaluasi perawatan medis,

sanitasi, gizi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan bayi. Semakin rendah IMR, semakin baik kualitas perawatan kesehatan dan lingkungan yang ada dalam suatu wilayah.

IMR adalah salah satu ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara atau wilayah dalam upaya meningkatkan kesehatan anak-anak. IMR mencerminkan keselamatan dan kesejahteraan bayi yang merupakan aset berharga bagi masa depan suatu masyarakat. Oleh karena itu, penurunan IMR menjadi tujuan utama dalam upaya perbaikan sistem perawatan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah.

Proyeksi IMR Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2020 hingga 2045 adalah sangat penting untuk perencanaan kebijakan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.22.

Proyeksi Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2020-2045

No	Periodisasi (tahun)	Proyeksi IMR
1	Tahun 2020 (11,71 IMR):	Tahun 2020, IMR Kabupaten Karanganyar sebesar 11,71 menunjukkan bahwa terdapat 11,71 kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan bayi yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan ibu, dan kondisi sosial ekonomi mungkin berkontribusi terhadap tingkat kematian bayi yang cukup tinggi ini.
2	Tahun 2025 (10,08 IMR):	Proyeksi IMR Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan menjadi 10,08. Ini adalah tanda positif, menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan perawatan kesehatan bayi dan meningkatkan kualitas hidup telah membuahkan hasil. Kebijakan kesehatan yang lebih baik, kampanye kesehatan masyarakat, dan perubahan sosial ekonomi mungkin berkontribusi pada penurunan ini.
3	Tahun 2030 (8,71 IMR):	Pada tahun 2030, IMR Kabupaten Karanganyar diharapkan turun menjadi 8,71. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki layanan kesehatan, meningkatkan gizi bayi, dan mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian bayi. Meskipun penurunan ini relatif kecil, setiap penurunan angka IMR adalah langkah positif untuk kesejahteraan masyarakat.
4	Tahun 2035 (7,38 IMR):	Proyeksi IMR untuk tahun 2035 adalah sebesar 7,38. Ini adalah indikasi bahwa upaya-upaya untuk mengurangi kematian bayi terus berlanjut dan semakin berhasil. Faktor-faktor seperti perluasan cakupan vaksinasi, perbaikan fasilitas kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perawatan bayi mungkin berkontribusi pada penurunan IMR yang stabil.
5	Tahun 2040 (6,68 IMR):	Tahun 2040 menunjukkan proyeksi IMR sebesar 6,68. Angka ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan

No	Periodisasi (tahun)	Proyeksi IMR
		dalam sistem perawatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Peran penting pendidikan kesehatan dan dukungan pemerintah dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan.
7	Tahun 2045 (1,84 IMR):	Proyeksi IMR untuk tahun 2045 adalah 6,28, menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah berhasil mencapai angka IMR yang sangat rendah. Ini adalah prestasi besar, yang mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesehatan bayi. Kehadiran fasilitas perawatan kesehatan yang berkualitas, pendidikan ibu yang baik, dan perubahan sosial ekonomi yang positif mungkin merupakan faktor kunci dalam mencapai tingkat kematian bayi yang rendah ini.

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa proyeksi IMR adalah perkiraan yang didasarkan pada data dan asumsi saat ini. Beberapa faktor, seperti perubahan ekonomi, perkembangan teknologi medis, dan peristiwa luar biasa seperti pandemi, dapat mempengaruhi perkembangan sebenarnya. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyeksi ini tetap relevan dan tercapai.

Untuk menjaga tren penurunan IMR yang positif, beberapa langkah penting yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1) Perluasan Layanan Kesehatan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dapat membantu mengurangi angka kematian bayi. Pembangunan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan pelatihan tenaga medis yang kompeten adalah langkah kunci.
- 2) Pendidikan Kesehatan Ibu dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu calon atau baru melahirkan sangat penting. Ini meliputi informasi tentang perawatan bayi, gizi, serta tanda-tanda bahaya yang perlu segera diatasi.
- 3) Program Vaksinasi: Memastikan bahwa semua bayi mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sesuai dengan jadwal adalah langkah penting untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan kematian bayi.
- 4) Nutrisi dan Gizi: Memastikan bahwa bayi menerima gizi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk perkembangan yang sehat. Program-program gizi yang terfokus dapat membantu mencegah kematian bayi akibat kekurangan gizi.
- 5) Kesadaran Masyarakat: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan bayi dan pencegahan penyakit adalah bagian penting dari upaya mengurangi IMR.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap data kesehatan, seperti angka kematian

bayi, adalah penting untuk menilai efektivitas program-program kesehatan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Dengan kebijakan dan pembangunan kesehatan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang lebih mengutamakan kesehatan promotif daripada kuratif diharapkan Kabupaten Karanganyar dapat mencapai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan meningkatnya kesehatan bayi akan berdampak positif pada perkembangan jangka panjang kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.23.
Proyeksi TFR dan IMR Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

Indikator	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Total Fertility Rate (TFR)	1,93	1,90	1,87	1,85	1,83	1,81
Infant Mortality Rate (IMR)	11,71	10,08	8,71	7,38	6,68	6,28

Catatan: Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk.

6. Bonus Demografi

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0–14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan pengelompokan penduduk usia produktif Kabupaten Karanganyar telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% dari tahun 2020–2045 yang akan datang.

Tabel 2.24.
Proporsi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

Uraian	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	581.534	587.223	598.759	623.934	623.874	620.829
Jumlah Penduduk (jiwa)	933.457	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	59,2	60,10	61,45	62,31	62,04	63,01

Sumber : Proyeksi BPS, 2023.

Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Karanganyar dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut :

- 1) Masalah pengangguran : bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda kurang berpendidikan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan

penyakit sosial dan kriminalitas. Salah satu katup pengaman adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal dan perdagangan skala kecil atau pedagang kaki lima/PKL.

- 2) Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik : pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi.
- 3) Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 4) Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
- 5) Tantangan kesehatan : pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dividen demografi : jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja.
- 2) Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil.
- 3) Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
- 4) Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
- 6) Besarnya kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda.

7. Meningkatnya Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan meningkatnya rata-rata kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan jumlah penduduk usia lanjut (Lansia). Meningkatnya jumlah penduduk lansia telah menjadi perhatian dari PBB sejak dasawarsa 2010 dan menjadi perhatian dalam arah kebijakan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDG`s), terkait dengan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan hidup layak.

Berdasarkan data BPS (2022) di Kabupaten Karanganyar dari jumlah penduduk sebanyak 948,11 ribu terdapat sebesar 14,49% kelompok lansia dan akan meningkat di tahun-tahun mendatang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk sebagian besar pada kelompok usia 60 – 64 tahun (46,58%) adalah kelompok lansia.

Penduduk lansia di Kabupaten Karanganyar berdasarkan proyeksi tahun 2020 – 2045 dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.25.
Proporsi Penduduk Lansia Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

Uraian	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia lanjut (jiwa)	128.008	152.334	180.131	206.475	232.609	255.250
Jumlah Penduduk (jiwa)	933.457	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Proporsi Penduduk Lansia (%)	13,71	15,71	18,05	20,20	21,43	24,25

Sumber : Proyeksi BPS (diolah), 2023.

Meningkatnya jumlah lansia memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Karanganyar dengan baik. Tantangan dalam penanganan lansia agar tetap sehat, produktif menghadapi tantangan :

- 1) Masalah pengangguran : kelompok lanjut usia menghadapi masalah menganggur dan kurangnya keterampilan.
- 2) Banyak lansia yang belum memiliki bantuan sosial dan dana pensiun mandiri (DPLK).
- 3) Lansia mengalami sakit, dan masih kurang memadai dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, PHBS dan jaminan sosial belum merata.

Sedangkan peluang dan potensi dalam penanganan lansia dalam mewujudkan lansia sehat dan produktif, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagian besar lansia di Kabupaten Karanganyar pada umumnya tetap hidup bersama keluarga inti (*nuclear family*) dan juga keluarga besar (*ektended family*) dan hubungan persaudaraan dan saling mendukung.
- 2) Potensi lansia dapat dioptimalkan dalam kegiatan usaha produktif, sosial keagamaan dan pelatihan keterampilan dari tingkat desa/kelurahan. Potensi lanjut usia baik pendidikan dan pengalaman kerjanya dapat menjadi penggerak dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- 3) Terdapat lansia yang tetap produktif melakukan pekerjaan dan usaha, baik dalam usaha pertanian, peternakan dan usaha mikro dan kecil serta perdagangan informal.

2.6.2. Proyeksi Berdasarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Proyeksi Jalan dan Konektivitas Antar Wilayah

Jaringan jalan dan konektivitas di Kabupaten Karanganyar telah semakin baik hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah pada peningkatan jalan dan jaringan antar desa yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan perekonomian daerah. Jaringan jalan dan konektivitas akan memudahkan mobilisasi orang distribusi logistik di Kabupaten Karanganyar. Jaringan angkutan umum dan antar perdesaan masih cukup baik, antara lain dari Kota Surakarta, Karanganyar dan Tawangmangu serta daerah sekitarnya.

Demikian pula angkutan umum antar provinsi melalui jaringan jalan tol Trans Jawa menuju Kota Jakarta di bagian Barat dan Kota Surabaya di bagian Timur. Jaringan jalan nasional Selatan – Selatan yang menghubungkan kawasan Jawa Tengah – Jawa Timur bagian Selatan semakin baik mendukung konektivitas dan perkembangan perekonomian daerah, pelayanan umum dan perjalanan bagi wisatawan nusantara dan wisatawan asing. Pembangunan Jalan Tol dari Jawa Tengah ke DIY dalam proses penyelesaian akan semakin memudahkan mobilitas orang dan distribusi logistik dari hasil pertanian, peternakan dan industri dari Kabupaten Karanganyar. Konektivitas wilayah Kabupaten Karanganyar ke kota-kota besar di Pulau Jawa semakin baik dengan adanya jalur kereta api (rel ganda) yang memudahkan mobilitas penduduk dan distribusi logistik dari Kabupaten Karanganyar. Demikian pula dengan adanya Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali sangat mendukung perkembangan perekonomian daerah sekitarnya termasuk kawasan penyangga di wilayah Subosukowonosraten.

Tabel 2.26.

**Proyeksi Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Pajang Jalan Kondisi Mantap	83,27	83,40	85,50	88,00	90,00	92,00

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

2. Proyeksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan adalah untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat. pelayanan kesehatan menjadi pelayanan dasar yang sangat strategis bagi peningkatan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Peran Puskesmas, poliklinik, apotek dan rumah sakit menjadi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan

dan pengendalian pertumbuhan penduduk di masa mendatang menuju pertumbuhan penduduk secara seimbang.

Kebutuhan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Karanganyar perlu ditingkatkan sesuai dengan standar dari WHO. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan mendasarkan pada standar tersebut dapat dihitung kebutuhan tempat tidur Rumah Sakit, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27.
Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan
Berdasarkan Standar WHO

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Rasio penduduk dengan tempat tidur RS berdasarkan WHO	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Total perlunya tempat tidur RS	955	968	997	1.021	1.039	1.052

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah tempat tidur di rumah sakit di Kabupaten Karanganyar selalu harus ditingkatkan dari sebanyak 968 tempat tidur pada tahun 2025 akan meningkat menjadi sebanyak 1.052 pada tahun 2045.

Selain rumah sakit, sarana kesehatan lainnya adalah sarana kesehatan pelayanan dasar. Sarana kesehatan pelayanan dasar merupakan fasilitas dan infrastruktur yang menyediakan layanan kesehatan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa contoh sarana kesehatan pelayanan dasar yaitu puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, klinik bersalin, tempat praktik dokter, dan apotek. Sarana-sarana kesehatan pelayanan dasar ini berperan penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang esensial dan mendukung upaya pencegahan serta penanganan penyakit di tingkat dasar.

Berdasarkan perhitungan proyeksi sarana kesehatan pelayanan dasar, pada tahun 2025 dengan proyeksi penduduk sebesar 968.484 jiwa dibutuhkan 775 posyandu, 32 klinik bersalin, 32 puskesmas pembantu, 8 puskesmas, 194 tempat praktik dokter, dan 32 apotek. Sedangkan pada tahun 2045 dengan proyeksi penduduk sebanyak 1.052.254 jiwa terdapat 842 posyandu, 35 klinik bersalin, 35 puskesmas pembantu, 9 puskesmas, 210 tempat praktik dokter, dan 35 apotek. Selengkapnya terkait proyeksi sarana kesehatan pelayanan dasar, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan Pelayanan Dasar
Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2020 - 2045

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
RS						
Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur RS	955	968	998	1.022	1.040	1.052
Posyandu						
Standar	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Jumlah Kebutuhan Posyandu	764	775	798	817	832	842
Klinik bersalin						
Standar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Klinik bersalin	32	32	33	34	35	35
Puskesmas Pembantu						
Standar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu	32	32	33	34	35	35
Puskesmas						
Standar	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas	8	8	8	9	9	9
Tempat Praktik Dokter						
Standar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jumlah Kebutuhan Praktik Dokter	191	194	200	204	208	210
Apotik						
Standar	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Apotik	32	32	33	34	35	35

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

3. Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani penduduk di satuan wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota. Pentingnya meningkatkan sumber daya manusia di masa depan memerlukan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidikan formal dan non formal. Di Kabupaten Karanganyar banyak terdapat sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah daerah, swasta dan pondok pesantren yang semua memberikan sumbangan dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di masa mendatang.

Sarana pendidikan yang dikemukakan dalam standar ini adalah pendidikan formal yaitu meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD atau taman kanak-kanak), pendidikan tingkat dasar (SD) yang menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun. Sekolah menengah pertama (SLTP) yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun dan sekolah menengah atas terdiri atas SMA dan SMK yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Diharapkan pada tahun 2045 nanti seluruh penduduk telah mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah sebagai hasil dari Wajib Belajar 12 Tahun sejak tahun 2019.

Sarana pembelajaran lain dapat berupa sarana pendidikan non formal, perpustakaan dan sanggar belajar. Dalam perkembangan Iptek maka sarana belajar dalam menggunakan jaringan internet secara daring. Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran masing-masing sekolah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perubahan di Perkotaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.29.
Standart Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan
Minimum Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	TK	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /jiwa	500 m ²	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m ²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SMP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m ²		
4.	SMA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m ²		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m ²	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2024

Sedangkan sarana dan prasarana masing-masing sekolah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.30.

Standart Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan SD, SMP dan SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan standart tersebut, proyeksi sarana pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Karanganyar yaitu, pada tahun 2025 terdapat 1.607 rombel TK sedangkan pada tahun 2045 sebanyak 1.526 rombel. Proyeksi SD/MI pada tahun 2025 sebanyak 2.530 rombel, sedangkan di tahun 2045 sebanyak 2.213 rombel. Proyeksi SMP/MTs pada tahun 2025 sebanyak 2.132 rombel, sedangkan di tahun 2045 sebanyak 1.974 rombel. Proyeksi SMA/MA/SMK di tahun 2024 sebanyak 1.942, sedangkan di tahun 2045 sebanyak 1.786 rombel. Selengkapnya terkait proyeksi sarana pendidikan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31.
Proyeksi TK, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Di Kabupaten Karanganyar

Uraian	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					
		Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Penduduk	Jiwa	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Proyeksi Penduduk usia 5-6 Tahun	Jiwa	67.750	64.290	62.955	62.119	61.521	61.043
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	Jiwa	68.747	70.838	64.735	63.398	62.562	61.964
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	Jiwa	68.571	68.209	71.512	65.346	63.999	63.161
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	Jiwa	70.141	69.926	68.500	71.825	65.628	64.281
Proyeksi Fasilitas Pendidikan							
TK	Rombel	1.759	1.607	1.574	1.553	1.538	1.526
SD/MI		1.689	2.530	2.312	2.264	2.234	2.213
SMP/MTs		1.741	2.132	2.235	2.042	2.000	1.974
SMA/MA/SMK		1.742	1.942	1.903	1.995	1.823	1.786

Sumber : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

4. Proyeksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan maka telah ditentukan luas minimum rata-rata kebutuhan luas bangunan untuk kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan dengan perhitungan luas lantai bagi orang dewasa rata-rata sebesar 9,6 m² dan anak-anak seluas 4,8 m².

Berdasarkan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa per rumah tangga maka diketahui luas kavling yang diperlukan untuk perumahan seluas 86,4 m². Maka dapat dikemukakan luas lahan untuk pemukiman di Kabupaten Karanganyar antara tahun 2025-2045, dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.32.

Proyeksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Proyeksi Jumlah Keluarga	315.263	322.828	332.644	340.589	346.630	350.751
Standar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Proyeksi Kebutuhan Rumah	272.377	322.828	332.644	340.589	346.630	350.751
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga (m ²)	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga	27.238.723	27.892.339	28.740.470	29.426.918	29.948.832	30.304.915

Sumber : Proyeksi Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan perhitungan kebutuhan kapling untuk perumahan dan pemukiman diketahui meningkat dari tahun 2025 sebesar 27.892.339 m² akan meningkat menjadi sebesar 30.304.915 m². Perhitungan proyeksi tersebut belum secara operasional dapat diterapkan karena belum ada data jumlah perumahan dan pemukiman berdasarkan kapling yang telah terbangun di Kabupaten Karanganyar.

Demikian pula perlunya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan terkait dengan pertumbuhan perumahan dan pemukiman dapat diarahkan pada pembangunan secara bertingkat sesuai dengan kontur lahan dan tanah dengan memperhitungkan potensi bencana sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Karanganyar.

5. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Penggunaan rata-rata air bersih untuk rumah tangga perkotaan di Indonesia setiap orang sebesar 120 liter/ per orang/ per hari. Penggunaan air bersih terbesar adalah untuk mandi dan

kebutuhan lain (misalnya : untuk air minum, memasak dan mencuci) lebih sedikit. Berdasarkan panduan tersebut maka dapat dikemukakan proyeksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.33.

**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Rata-rata kebutuhan air bersih (liter per kapita/hari)	120	120	120	120	120	120
Total kebutuhan air bersih seluruh penduduk (liter/hari)	114.613.920	116.218.080	119.751.960	122.612.160	124.786.800	126.270.480

Sumber : Proyeksi BPS, 2024

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih maka diketahui pada tahun 2025 sebesar 116.218,08 meter³ dan akan meningkat menjadi sebesar 126.270,48 meter³ pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan upaya menghemat penggunaan air bersih, mengolah air atau daur ulang air, memanen air hujan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat pada umumnya agar pemenuhan kebutuhan air bersih dapat menjangkau seluruh warga masyarakat.

6. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian LH dan Kehutanan diketahui volume sampah yang dihasilkan per orang per kapita di Indonesia sebesar 0,68 kg/ orang/ hari. Berdasarkan jumlah produksi sampah per orang per hari tersebut maka dapat dihitung banyaknya sampah yang dihasilkan penduduk setiap hari sebagai berikut :

Tabel 2.34.

**Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Produksi sampah Kg/ per orang/ hari	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Produksi sampah seluruh penduduk per hari (kg/ hari)	649.479	765.859	782.401	802.772	812.882	818.115

Sumber : Proyeksi BPS, 2024

Jumlah sampah rumah tangga diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi penduduk. Dengan jumlah sampah sebesar 765.859 kg/ per hari pada tahun 2025 dan meningkat menjadi sebesar 818.115 kg/ per hari pada tahun 2045 memerlukan fasilitasi dengan metode 3R dan mengelola sampah dari rumah tangga dan sumbernya.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah antara lain adanya tong sampah di setiap rumah tangga, gerobak sampah dengan dimensi 2 M3, dan bak sampah kecil dengan dimensi 6 M3 di tingkat RW dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa dan TPS untuk tingkat desa dan mobil/ truk sampah dengan dimensi besar serta TPA dengan sarana pengelolaan sampah di tingkat kabupaten bagi sebanyak 480.000 jiwa penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka menjadi dasar dalam pengelolaan sampah adalah proses pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah dengan metode 3R (*reuse*, *reduse* dan *recycle*) dan Bank Sampah. Pengelolaan sampah melalui TPS dan TPA sampah. Pada tahun 2030 berdasarkan UU Noor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak diperbolehkan ada tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) maka dalam pengelolaan sampah harus dipilah dan daur ulang sesuai dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

7. **Proyeksi Kebutuhan Listrik**

Kebutuhan listrik baik bagi rumah tangga dan kegiatan usaha serta pelayanan umum semakin penting di masa mendatang dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas SDM Kabupaten Karanganyar. Kebutuhan listrik ditentukan oleh konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita diketahui dari jumlah konsumsi listrik yang digunakan di suatu daerah dibagi jumlah penduduk dalam waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik di Kabupaten Karanganyar diketahui tahun 2022 sebesar 279.723.000 kwh dengan pertumbuhan sebesar 1,90% dari tahun 2021. Maka jumlah konsumsi listrik dibagi jumlah penduduk maka diketahui rata-rata sebesar 264,21 kwh per kapita per tahun.

Tabel 2.35.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	955.116	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254
Kebutuhan listrik per orang (kwh/ per kapita)	279,56	307,14	337,75	370,75	402,45	410,23
Kebutuhan listrik RT (kwh/ per kapita)	298.459.933	341.850.506	388.266.596	437.687.800	437.678.800	490.075.325

Sumber : *Proyeksi Tim Penyusun, 2024.*

Berdasarkan proyeksi tersebut, diketahui proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2025 sebesar 341.850.506 kwh dan meningkat menjadi sebesar 298.459.933 kwh pada tahun 2045. Rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik per kapita sebesar 307,14 kwh per kapita pada tahun 2025 dan meningkat menjadi sebesar 410,23 kwh/ per kapita per tahun. Peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan perkembangan ekonomi penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan kebutuhan listrik semakin meningkat. Penggunaan listrik rumah tangga terutama dengan menggunakan listrik untuk penerangan, peralatan listrik (lemari es, kulkas, pendingin ruangan dan komputer/ laptop) dan peralatan lain yang memudahkan pekerjaan rumah tangga dan usaha ekonomi produktif dalam rumah yang semakin meningkat.

Dalam perkembangannya semakin banyak terdapat peralatan listrik dan elektronika yang hemat energi (seperti lampu LED, TV LED, peralatan rumah tangga lainnya) yang memanfaatkan listrik dan meningkatkan produktivitas rumah tangga. Demikian pula semakin meluasnya pemanfaatan energi terbarukan dengan penggunaan pembangkit listrik dari tenaga surya, tenaga angin, *power supply* listrik bagi RT dan potensi pembangkit listrik lainnya yang belum termanfaatkan secara optimal.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah adalah suatu rencana strategis yang merumuskan bagaimana suatu wilayah perkotaan akan dibangun, dikembangkan, dan diatur secara keseluruhan. Rencana ini mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan lahan, transportasi, infrastruktur, lingkungan, perumahan, serta fasilitas umum lainnya di wilayah tersebut.

Tujuan dari Rencana Sistem Perkotaan Wilayah adalah menciptakan suatu kerangka kerja yang terorganisir untuk pengembangan kota yang berkelanjutan. Ini melibatkan penataan ruang yang baik, keberlanjutan lingkungan, aksesibilitas, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Pengembangan Pusat Pertumbuhan merupakan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Tujuannya adalah memusatkan investasi, sumber daya, dan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan potensi ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.

Pusat pertumbuhan ini ditetapkan berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi strategis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, atau potensi pasar yang besar. Upaya untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ini dapat melibatkan pembangunan jalan, pusat industri, pusat perdagangan, pendidikan, serta layanan kesehatan, yang diharapkan dapat menarik investasi,

menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut. Adapun pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Karanganyar meliputi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Kegiatan Lokal.

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Karanganyar ditetapkan di wilayah :

- a) Kawasan Perkotaan Karanganyar; dan
- b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Colomadu;

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun PPK di Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar meliputi :

- a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kebakkramat;
- b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kerjo;
- c) Kawasan Perkotaan Kecamatan Jumapolo;
- d) Kawasan Perkotaan Kecamatan Gondangrejo;
- e) Kawasan Perkotaan Kecamatan Tawangmangu;
- f) Kawasan Perkotaan Kecamatan Karangpandan;
- g) Kawasan Perkotaan Kecamatan Matesih; dan
- h) Kawasan Perkotaan Kecamatan Ngargoyoso.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Karanganyar di tetapkan di wilayah :

- a) PPL di Kecamatan Mojogedang;
- b) PPL di Kecamatan Kebakkramat;
- c) PPL di Kecamatan Matesih;
- d) PPL di Kecamatan Jenawi;
- e) PPL di Kecamatan Ngargoyoso;
- f) PPL di Kecamatan Jatipuro
- g) PPL di Kecamatan Jatiyoso;
- h) PPL di Kecamatan Jumantono;
- i) PPL di Kecamatan Jumapolo; dan
- j) PPL di Kecamatan Gondangrejo.

4) Indikasi program/ proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah/daerah Kabupaten Karanganyar.

A) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

1) Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan

- a) Percepatan pertumbuhan kecamatan-kecamatan yang berstatus hierarki IV terutama dalam hal peningkatan fasilitas. (Tasikmadu, Kerjo,

- Tawangmangu, Matesih, Jumapolo, Ngargoyoso, Jumantono, Jatipuro, Jenawi, Jatiyoso);
- b) Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa. (Gondangrejo, Jaten, Kebakkramat, dan Jumantono);
 - c) Mendorong perkembangan kecamatan-kecamatan sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah. (Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten);
 - d) Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata. (Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan, Matesih).

2) Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah

a) Transportasi

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer. (Ruas jalan batas kota Surakarta-Palur; Ruas jalan Palur-batas Kab Sragen; Ruas jalan Adi Sucipto - bandara Adi Soemarmo);
- (2) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan arteri. (Ruas jalan batas kota Surakarta-Palur; Ruas jalan Palur-batas Kab Sragen; Ruas jalan Adi Sucipto bandara Adi Soemarmo);
- (3) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan konektor primer dua (JKP-2). (ruas jalan Sragen-Batujamus (Batas Kabupaten Karanganyar ruas jalan Karanganyar-Batujamus (Batas Kabupaten Sragen) ruas jalan Palur — Karanganyar, ruas jalan Karanganyar - Cemorosewu, ruas jalan Ngadirejo, Jatipuro ruas jalan Karanganyar - Jatipuro, ruas jalan Lingkar Selatan Karanganyar, ruas jalan Derpoyono, ruas jalan Sugyopranoto, ruas jalan Bejen, ruas jalan Slamet Riyadi);
- (4) Pengembangan jaringan jalan tol lokal (ruas Jalan tol Solo-Ngawi; ruas Jalan tol Solo-Jogja);
- (5) Pengembangan terminal melalui:
 - (a) Pembangunan dan Pemantapan terminal penumpang tipe B (Terminal Tegalgede, Terminal Tawangmangu);
 - (b) Pembangunan dan Pemantapan terminal penumpang tipe C (Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Mojogedang, Terminal Jenawi, Terminal Kemuning,

- Terminal Palur, Terminal Jatiyoso, Terminal Jumantono, Terminal Matesih);
- (c) Peningkatan terminal tipe C (Terminal Karangpandan, Terminal Gondangrejo);
 - (d) Pembangunan terminal barang (Kecamatan Jaten).
- (6) Pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun (melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat);
 - (7) Pembangunan prasarana penunjang jalan rel fly over Palur (Palur, Kecamatan Jaten);
 - (8) Pembangunan rel jalur Stasiun Balapan Solo - Bandara Internasional Adi Sumarmo (Kecamatan Gondangrejo);
 - (9) Peningkatan fungsi stasiun (Stasiun Palur Kecamatan Jaten, Stasiun Kaliyoso Kecamatan Gondangrejo).

b) Energi

- (1) Pengembangan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (Waduk-waduk di Kab Karanganyar);
- (2) Pengembangan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Angin (Kecamatan Tawangmangu);
- (3) Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- (4) Pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- (5) Penambahan dan perbaikan sistem jaringan transmisi SUTET dan SUTT (Semua kecamatan di daerah yang belum terlayani);
- (6) Peningkatan kapasitas gardu induk (Kecamatan Jaten, Kecamatan Gondangrejo).

c) Telekomunikasi

- (1) Pengembangan jaringan telepon kabel (terrestrial) (Semua Kecamatan);
- (2) Pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada;
- (3) Peningkatan jumlah sambungan telepon domestik dan nirkabel sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Pembangunan layanan internet gratis (*free hotspot*) (Seluruh ibu kota kecamatan).

d) Sumber Daya Air

- (1) Waduk dan Embung :
 - (a) Pembangunan Waduk Gondang (Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso);
 - (b) Pembangunan Waduk Jlantah (Kecamatan Jatiyoso);

- (c) Pembangunan Waduk Gemantar (Desa Gemantar, Kecamatan Jumantono);
 - (d) Pembangunan Embung Dimoro (Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan);
 - (e) Pembangunan 20 Embung lainnya (Kecamatan Matesih, Gondangrejo, Tasikmadu, Mojogedang, Karanganyar, Jatiyoso, Jatipuro, Karangpandan, Jumapolo, Kebakkramat, Tawangmangu, Kerjo, dan Jumantono).
- (2) Air Baku untuk Air Bersih :
- (a) Pembangunan tampungan air baku/kolam air;
 - (b) Pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan;
 - (c) Pembangunan jaringan perpipaan mandiri dari sumber air tanah dan air permukaan (Pedesaan se-Kab Karanganyar);
 - (d) Penurunan tingkat kebocoran melalui kegiatan rehabilitasi instalasi pengolahan, jaringan pipa distribusi meter-meter air (Kab, Karanganyar);
 - (e) Pengembangan SPAM regional Wososukas (Kecamatan Jaten, Kecamatan Gondangrejo, dan Kecamatan Kebakkramat);
 - (f) Pengelolaan sumber air bersih (Seluruh Kecamatan);
 - (g) Pengembangan Jasa Lingkungan (Seluruh Kecamatan).
- (3) Jaringan Irigasi
- (a) Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada (Kabupaten Karanganyar);
 - (b) Pembangunan irigasi dari air bawah tanah (ABT) (Kecamatan Gondangrejo Mojogedang, Kebakkramat, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro);
 - (c) Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk menyuplai kebutuhan irigasi bagi kegiatan pertanian (Kab. Karanganyar).
- (4) Pengendali Banjir
- (a) Pembangunan tanggul dan pintu air (Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jatiyoso);
 - (b) Pembuatan lubang-lubang biopori (Kabupaten Karanganyar)

- (c) Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap permukiman mandiri (Kabupaten Karanganyar).

e) Prasarana Lainnya

- (1) Sistem Persampahan
 - (a) Pemantapan fungsi TPA Sukosari (Jumantono);
 - (b) Perluasan TPA Sukosari (Jumantono)
 - (c) Pembangunan TPA regional (Kec. Gondangrejo);
 - (d) Pembangunan Tempat Pengolahan Sementara (TPS) (lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Karanganyar);
 - (e) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan sampah (Kabupaten Karanganyar);
 - (f) Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah (Kabupaten Karanganyar).
- (2) Sistem pengelolaan Air dan Limbah
 - (a) Peningkatan IPLT di Kaliboto (Kecamatan Mojogedang);
 - (b) Pembangunan IPLT di Brujul (Kecamatan Jaten);
 - (c) Pengembangan IPAL bersama (sekitar wilayah industri).
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum
 - (a) Peningkatan kapasitas produksi IPA (Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu);
 - (b) Peningkatan jangkauan distribusi jaringan perpipaan (seluruh kecamatan);
 - (c) Pengembangan IPA (seluruh kecamatan).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan uraian pada Bab II tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil identifikasi berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing aspek pembangunan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Karanganyar semakin menurun.
2. Meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi, akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK).
3. Peningkatan luasan lahan kritis.
4. Perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan.
5. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang serta implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang juga belum optimal.
6. Bonus demografi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas.
7. Meningkatnya usia harapan hidup menyebabkan meningkatnya jumlah lansia. Potensi ini harus disikapi dengan memperkuat kualitas usia produktif dan lanjut usia

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Masih belum optimalnya penanganan kemiskinan yang disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan dan pengelolaan data kemiskinan.
2. Masih tingginya angka pengangguran karena belum optimalnya pelayanan pencari kerja secara terpadu, belum optimalnya pelatihan dan perintisan kewirausahaan bagi pencari kerja, belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi pencari kerja belum optimal.

3. Pengolahan, pemanfaatan keanekaragaman bahan pangan dan pengelolaan bahan pangan secara efisien dengan teknologi tepat guna yang belum optimal, serta belum terwujudnya kemandirian pangan.
4. Produksi perikanan budidaya yang belum optimal, rendahnya pemahaman tentang nilai gizi ikan, serta potensi sumber daya alam belum terkelola dengan baik.
5. Menurunnya minat pemuda dalam bidang pertanian. Belum optimalnya peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan utama padi, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Agroindustri dan pengolahan pertanian masih belum semuanya ke arah modernisasi. Ketergantungan pupuk yang tinggi sementara pupuk kimia mahal dan langka. Lahan pertanian harus dapat dipertahankan, pembangunan yang mengarah industrialisasi dan penambahan penduduk dikawatirkan akan mempengaruhi luas lahan pertanian.
6. Pembangunan dan pengembangan pariwisata masih belum optimal. Belum semua obyek wisata, akomodasi dan restaurant sesuai dengan standar CHSE, dukungan infrastruktur yang masih diperlukan dalam upaya meningkatkan akses, kemudahan dan kenyamanan wisatawan.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), ditemukannya gizi buruk dan gizi kurang, obesitas dan stunting, ditemukannya penyakit menular seperti TBC, DBD dan HIV AIDS. Belum semua penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga cakupan *universal health coverage* (UHC) belum mencapai 100%. Kematian ibu disebabkan oleh kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kualitas tenaga kesehatan yang belum semua memiliki kompetensi persalinan, serta belum optimalnya kualitas pencegahan kematian ibu. Tingginya TBC disebabkan oleh belum optimalnya penemuan dan pengobatan TBC.
2. Masih terjadinya ketimpangan gender hal ini dapat dilihat dari indeks ketimpangan gender, terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak merupakan kondisi dimana ketimpangan masih terjadi, belum optimalnya penerapan kesetaraan gender terutama bidang politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum optimalnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas pembangunan keluarga yang masih dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah.

4. Belum optimalnya pelayanan publik dalam administrasi kependudukan catatan sipil. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan budaya tak benda, belum optimalnya pengelolaan seni dan museum sejarah Kabupaten Karanganyar.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Belum optimalnya UMKM dan Koperasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kewirausahaan di masyarakat. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM. Belum optimalnya akses pemasaran bagi koperasi dan UMKM.
2. Belum optimalnya penanaman modal di Kabupaten Karanganyar. Belum sinerginya stakeholder mewujudkan Kabupaten Karanganyar Ramah Investor.
3. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Belum optimalnya perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Potensi ekspor belum optimal.
4. Belum optimalnya pengelolaan industri yang ramah lingkungan, industri yang dapat memproduksi barang yang kompetitif dipasar regional, nasional maupun global, serta terbangunnya industri kreatif, berbahan baku lokal yang mampu bersaing dengan produk daerah lain dan dapat diterima pasar.
5. Belum optimalnya kualitas desa dalam mendorong pembangunan wilayah hal ini dapat dilihat masih rendahnya desa dengan kategori desa mandiri. Penilaian pembangunan desa kedepan dengan menggunakan indeks desa. Belum optimalnya desa mandiri disebabkan oleh belum optimalnya peran desa dalam mendorong peningkatan ekonomi desa dengan pemanfaatan potensi desa dan pengelolaan BUMDes. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

2. Daya Saing SDM

1. Permasalahan bidang pendidikan mencakup aksesibilitas, pemerataan, peningkatan mutu pelayanan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan, disamping peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta kecukupan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

2. Belum optimalnya perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.
3. Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai. Masih rendahnya OPD yang mengelola arsip secara baku.

3. Daya Saing Infrastruktur

1. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses untuk memperoleh air bersih yang aman, hal ini karena terbatasnya jaringan air bersih yang disediakan PDAM serta Pamsimas. Belum seluruh masyarakat memperoleh akses sanitasi aman, hal ini karena terbatasnya kapasitas IPLT yang ada. Masih ditemukannya infrastruktur jalan yang rusak. Masih adanya lahan sawah yang belum terairi irigasi. Belum optimalnya penataan ruang hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Karanganyar.
2. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, hal ini disebabkan tumbuhnya pemukiman padat dan belum optimalnya pengendalian dan penegakkan perijinan bangunan. Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai dengan SPM. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni, hal ini terkait dengan kemiskinan dan kesadaran kepemilikan sanitasi layak dan air bersih. Masih ditemukannya alih fungsi lahan.
3. Peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, akibat pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan perubahan iklim global. Emisi polutan seperti partikel-partikel halus, gas-gas beracun, dan zat kimia berbahaya menyebabkan polusi udara. Limbah industri, pertanian, dan domestik dapat mencemari air sungai dan danau, mengganggu ekosistem air tawar, dan mengancam kesehatan manusia yang mengandalkan sumber air tersebut. Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan.
4. Belum optimalnya konektivitas ke arah pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvensional dengan transportasi berbasis *online*.
5. Ketidaksetaraan akses teknologi, kebocoran data dan keamanan, ketergantungan pada teknologi dapat membuat pemerintah rentan terhadap gangguan, serangan siber, atau kegagalan sistem yang signifikan. Kurangnya keahlian teknologi di pemerintah. kurangnya literasi digital. Ketergantungan pada infrastruktur digital: permasalahan infrastruktur seperti koneksi internet yang lambat atau

tidak stabil di beberapa daerah dapat menghambat akses warga ke layanan digital pemerintah.

4. Daya Saing Investasi

1. Masih rendahnya nilai investasi di Kabupaten Karanganyar, hal ini dikarenakan investasi yang ada didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja. Kurang mendukungnya iklim investasi menjadi salah satu penyebab masih rendahnya investasi yang masuk. Selain itu, dari sisi infrastruktur yang tersedia untuk industri baik dari akses jalan, listrik dan air bersih untuk industri juga masih terbatas.
2. Belum optimalnya kondusivitas wilayah yang mampu mendorong iklim investasi hal ini terlihat dari masih adanya angka kriminalitas.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Belum optimalnya reformasi birokrasi yang dikarenakan belum optimalnya kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP yang lebih baik, belum optimalnya kualitas dan kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya kualitas kepegawaian dalam mendukung Merit System dan belum optimalnya pengawasan pembangunan. Riset dan inovasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan data kepegawaian yang belum optimal.
2. Belum terwujudnya sistem satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.
3. Kesiapan dalam mengatasi kebocoran informasi rahasia pemerintah yang dapat membahayakan keamanan nasional dan kepentingan publik. Belum optimalnya Indeks KAMI. Kesiapan meningkatkan keamanan sistem persandian. Privasi data individu dalam sistem persandian pemerintah.
4. Perkembangan pelayanan publik berbasis elektronik, belum di iringi dengan optimalnya sisi keamanan informasi agar data dan informasi masyarakat aman dan terjamin serta tidak disalahgunakan.

Berdasarkan uraian permasalahan pada Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal
Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu

langkah selanjutnya dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Potensi tersebut meliputi semua potensi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial.

Potensi lokal yang belum dimanfaatkan dengan optimal disebabkan oleh pembangunan kewirausahaan di Kabupaten Karanganyar yang masih belum maksimal. Pertumbuhan UMKM dan sinergitas membangun UMKM yang berdaya saing belum terwujud. Selain itu, investasi Kabupaten Karanganyar didominasi investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja dan pelayanan perijinan dalam Mall Pelayanan Publik masih belum optimal. Ekspor produk unggulan Karanganyar masih belum optimal serta kurangnya sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas.

2. Belum optimalnya Kualitas SDM menghadapi tantangan *industry 4.0* dan *society 5.0*

Di dalam era *industry 4.0* dan *society 5.0* ini sumber daya manusia yang berkompeten merupakan komponen utama dalam pembangunan di suatu daerah. Peningkatan SDM merupakan strategi yang dapat kita gunakan dikarenakan kita telah mengetahui bahwa hal tersebut sangat krusial. Kualitas SDM sudah merupakan keharusan didalam suatu pembangunan. Setiap SDM dituntut kualitas dalam dirinya untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di segala bidang.

Belum optimalnya kualitas SDM di Kabupaten Karanganyar salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya mutu, pemerataan dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendorong pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang maksimal. Selain itu, perihal kesehatan masih menjadi perhatian 20 tahun kedepan, mulai dari belum optimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan inklusi, masih munculnya penyakit menular dan tidak menular sebagai penyebab kematian.

3. Tingkat kesejahteraan yang belum optimal dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar disebabkan oleh masih ditemukannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, penanganan pemberdayaan dan pemberian jaminan sosial serta rehabilitasi masih belum optimal. Sedangkan, tingginya pengangguran disebabkan oleh belum terciptanya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja, belum optimalnya kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan dalam konsep pendidikan vokasi.

4. Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan, dampak perubahan iklim pada penanganan bencana dan kondusivitas wilayah

Kualitas lingkungan hidup pada tahun 2045 masih menjadi permasalahan. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan menjadikan jumlah sampah menjadi meningkat, sementara

pengelolaan sampah belum optimal. Selain itu meningkatnya aktivitas perekonomian akan menjadi penyebabnya meningkatnya pencemaran, udara, air dan berkurangnya tutupan lahan.

Kondusivitas di Kabupaten Karanganyar masih perlu mendapatkan perhatian lebih hal ini dikarenakan angka kriminalitas yang masih tinggi, salah satunya disebabkan oleh penegakan perda dan perkara belum optimal. Selain itu terkait penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Karanganyar.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan efisien

Tata Kelola Pemerintahan yang belum akuntabel dan efisien salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan kualitas perencanaan dalam mendorong capaian SAKIP belum dilaksanakan dengan baik, belum optimalnya kualitas dan kapasitas fiskal keuangan, belum optimalnya manajemen kepegawaian dalam mengimplementasikan *Merit System* dan belum optimalnya pengawasan pembangunan. Riset dan inovasi belum mewarnai dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

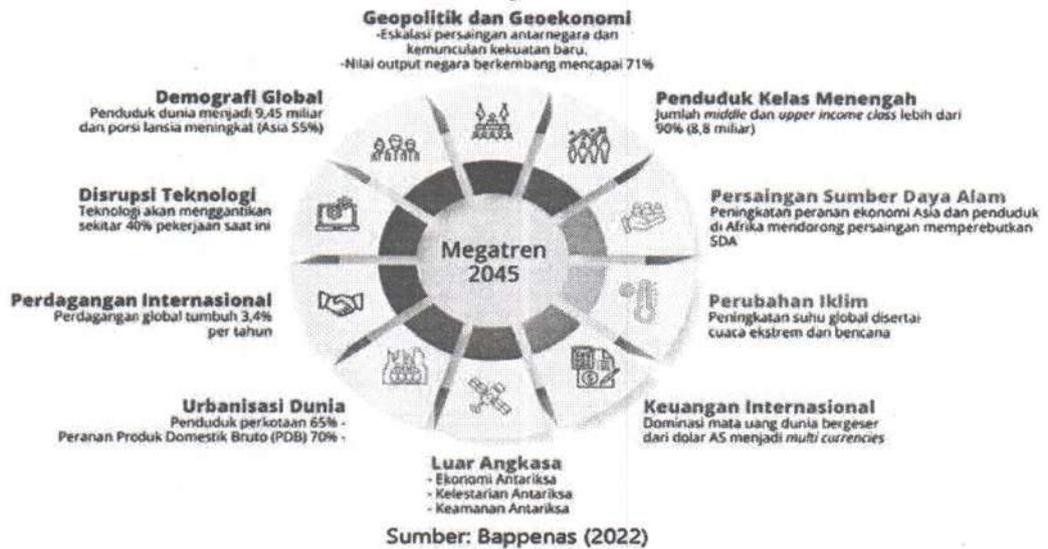
3.2. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (*global megatrend*), sebagai berikut :



Gambar 3.1
Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (*Global Megatrend*) diuraikan di bawah ini.

Tabel 3.1.
Penjelasan Megatrend Global 2045

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55, %); dengan kecendeungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait dengan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geopolitik	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru dari negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK).
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada diperkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Menngkatnya julah kelas menengah pada tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
		mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, nergi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga durya dan tenaga bayu.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	<p>konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</p> <p>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</p>
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	<p>a. Di tengah percepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah</p> <p>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</p>
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	<p>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</p> <p>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan</p> <p>e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.</p> <p>f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.</p>

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- d. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
- e. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
- f. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat
- g. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Karanganyar

Dalam rangka perumusan isu strategis Kabupaten Karanganyar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar

Isu Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kab. Karanganyar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 3. Perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana
<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemiskinan 5. Kesehatan 6. Pendidikan 7. Pangan dan gizi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tingkat Pengangguran 4. Kemiskinan 5. SDM Equity dan Inklusi
<ol style="list-style-type: none"> 8. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tata kelola pemerintahan yang dinamis 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tata kelola pemerintahan
<ol style="list-style-type: none"> 9. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pertumbuhan Ekonomi

Isu Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kab. Karanganyar
membangun kelembagaan	ekonomi, diplomasi tangguh		
10. Gender	5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi	8. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	8. SDM Equity dan Inklusi 9. Kondusivitas
11. Kesenjangan Kota dan Permukiman 12. Infrastruktur 13. Sumberdaya kelautan 14. Energi 15. Air bersih dan sanitasi 16. Ekosistem daratan	6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	9. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	10. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Bencana
17. Kemitraan global	7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	10. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	11. Tata kelola pemerintahan

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. SDM Equity dan Inklusi

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten Karanganyar yang meningkat dari 75,54 pada tahun 2018 menjadi 77,31 pada tahun 2023 diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM Nasional sebesar 74,39 pada tahun 2023.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih produktif dan inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan teknologi dan

inovasi. SDM yang kreatif dan berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan memajukan berbagai sektor. Dibidang ekonomi, kualitas SDM yang baik berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan output, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik karena laju inflasi tahun 2018 hingga tahun 2021 pada kondisi yang stabil, tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 3,15%, terendah tahun 2021 sebesar 1,38%. Stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Karanganyar selama lima tahun terakhir (2018- 2023) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Karanganyar pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 46,61 persen (angka ini menurun dari 46,86 persen di tahun 2021). Selanjutnya, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,66 persen (naik dari 3,53 persen di tahun 2022).

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan suatu wilayah. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi infrastruktur perkotaan dan penunjang perekonomian terlihat dari kondisi jalan, drainase, irigasi, dan sarana perhubungan. Persentase panjang jalan dalam kondisi

mantap di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun cenderung menurun dari sebesar 81,17% pada tahun 2018 menjadi 83,27% pada tahun 2023.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 baru mencapai sebesar 3,33%. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian pada tahun 2023 baru mencapai 32,50%. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 sebesar 72%.

Pemerataan infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan mengingat akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pemerataan infrastruktur membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan yang kurang berkembang. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata. Infrastruktur yang merata meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, memudahkan perpindahan orang dan barang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerataan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang sosial, infrastruktur yang merata memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun demikian pembangunan infrastruktur harus terencana dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

3. Tingkat Pengangguran

Selama kurun waktu 2018-2023 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami trend meningkat dari 2,28% tahun 2018 menjadi 4,35% pada tahun 2023. Hal ini memerlukan upaya penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Upaya pengurangan pengangguran ke depan perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2018-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami trend penurunan dari 10,01% tahun 2018 menjadi 9,79% pada tahun 2023. Pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang

melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait. Pengurangan kemiskinan sangat penting mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kemiskinan juga terkait dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan yang lebih baik karena individu cenderung lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi daripada kegiatan ilegal.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 baru mencapai kategori B (70,91), sehingga kedepan perlu ditingkatkan.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar masih rendah, terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 baru mencapai 63,22. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada

kesehatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produksi pangan yang mencukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan badai. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

7. Kondusivitas

Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya menarik investor sebagai bagian dari upaya menumbuhkan perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata. Salah satunya dengan menawarkan kondusivitas wilayah kepada calon investor dan pengunjung atau tamu yang datang di Karanganyar. Kondusivitas sangat penting untuk tetap terjaga agar masyarakat tetap produktif menjalankan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Terwujudnya kondusivitas wilayah di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dan banyaknya angka kriminalitas.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045. Visi Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. **Negara Kesatuan Republik Indonesia** merupakan negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Negara **Berdaulat** adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara **Maju** dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil. Sedangkan negara **Berkelanjutan** adalah Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dalam rancangan RPJPD adalah **Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan**. **Jawa Tengah Penumpu Pangan dan Industri Nasional** adalah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. **Jawa Tengah Maju** adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dg daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis). **Jawa Tengah Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. **Jawa Tengah Berbudaya** adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. **Jawa Tengah Berkelanjutan** adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Visi Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis telah dirumuskan dan diskusikan melalui berbagai arah serta meminta masukan kepada masyarakat dengan polling. Berikut ini permasalahan pokok yang mendasari tersusunnya Visi Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4.1.
Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Pertumbuhan ekonomi, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Hidup yang belum berdaya saing yang menyebabkan Karanganyar KOMPETITIF belum terjadi	Kompetitif	KARANGANYAR LIFE CENTER OF NUSANTARA 2045 : "MAJU, KOMPETITIF, DAN HARMONI"
2	Modernisasi, pemanfaatan teknologi dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan belum semua dilaksanakan sehingga Karanganyar harus lebih MAJU	Maju	
3	Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan kondusivitas wilayah serta belum merata dan terwujudnya tingkat kesejahteraan apabila dilihat masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga HARMONI belum optimal	Harmoni	

Rumusan Visi Kabupaten Karanganyar berdasarkan masalah utama dan telaah Visi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: **Karanganyar Life Center Of Nusantara 2045 : "Maju, Kompetitif, dan Harmoni"**

Penjelasan Visi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. *Life Center of Nusantara 2045* adalah mewujudkan Karanganyar sebagai pusat kehidupan Nusantara tahun 2045 yang sesuai dengan sejarah, kontinuitas pola kehidupan yang religius, banyaknya nilai-nilai luhur, kedudukan, tri gatra konsep nusantara dan wawasan ekologis. Pada gilirannya, sejarah telah membentuk karakter daerah karena sejak zaman pra aksara sampai zaman kontemporer ada keberlanjutan antar peradaban sehingga sejarah menjadi sumber legitimasi utama terwujudnya visi Karanganyar *Life Center of Nusantara 2045*. Pengenalan budaya dan merawat sejarah daerah harus menjiwai dalam berbagai aksi kegiatan pembangunan daerah dan manusianya secara berkelanjutan. Pola kehidupan masyarakat yang religius menjadi modal utama untuk mewujudkan visi Karanganyar *Life Center of Nusantara 2045*. Dengan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang religius tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembinaan pola kehidupan yang religius tersebut harus dirawat secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga yang berorientasi pada kerukunan antar umat beragama. Kabupaten Karanganyar adalah sebuah daerah yang secara geografis unggul karena potensi dan kekayaan Sumber Daya Alam yang ada. Sehingga, visi untuk

mewujudkan pusat peradaban nusantara tahun 2045 harus berorientasi pada semangat pembangunan berkelanjutan dan kelestarian. Keragaman budaya serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Karanganyar menjadi modal budaya didalam mewujudkan visi Karanganyar *Life Center of Nusantara* 2045. Modal budaya tersebut dapat dikembangkan untuk menciptakan integrasi sosial sehingga pembangunan budaya diharapkan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. Maju adalah Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita citakan.
3. Kompetitif adalah Meningkatnya SDM yang Berkarakter dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik *hard skill* maupun *soft skill*, kualitas kesehatan, terjadinya kesetaraan gender serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kedaulatan pangan.
4. Harmoni adalah adanya keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan dari segala aspek kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya serta peningkatan kompetensi SDM untuk mengurangi pengangguran dan Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang tinggi.

Tabel 4.2.

Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Karanganyar dengan RPJPN

INDONESIA EMAS 2045	KARANGANYAR 2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Karanganyar Life Center Of Nusantara 2045 : “Maju, Kompetitif, dan Harmoni
Berdaulat: Yaitu negara yang memiliki ketahanan, mandiri dan aman	Berdaulat bukan kewenangan kabupaten
Maju : adalah negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil	Kompetitif : Meningkatnya SDM yang Berkarakter dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik <i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i> , kualitas kesehatan, terjadinya kesetaraan gender serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kedaulatan pangan

INDONESIA EMAS 2045	KARANGANYAR 2045
	Maju : Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita citakan
Berkelanjutan : lestari, dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan	Harmoni : Terwujudnya keseimbangan dan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya dan Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang tinggi

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah berikut ini keterkaitan antara Visi Provinsi Jawa Tengah dengan Visi Karanganyar dalam RPJPD 2025-2045:

Tabel 4.3.
Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Karanganyar dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

JAWA TENGAH 2045	KARANGANYAR 2045
Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan	Karanganyar <i>Life Center Of Nusantara</i> 2045 : "Maju, Kompetitif, dan Harmoni
Penumpu Pangan dan Industri Nasional : Jawa Tengah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional	
Maju : Berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerjasama dg daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis)	Maju : Kabupaten yang modern dengan pemanfaatan teknologi, penguatan inovasi sehingga mampu mencapai pembangunan yang dicita citakan Kompetitif : Meningkatnya SDM yang Berkarakter dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kompetitif. SDM yang berkarakter adalah SDM yang memiliki kualitas pendidikan baik <i>hard skill</i> maupun <i>soft skill</i> , kualitas kesehatan, terjadinya kesetaraan gender serta SDM yang selalu memegang teguh nilai kegotongroyongan, dan budaya Indonesia. SDM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendorong kedaulatan pangan

JAWA TENGAH 2045	KARANGANYAR 2045
Berbudaya : Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor	Harmoni : Terwujudnya keseimbangan dan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya. Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta pendapatan yang tinggi
Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan	
Berkelanjutan : Menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.	

Pencapaian Karanganyar yang Maju, Kompetitif, dan Harmoni tercermin dalam empat sasaran visi, sebagai berikut.

Sasaran pertama, terwujudnya perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.

Sasaran kedua, terwujudnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup yang berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat serta terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan tahun 2045 dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.

Sasaran ketiga, terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Sasaran keempat, Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.4.
Sasaran Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2045

Jawa Tengah		Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
Sasaran Visi	Indikator Visi					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per kapita	Perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	6,15	6,29	6,46	6,64	6,85
	2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia		PDRB Perkapita	Juta/tahun	53,98	74,91	113,68	171,40	258,91
3. Kontribusi PDRB Sektor Industri									
4. Indeks Ketahanan Pangan									
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Kualitas SDM yang berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	78,19	81,53	84,35	87,24	89,45
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan 2. Rasio Gini 3. Kontribusi PDRB Provinsi		Angka kemiskinan	%	8,96	8,47	5,87	2,51	0,47
Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Birokrasi yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73,00	75,78	77,08	78,38	80,00
Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK	Kualitas lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,40	72,59	72,84	73,09	73,39

4.2. Misi Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan Misi Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 berdasarkan permasalahan dan Visi 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Rumusan Misi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Usulan Misi
1	Pertumbuhan ekonomi, Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Lingkungan Hidup yang belum berdaya saing yang menyebabkan Karanganyar KOMPETITIF belum terjadi	Karanganyar Life Center Of Nusantara 2045 : “Maju, Kompetitif, dan Harmoni”	Belum Optimalnya Pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal	Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
			Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan efisien	Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing
2	Modernisasi, pemanfaatan teknologi dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan belum semua dilaksanakan sehingga Karanganyar harus lebih MAJU		Belum optimalnya Kualitas SDM menghadapi tantangan <i>industry</i> 4.0 dan <i>society</i> 5.0	Kehidupan Sosial berkarakter
			Kemiskinan	
3	Belum optimalnya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan kondusivitas wilayah serta Masih belum optimalnya tingkat kesejahteraan apabila dilihat masih tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sehingga		Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan, dampak perubahan iklim pada penanganan bencana dan kondusivitas wilayah	Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

No	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Usulan Misi
	HARMONI belum optimal			

Berikut ini Misi Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar 2025-2045:

1. Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan

Misi ini memiliki pengertian bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan pengembangan potensi produk unggulan dan lapangan usaha potensi dalam PDRB, penguatan infrastruktur yang mempercepat pembangunan ekonomi, membuka aksesibilitas pada daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi dengan memperhatikan pengembangan daerah. Pembangunan ekonomi juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan perencanaan pengembangan Kawasan dalam dokumen RTRW. Pembangunan ekonomi ini harus bisa mendorong peran serta seluruh stakeholder (inklusi/kelompok rentan) dan seluruh wilayah. Desa juga memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata. Pengembangan riset, dan inovasi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas.

2. Mewujudkan Kehidupan Sosial berkarakter

Misi ini memiliki pengertian bahwa Sumberdaya Manusia merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang memiliki karakter, SDM yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai budaya dan kegotoroyongan menjadi tujuan pembangunan. Dalam misi ini SDM yang berdaya saing juga SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan literasi yang baik, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Lansia sebagai bonus demografi memiliki jumlah yang tinggi pada perjalanan 20 tahun ke depan. Mendorong kualitas Lansia yang produktif dan sehat adalah tujuan dari daya saing SDM. Pemahaman riset dan inovasi juga harus dimiliki oleh SDM yang berdaya saing.

Misi ini juga berfokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat meliputi perlindungan perempuan dan anak, jaminan sosial dan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan kebutuhan dasar pada penduduk miskin, jaminan keterampilan, kompetensi tenaga dan perlindungan tenaga kerja. Kewilayahan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat.

3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing

Misi ini memiliki pengertian bahwa tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dinamis meliputi implementasi demokrasi substansi, perwujudan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas perencanaan, pemantapan Merit Sistem dan peningkatan pengawasan pembangunan.

4. **Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan**

Misi ini memiliki pengertian perwujudan kualitas lingkungan meliputi lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari pengaruh perubahan iklim meliputi kualitas udara, air dan tutupan lahan. Pengelolaan sampah juga menjadi fokus pada misi ini. Peningkatan jumlah penduduk dan proses produksi dalam pembangunan ekonomi memberikan dampak pada peningkatan produksi sampah. Peningkatan akses pada sanitasi, air bersih juga menjadi fokus pada misi ini. Kualitas lingkungan sosial yang nyaman tanpa kriminalitas adalah fokus pada misi ini. Kabupaten Karanganyar akan menjadi kabupaten yang tangguh bencana (resiliensi) dengan fokus pada penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana.

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4.6.

Keterkaitan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dengan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

No.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN KARANGANYAR
1	Transformasi Sosial 1. Kesehatan untuk Semua 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	TRANSFORMASI SOSIAL	Mewujudkan Kehidupan Sosial berkarakter
2	Transformasi Ekonomi 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2. Penerapan Ekonomi Hijau 3. Transformasi Digital 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	TRANSFORMASI EKONOMI	Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia 1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2. Stabilitas Ekonomi Makro 3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan

No.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN KARANGANYAR
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 3. Lingkungan Hidup Berkualitas 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan dan Kehidupan Sosial yang Berkarakter
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN	Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	SARANA PRASARANA BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN	Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN	Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan

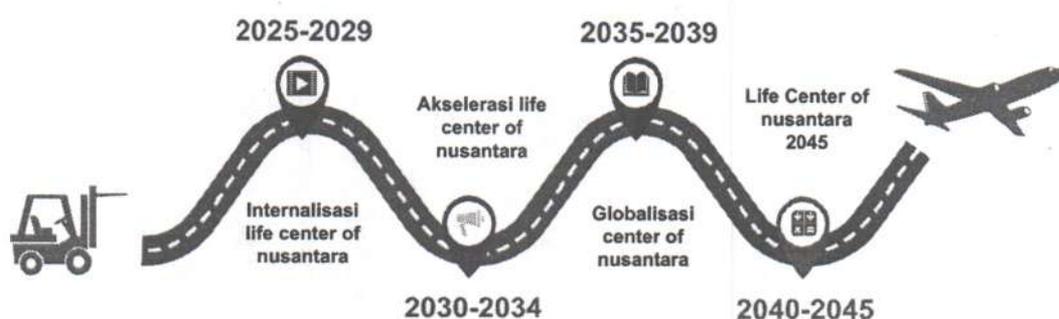
BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



Gambar 5.1.

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Tahap pertama tahun 2025-2029 disebut dengan **Internalisasi Life Center Of Nusantara**. Tahap ini sejalan dengan tahap Indonesia yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Karanganyar melakukan penguatan *Life Center Of Nusantara* dengan memperkuat daya saing Sumber daya Manusia, meningkatkan kompetensi pembangunan ekonomi, dan memperkuat tata Kelola pemerintahan.

Tahap kedua tahun 2030-2034 disebut dengan tahapan **Akselerasi Life Center Of Nusantara**. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN Akselerasi Transformasi. Pada tahap ini semua program diakselerasi dengan memperkuat teknologi, inovasi. Harapannya pada tahap ini pencapaian Karanganyar Maju, dan Kompetitif dan Harmoni dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan kualitas lingkungan menjadi pendorong pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahap ketiga Tahun 2035-2039 disebut dengan tahapan **Globalisasi Life Center Of Nusantara**. Tahap ini sejalan dengan RPJPN Globalisasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Karanganyar akan memiliki agroindustri, pengembangan ekspor, kualitas SDM yang berbasis pada *society 5.0*. Karakter dan Budaya Kabupaten Karanganyar

akan menjadi rujukan atau model di Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN dan Indonesia pada umumnya.

Tahap keempat tahun 2040-2045 disebut dengan tahapan **Life Center Of Nusantara** yaitu tahap Karanganyar Emas, Indonesia Emas. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa Karanganyar mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara maju keempat dengan potensi kuat industrialisasi pertanian atau agroindustri, Daerah tujuan wisata nasional dan dunia, serta pusat budaya dan karakter bangsa yang kuat. Arah kebijakan setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2025-2029 (Internalisasi Life Center Of Nusantara)

Pada periode ini untuk **mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kualitas petani, pemanfaatan teknologi tepat guna (pola tanam, pupuk, benih/bibit, sarpras,) pembatasan alih fungsi lahan, pengembangan petani milenial, pembuatan masterplan irigasi, pengembangan kelembagaan petani (penyuluh pertanian), pelestarian embung, pengembangan pertanian terintegrasi, pengendalian hama dan penyakit, penguatan *One Village One Product* (OVOP);
- b. Penguatan Pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green building, green environment*);
- c. Penguatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan market place (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM, kolaborasi koperasi dan UMKM dalam pengembangan permodalan dan pemasaran produk UMKM
- d. Penguatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar), efisiensi jalur distribusi perdagangan, menjamin perlindungan konsumen dan produsen, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan stabilisasi harga barang pokok dan penting;
- e. Penguatan kelembagaan dalam mewujudkan kemudahan investasi (perijinan, pemberian insentif, kepastian berusaha);
- f. Penguatan kualitas pariwisata; sarpras obyek Wisata, pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- g. Penguatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan ;
- h. Penguatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan. Peningkatan konektivitas antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah yang berbatasan; dan
- i. Penguatan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, serta mendorong tersedianya peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukkan tata ruang, digitalisasi informasi tata ruang.

Dalam rangka **mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan, (Peningkatan sarpras pendidikan,

- kemudahan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, muatan lokal Pelaksanaan wajib belajar 13 Tahun);
- b. Penguatan pelayanan kesehatan melalui PHBS dan penguatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan, penguatan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Akses air bersih dan sanitasi, GERMAS Penguatan sarpras kesehatan, Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat);
 - c. Penguatan pengendalian laju dan pertumbuhan penduduk (pendidikan terkait reproduksi, dan peningkatan program KB);
 - d. Penguatan pemajuan kebudayaan (Penguatan seni budaya lokal, pelestarian cagar budaya dan penguatan keberadaan museum);
 - e. Penguatan peningkatan budaya literasi masyarakat (peningkatan kualitas perpustakaan, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, penguatan perpustakaan sekolah, taman baca masyarakat, meningkatkan akses buku digital);
 - f. Penguatan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan (peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, *entrepreneurship* kepemudaan, peningkatan prestasi pemuda);
 - g. Penguatan perlindungan kesejahteraan penduduk miskin (pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, validitas data, peningkatan pendapatan penduduk miskin, peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan);
 - h. Penguatan kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
 - i. Penguatan pengurangan ketimpangan gender (Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak);
 - j. Penguatan peningkatan kompetensi tenaga kerja (pengutamaan tenaga kerja lokal, melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja. Peningkatan lapangan kerja, perwujudan link match dunia pendidikan dengan dunia usaha, pendataan kegiatan peningkatan ketrampilan bagi penganggur di dinas dan balai pelatihan); dan
 - k. Penguatan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa (melalui peningkatan desa berkembang, maju, dan mandiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten).

Dalam rangka **meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, inovatif dan Berdaya Saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan layanan administrasi kependudukan melalui pelayanan digital dan didukung SDM yang handal;
- b. Penguatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan;
- c. Penguatan kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu sehingga dapat dibagi pakaikan dalam rangka mendukung satu data Indonesia;

- d. Penguatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah;
- e. Penguatan pengelolaan arsip secara digital;
- f. Penguatan kualitas dokumen perencanaan melalui sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen perencanaan provinsi dan Nasional;
- g. Penguatan kualitas riset dan inovasi secara konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;
- h. Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang berakhlak;
- i. Optimalisasi sumber pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, dan aset daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Optimalisasi penyelenggaraan SPIP dan peningkatan profesionalisme APIP;
- k. Penguatan kualitas pelayanan publik;
- l. Penguatan kesadaran berpolitik pada masyarakat; dan
- m. Penguatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial;
- n. Penguatan reformasi hukum.

Dalam rangka **mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penguatan manajemen pengelolaan sampah, penguatan kesadaran masyarakat mengelola sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar. Penguatan penanganan limbah B3. Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan kampung proklam;
- b. Penguatan pemenuhan akses air minum layak, sanitasi layak. Peningkatan penyediaan IPLT;
- c. Penguatan penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, peningkatan Prasarana Sarana Utilitas;
- d. Penguatan kualitas keamanan ketertiban masyarakat, peningkatan penegakan peraturan daerah, peningkatan respon time penanganan kebakaran, peningkatan peran lintas sector dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kapasitas satpol PP; dan
- e. Penguatan pencegahan, mitigasi penangan bencana, peningkatan kelurahan/desa tangguh bencana.

2. Tahun 2030-2034 (Akselerasi *Life Center Of Nusantara*)

Pada periode ini untuk **mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Percepatan hilirisasi dan industrialisasi pertanian, penguatan kelembagaan pertanian (KUD & BUMDes), peningkatan manajemen pengelolaan hasil pertanian, pengembangan, diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pengembangan branding produk unggulan, Percepatan sarpras pertanian. Digitalisasi pemasaran produk pertanian, perluasan petani milenial (*urban farming*), kolaborasi dengan perguruan tinggi

- dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM pertanian;
- b. Percepatan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green Building & green environment*);
 - c. Percepatan kualitas produk UMKM, perluasan akses permodalan, UMKM dengan jaminan mutu (sertifikasi produk), Percepatan market place, perluasan daerah pemasaran;
 - d. Percepatan sarana dan prasarana perdagangan, memantapkan perlindungan pelaku usaha, mendorong ekspor;
 - e. Percepatan digitalisasi kemudahan investasi;
 - f. sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri. Pengembangan ekowisata, Percepatan akomodasi wisata, Percepatan kelembagaan pariwisata, Percepatan SDM Pariwisata;
 - g. Percepatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistic, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;
 - h. Percepatan digitalisasi pelayanan transportasi dan keselamatan penumpang (layanan transportasi, penguatan *E-blue*), perluasan pelayanan untuk daerah perbatasan dan daerah pelosok serta kolaborasi program dalam penyediaan angkutan; dan
 - i. Percepatan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, serta memperluas *green building* di Bangunan publik, Percepatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Dalam rangka **mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Percepatan digitalisasi Pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan hak dalam memperoleh pendidikan (Percepatan layanan e-learning dan sistem administrasi layanan Pendidikan, Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun);
- b. Percepatan digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan (Digitalisasi layanan primer dan rujukan, Digitalisasi Kesehatan ibu dan anak, Penguatan GERMAS dan STBM);
- c. Percepatan peningkatan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga;
- d. Percepatan program pembangunan keluarga berencana;
- e. Percepatan pemajuan budaya, percepatan kolaborasi seni budaya lokal dengan pariwisata, dan pemantapan kelestarian cagar budaya;
- f. Percepatan Literasi dan Perpustakaan digital (Penguatan kualitas perpustakaan, Pengembangan digitalisasi perpustakaan);
- g. Percepatan pembangunan pemuda yang berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda ditingkat global (Penguatan peran pemuda dalam pembangunan, Penguatan *Entrepreneurship* kepemudaan, Penguatan pemuda berprestasi);
- h. Percepatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (Perluasan program pengurang beban pengeluaran selain pendidikan dan Kesehatan, Digitalisasi data kemiskinan, Pemantapan kolaborasi dan Sinergitas program);

- i. Percepatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PPKS Digitalisasi data PPKS Penguatan PSKS (Penguatan Validitas data, peningkatan jaminan sosial dan perlindungan sosial, Peningkatan SPM bidang sosial);
- j. Percepatan pelayanan terhadap perlindungan Perempuan dan anak (Peningkatan pelayanan kekerasan Perempuan dan anak sampai tingkat kecamatan, Digitalisasi data pilah gender, Penguatan kabupaten layak anak);
- k. Percepatan penguatan Kompetensi Tenaga Kerja (Penguatan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri, Peningkatan Kerjasama antara Perusahaan dengan Pendidikan vokasi, Peningkatan Lembaga keterampilan); dan
- l. Percepatan perluasan kompetensi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Percepatan pembangunan Kawasan perdesaan, penguatan desa berkembang, maju, dan mandiri, Sinkronisasi RKPDes RPJMDes, dengan RKPD, RPJMD dan APBD).

Dalam rangka **meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, inovatif dan Berdaya Saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Percepatan dalam jangkauan layanan adminduk secara digital dan merata diseluruh wilayah;
- b. Percepatan penyelenggaraan SPBE untuk mendukung digitalisasi sektor pemerintahan;
- c. Percepatan pengelolaan data dan statistik untuk memberikan, kemudahan akses dan saling berbagi data dalam rangka mendukung satu data Indonesia;
- d. Percepatan dalam mengembangkan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah;
- e. Percepatan pengelolaan arsip digital melalui peningkatan dan pengelolaan sumberdaya;
- f. Percepatan peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui akselerasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
- g. Percepatan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;
- h. Percepatan dalam rangka mewujudkan ASN yang berakhlak;
- i. Percepatan kemandirian keuangan daerah yang meliputi penguatan kapasitas fiskal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah;
- j. Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP;
- k. percepatan pelayanan publik berbasis modernisasi dan teknologi yang mudah diakses;
- l. Penguatan literasi politik masyarakat; dan
- m. Percepatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah konflik sosial;
- n. Percepatan reformasi hukum.

Dalam rangka **mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemantapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan.

Penguatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan penanganan sampah tuntas ditempat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, penguatan sinergitas pengelolaan sampah anantara lain pasar. Penguatan penanganan limbah B3. Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan kampung proklam;

- b. Pemantapan pemenuhan akses air minum aman, sanitasi aman, peningkatan pemanfaatan IPLT;
- c. Pemantapan erluasan penanganan Kawasan kumuh, perluasan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, perluasan Prasarana Sarana Utilitas;
- d. Mendorong pemantapan pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat secara massif, digitalisasi peneggakan perda dan perkada; dan
- e. Pemantapan *early warning system*, penguatan mitigasi bencana dan mendorong peran lintas sektor.

3. Tahun 2035-2039 (Globalisasi *Life Center Of Nusantara*)

Pada periode ini untuk **mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemantapan pendapatan petani dengan fokus industrialisasi pertanian, pemantapan pertanian terintegrasi, pemantapan kerja sama antar daerah dalam pemasaran dan produk pertanian, pemantapan diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pemantapan perluasan branding produk unggulan, menjamin eksistensi SDM pertanian dengan pendidikan pertanian untuk keluarga petani;
- b. Pemantapan industri dengan ekonomi sirkuler, *green industry*;
- c. Pemantapan pengembangan produk UMKM yang memiliki jaminan mutu (sertifikasi), pemanfaatan teknologi dalam kualitas produk, pemantapan daerah pemasaran;
- d. Pemantapan digitalisasi sarana perdagangan, perluasan ekspor;
- e. Sinergitas investasi, kawasan industri dan tenaga kerja;
- f. Pemantapan perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata;
- g. Pemantapan perluasan ketersediaan pangan utama, cadangan logistic, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;
- h. Pemantapan pelayanan transportasi yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Sinergitas moda transportasi; dan
- i. Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemantapan green building di Bangunan publik, terwujudnya ketaatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Dalam rangka **mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemantapan perluasan digitalisasi pendidikan (pengembangan layanan *e-learning*, sistem administrasi layanan pendidikan, percepatan wajib belajar 14 tahun);
- b. Pemantapan perluasan digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan (percepatan transformasi kesehatan, peningkatan kesehatan lansia produktif, peningkatan pembangunan berwawasan kesehatan);

- c. Pemantapan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- d. Pemantapan program pembangunan keluarga berencana;
- e. Pemantapan perluasan objek pemajuan kebudayaan; pemantapan kolaborasi seni budaya dengan pariwisata, penambahan objek pemajuan kebudayaan, pemantapan kelestarian cagar budaya;
- f. Pemantapan perluasan literasi digital dan perluasan digitalisasi perpustakaan;
- g. Pemantapan peran Pemuda dalam Pembangunan (Pemantapan peran pemuda dalam pembangunan, Pemantapan *entrepreneurship* kepemudaan);
- h. Pemantapan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (Perwujudan data kemiskinan *by name by address* yang akurat, Pengurangan beban dan peningkatan pendapatan penduduk miskin Perwujudan penanganan PPKS yang komprehensif, Perwujudan kesetaraan gender, Perwujudan Masyarakat Desa yang berkompeten);
- i. Pemantapan kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan PPKS (Validitas data yang terupdate, pemantapan jaminan sosial dan perlindungan sosial, pemantapan SPM bidang sosial);
- j. Pemantapan kabupaten layak anak (Pemantapan pelayanan perempuan dan anak sampai tingkat desa, Pemantapan digitalisasi data pilah gender, Pemantapan kabupaten layak anak);
- k. Pemantapan tenaga kerja yang terampil dan globalisasi (pemantapan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri, perluasan Kerjasama antara Perusahaan dengan Pendidikan vokasi, pemantapan Lembaga keterampilan); dan
- l. Pemantapan Kawasan pedesaan (Pemantapan pembangunan kawasan pedesaan, pemantapan desa berkembang, maju, dan mandiri, Sinkronisasi RKPDes RPJMDes, dengan RKPD, RPJMD dan APBD).

Dalam rangka **meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, inovatif dan Berdaya Saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan layanan adminduk secara digitalisasi menyeluruh;
- b. Pemantapan pengembangan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi, efisien dan inovatif;
- c. Perluasan basis data dan pengembangan pengelolaan statistik sektoral dalam pengelolaan satu data Indonesia;
- d. Pemantapan perluasan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah;
- e. Pemantapan pengembangan pengelolaan arsip digital secara menyeluruh;
- f. Pemantapan kualitas dokumen perencanaan melalui perencanaan yang integratif dan menyeluruh;
- g. Pemantapan perluasan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;
- h. Pemantapan pengembangan penyelenggaraan manajemen ASN dalam rangka mewujudkan ASN berakhlak;
- i. Perluasan sumber pendapatan daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah;

- j. Pemantapan penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
- k. Pemantapan pelayanan publik berbasis modernisasi dan teknologi yang mudah diakses;
- l. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
- m. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial; dan
- n. Pemantapan reformasi hukum.

Dalam rangka **mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemantapan ketersediaan sumberdaya air, pengurangan lahan kritis, Pengurangan sampah an organik, digitalisasi pemantauan kualitas udara, air, perwujudan kampung Proklim;
- b. Pemantapan akses air minum aman, sanitasi aman;
- c. Pemantapan penanganan Kawasan kumuh, pemantapan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pemantapan prasarana sarana utilitas;
- d. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- e. Pemantapan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

4. Tahun 2040-2045 (*Life Center Of Nusantara*)

Pada periode ini untuk **mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Menjamin keberlanjutan Produk pertanian, SDM yang mendorong pertanian lestari, pemantapan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM;
- b. Pemantapan ekonomi sirkuler *green industry*;
- c. Keberlanjutan produk UMKM;
- d. Masuk pasar Global;
- e. Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah;
- f. Keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif multiplier *effect sector* pariwisata;
- g. Keberlanjutan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;
- h. Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah; dan
- i. Terwujudnya infrastruktur yang mendorong terwujudnya ekonomi hijau.

Dalam rangka **mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendidikan untuk semua;
- b. Kesehatan untuk semua;
- c. Keberlanjutan keluarga sejahtera;
- d. Keberlanjutan kebudayaan benda dan tak benda;
- e. Keberlanjutan literasi digital;
- f. Keberlanjutan peran pemuda dalam pembangunan;
- g. Kemiskinan menuju 0,47%;
- h. Peningkatan kualitas PPKS;
- i. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- j. Pengurangan pengangguran secara signifikan; dan

- k. Meningkatnya kemandirian desa.

Dalam rangka **meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, inovatif dan Berdaya Saing**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Perwujudan pemenuhan kepemilikan dokumen adminduk bagi seluruh masyarakat;
- b. Perwujudan penyelenggaraan SPBE yang inovatif dalam pelayanan publik;
- c. Perwujudan pengelolaan satu data Indonesia yang berkelanjutan;
- d. Perwujudan sistem data dan informasi pemerintah daerah yang handal;
- e. Perwujudan pengelolaan arsip digital yang efektif dan efisien;
- f. Perwujudan kualitas dokumen perencanaan yang tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;
- g. Perwujudan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;
- h. Perwujudan ASN yang berakhlak;
- i. Kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien;
- j. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- k. Perwujudan pelayanan publik
- l. Perwujudan masyarakat yang demokratis;
- m. Perwujudan kondisi masyarakat yang toleran dan damai; dan
- n. Perwujudan reformasi hukum.

Dalam rangka **mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a. Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (*zero waste*);
- b. Perwujudan infrastruktur pelayanan dasar;
- c. Perwujudan perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni;
- d. Perwujudan kondusivitas wilayah; dan
- e. Menurunnya indeks resiko bencana

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karanganyar "Life Center Of Nusantara 2045: Maju, Kompetitif, dan Harmoni"	Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas petani, pemanfaatan teknologi tepat guna (pola tanam, pupuk, benih/bibit, sarpras,) pembatasan alih fungsi lahan, pengembangan petani milenial, pembuatan masterplan irigasi, pengembangan kelembagaan petani (penyuluh pertanian), pelestarian embung, pengembangan pertanian terintegrasi, pengendalian hama dan penyakit, penguatan <i>One Village One Product</i> (OVOP); 2. Penguatan Pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (green building, green environment); 3. Penguatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan market place (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM, kolaborasi koperasi dan UMKM dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan hilirisasi dan industrialisasi pertanian, penguatan kelembagaan pertanian (KUD & BUMDes), peningkatan manajemen pengelolaan hasil pertanian, pengembangan, diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pengembangan branding produk unggulan, Percepatan sarpras pertanian. Digitalisasi pemasaran produk pertanian, perluasan petani milenial (urban farming), kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM pertanian 2. Percepatan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (green Building & green environment); 3. Percepatan kualitas produk UMKM, perluasan akses permodalan, UMKM dengan jaminan mutu (sertifikasi produk), 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pendapatan petani dengan fokus industrialisasi pertanian, pemantapan pertanian terintegrasi, pemantapan kerja sama antar daerah dalam pemasaran dan produk pertanian, pemantapan diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pemantapan perluasan branding produk unggulan, menjamin eksistensi SDM pertanian dengan pendidikan pertanian untuk keluarga petani; 2. Pemantapan industri dengan ekonomi sirkuler, <i>green industry</i>; 3. Pemantapan pengembangan produk UMKM yang memiliki jaminan mutu (sertifikasi), pemanfaatan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keberlanjutan Produk pertanian, SDM yang mendorong pertanian lestari, pemantapan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM; 2. Pemantapan ekonomi sirkuler <i>green industry</i>; 3. Keberlanjutan produk UMKM masuk pasar Global; 4. Perwujudan digitalisasi sarana perdagangan, perluasan ekspor; 5. Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah; 6. Keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>pengembangan permodalan dan pemasaran produk UMKM</p> <p>4. Penguatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar), efisiensi jalur distribusi perdagangan, menjamin perlindungan konsumen dan produsen, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penguatan stabilisasi harga barang pokok dan penting;</p> <p>5. Penguatan kelembagaan dalam mewujudkan kemudahan investasi (perijinan, pemberian insentif, kepastian berusaha);</p> <p>6. Penguatan kualitas pariwisata; sarpras obyek Wisata, pembuatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas</p>	<p>Percepatan market place, perluasan daerah pemasaran;</p> <p>4. Percepatan sarana dan prasarana perdagangan, memantapkan perlindungan pelaku usaha, mendorong ekspor;</p> <p>5. Percepatan digitalisasi kemudahan investasi;</p> <p>6. sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri. Pengembangan ekowisata, Percepatan akomodasi wisata, Percepatan kelembagaan pariwisata, Percepatan SDM Pariwisata;</p> <p>7. Percepatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistic, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;</p> <p>8. Percepatan digitalisasi pelayanan transportasi dan keselamatan penumpang (layanan transportasi, penguatan E-blue), perluasan pelayanan untuk daerah perbatasan dan daerah pelosok serta kolaborasi program dalam penyediaan angkutan; dan</p>	<p>dalam kualitas produk, pemantapan daerah pemasaran;</p> <p>4. Pemantapan digitalisasi sarana perdagangan, perluasan ekspor;</p> <p>5. Sinergitas investasi, kawasan industri dan tenaga kerja;</p> <p>6. Pemantapan perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata;</p> <p>7. Pemantapan perluasan ketersediaan pangan utama, cadangan logistic, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;</p> <p>8. Pemantapan pelayanan transportasi yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Sinergitas moda transportasi; dan</p> <p>9. Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemantapan green building di Bangunan publik, terwujudnya ketaatan penggunaan</p>	<p><i>multiplier effect</i> sector pariwisata;</p> <p>7. Keberlanjutan ketersediaan pangan utama, cadangan logistic, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;</p> <p>8. Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah; dan</p> <p>9. Terwujudnya infrastruktur yang mendorong terwujudnya ekonomi hijau.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>sumber daya manusia pariwisata;</p> <p>7. Penguatan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan;</p> <p>8. Penguatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan. Peningkatan konektivitas antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah yang berbatasan; dan</p> <p>9. Penguatan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, serta mendorong tersedianya peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, digitalisasi informasi tata ruang.</p>	<p>9. Percepatan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, serta memperluas green building di Bangunan publik, Percepatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang.</p>	<p>lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang.</p>	
	Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter	<p>1. Penguatan pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan, (Peningkatan sarpras pendidikan, kemudahan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, muatan lokal Pelaksanaan wajib belajar 13 Tahun);</p>	<p>1. Percepatan digitalisasi Pendidikan melalui pemerataan pelayanan dan hak dalam memperoleh pendidikan (Percepatan layanan e-learning dan sistem administrasi layanan Pendidikan, Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun);</p>	<p>1. Pemantapan perluasan digitalisasi pendidikan (pengembangan layanan e-learning, sistem administrasi layanan pendidikan, percepatan wajib belajar 14 tahun);</p> <p>2. Pemantapan perluasan digitalisasi dan peningkatan mutu</p>	<p>1. Pendidikan untuk semua;</p> <p>2. Kesehatan untuk semua;</p> <p>3. Keberlanjutan keluarga sejahtera;</p> <p>4. Keberlanjutan kebudayaan benda dan tak benda;</p> <p>5. Keberlanjutan literasi digital;</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>2. Penguatan pelayanan kesehatan melalui PHBS dan penguatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan, penguatan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Akses air bersih dan sanitasi, GERMAS Penguatan sarpras kesehatan, Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, Peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat);</p> <p>3. Penguatan peningkatan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga; penguatan pengendalian laju dan pertumbuhan penduduk (pendidikan terkait reproduksi, dan peningkatan program KB);</p> <p>4. Penguatan pemajuan kebudayaan (Penguatan seni budaya lokal, pelestarian cagar budaya dan penguatan keberadaan museum);</p> <p>5. Penguatan peningkatan budaya literasi masyarakat (peningkatan kualitas perpustakaan, peningkatan</p>	<p>2. Percepatan digitalisasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan (Digitalisasi layanan primer dan rujukan, Digitalisasi Kesehatan ibu dan anak, Penguatan GERMAS dan STBM);</p> <p>3. Percepatan peningkatan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga; Percepatan program pembangunan keluarga berencana;</p> <p>4. Percepatan pemajuan budaya, percepatan kolaborasi seni budaya lokal dengan pariwisata, dan pemantapan kelestarian cagar budaya;</p> <p>5. Percepatan Literasi dan Perpustakaan digital (Penguatan kualitas perpustakaan, Pengembangan digitalisasi perpustakaan);</p> <p>6. Percepatan pembangunan pemuda yang berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda ditingkat global (Penguatan peran pemuda dalam pembangunan, Penguatan</p>	<p>layanan kesehatan (percepatan transformasi kesehatan, peningkatan kesehatan lansia produktif, peningkatan pembangunan berwawasan kesehatan);</p> <p>3. Pemantapan ketenteraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga; dan Pemantapan program pembangunan keluarga berencana;</p> <p>4. Pemantapan perluasan objek pemajuan kebudayaan; pemantapan kolaborasi seni budaya dengan pariwisata, penambahan objek pemajuan kebudayaan, pemantapan kelestarian cagar budaya;</p> <p>5. Pemantapan perluasan literasi digital dan perluasan digitalisasi perpustakaan;</p> <p>g. Pemantapan peran Pemuda dalam Pembangunan</p>	<p>6. Keberlanjutan peran pemuda dalam pembangunan;</p> <p>7. Kemiskinan menuju 0,47%;</p> <p>8. Peningkatan kualitas PPKS;</p> <p>9. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</p> <p>10. Pengurangan pengangguran secara signifikan; dan</p> <p>11. Meningkatnya kemandirian desa.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>sarana dan prasarana perpustakaan, penguatan perpustakaan sekolah, taman baca masyarakat, meningkatkan akses buku digital);</p> <p>6. Penguatan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan (peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, entrepreneurship kepemudaan, peningkatan prestasi pemuda);</p> <p>7. Penguatan perlindungan kesejahteraan penduduk miskin (pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, validitas data, peningkatan pendapatan penduduk miskin, peningkatan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan);</p> <p>8. Penguatan kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);</p> <p>9. Penguatan pengurangan ketimpangan gender (Melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,</p>	<p>Entrepreneurship kepemudaan, Penguatan pemuda berprestasi);</p> <p>7. Percepatan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (Perluasan program pengurangan beban pendidikan dan Kesehatan, Digitalisasi data kemiskinan, Pemantapan kolaborasi dan Sinergitas program);</p> <p>8. Percepatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan PPKS Digitalisasi data PPKS Penguatan PSKS (Penguatan Validitas data, peningkatan jaminan sosial dan perlindungan sosial, Peningkatan SPM bidang sosial);</p> <p>9. Percepatan pelayanan terhadap perlindungan Perempuan dan anak (Peningkatan pelayanan kekerasan Perempuan dan anak sampai tingkat kecamatan, Digitalisasi data pilah gender, Penguatan kabupaten layak anak);</p>	<p>(Pemantapan peran pemuda dalam pembangunan, Pemantapan entrepreneurship kepemudaan);</p> <p>6. Pemantapan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (Perwujudan data kemiskinan by name by address yang akurat, Pengurangan beban dan peningkatan pendapatan penduduk miskin</p> <p>7. Perwujudan penanganan PPKS yang komprehensif, Perwujudan kesetaraan gender, Perwujudan Masyarakat Desa yang berkompeten);</p> <p>8. Pemantapan kolaborasi lintas sectoral dalam penanganan PPKS (Validitas data yang terupdate, pemantapan jaminan sosial dan perlindungan sosial, pemantapan SPM bidang sosial);</p> <p>9. Pemantapan kabupaten layak anak</p>	

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peningkatan perlindungan Perempuan dan anak, Peningkatan pemenuhan hak anak, Pengurangan pernikahan anak);</p> <p>10. Penguatan peningkatan kompetensi tenaga kerja (pengutamakan tenaga kerja lokal, melalui peningkatan kompetensi calon tenaga kerja. Peningkatan lapangan kerja, perwujudan link match dunia pendidikan dengan dunia usaha, pendataan kegiatan peningkatan ketrampilan bagi penganggur di dinas dan balai pelatihan); dan</p> <p>11. Penguatan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat desa (melalui peningkatan desa berkembang, maju, dan mandiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten).</p>	<p>10. Percepatan penguatan Kompetensi Tenaga Kerja (Penguatan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri, Peningkatan Kerjasama antara Perusahaan dengan Pendidikan vokasi, Peningkatan Lembaga keterampilan); dan</p> <p>11. Percepatan perluasan kompetensi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Percepatan pembangunan Kawasan perdesaan, penguatan desa berkembang, maju, dan mandiri, Sinkronisasi RKPDes RPJMDes, dengan RKPDes, RPJMD dan APBD).</p>	<p>(Pemantapan pelayanan perempuan dan anak sampai tingkat desa, Pemantapan digitalisasi data pilah gender, Pemantapan kabupaten layak anak);</p> <p>10. Pemantapan tenaga kerja yang terampil dan globalisasi (pemantapan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri, perluasan Kerjasama antara Perusahaan dengan Pendidikan vokasi, pemantapan Lembaga keterampilan); dan</p> <p>11. Pemantapan Kawasan pedesaan (Pemantapan pembangunan kawasan pedesaan, pemantapan desa berkembang, maju, dan mandiri, Sinkronisasi RKPDes RPJMDes, dengan RKPDes, RPJMD dan APBD).</p>	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel,	1. Penguatan layanan administrasi kependudukan melalui pelayanan digital	1. Percepatan dalam jangkauan layanan adminduk secara digital	1. Pemantapan pengembangan layanan adminduk	1. Perwujudan pemenuhan kepemilikan dokumen adminduk

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inovatif dan Berdaya Saing	<p>dan didukung SDM yang handal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan; 3. Penguatan kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu sehingga dapat dibagi pakaikan dalam rangka mendukung satu data Indonesia; 4. Penguatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah; 5. Penguatan pengelolaan arsip secara digital; 6. Penguatan kualitas dokumen perencanaan melalui sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen perencanaan provinsi dan Nasional; 7. Penguatan kualitas riset dan inovasi secara konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis; 8. Penguatan penyelenggaraan manajemen ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang berakhlak; 	<p>dan merata diseluruh wilayah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Percepatan penyelenggaraan SPBE untuk mendukung digitalisasi sektor pemerintahan; 3. Percepatan pengelolaan data dan statistik untuk memberikan, kemudahan akses dan saling berbagi data dalam rangka mendukung satu data Indonesia; 4. Percepatan dalam mengembangkan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah; 5. Percepatan pengelolaan arsip digital melalui peningkatan dan pengelolaan sumberdaya; 6. Percepatan peningkatan kualitas dokumen perencanaan melalui akselerasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen perencanaan provinsi dan nasional; 7. Percepatan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan 	<p>secara digitalisasi menyeluruh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantapan pengembangan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi, efisien dan inovatif; 3. Pemantapan perluasan basis data dan pengembangan pengelolaan statistik sektoral dalam pengelolaan satu data Indonesia; 4. Pemantapan perluasan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah; 5. Pemantapan pengembangan pengelolaan arsip digital secara menyeluruh; 6. Pemantapan kualitas dokumen perencanaan melalui perencanaan yang integratif dan menyeluruh; 7. Pemantapan perluasan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan 	<p>bagi seluruh masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perwujudan penyelenggaraan SPBE yang inovatif dalam pelayanan publik; 3. Perwujudan pengelolaan satu data Indonesia yang berkelanjutan; 4. Perwujudan sistem data dan informasi pemerintah daerah yang handal; 5. Perwujudan pengelolaan arsip digital yang efektif dan efisien; 6. Perwujudan kualitas dokumen perencanaan yang tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis; 7. Perwujudan riset dan inovasi yang berkualitas dalam penanganan permasalahan dan isu strategis;

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>9. Optimalisasi sumber pendapatan, pengelolaan keuangan daerah, dan aset daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi;</p> <p>10. Optimalisasi penyelenggaraan SPIP dan peningkatan profesionalisme APIP;</p> <p>11. Penguatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>12. Penguatan kesadaran berpolitik pada masyarakat; dan</p> <p>13. Penguatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial;</p> <p>14. Penguatan reformasi hukum dan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel</p>	<p>permasalahan dan isu strategis;</p> <p>8. Percepatan dalam rangka mewujudkan ASN yang berakhlak;</p> <p>9. Percepatan kemandirian keuangan daerah yang meliputi penguatan kapasitas fiskal, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah;</p> <p>10. Percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP;</p> <p>11. Percepatan pelayanan publik berbasis modernisasi dan teknologi yang mudah diakses;</p> <p>12. Penguatan literasi politik masyarakat; dan</p> <p>13. Percepatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah konflik sosial;</p> <p>14. Percepatan reformasi dan hukum regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel.</p>	<p>permasalahan dan isu strategis;</p> <p>8. Pemantapan pengembangan penyelenggaraan manajemen ASN dalam rangka mewujudkan ASN berakhlak;</p> <p>9. Pemantapan perluasan sumber pendapatan daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah;</p> <p>10. Pemantapan penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik</p> <p>11. Pemantapan pelayanan publik berbasis modernisasi dan teknologi yang mudah diakses;</p> <p>12. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;</p> <p>13. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial; dan</p> <p>14. Pemantapan reformasi hukum dan regulasi</p>	<p>8. Perwujudan ASN yang berakhlak;</p> <p>9. Kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien;</p> <p>10. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;</p> <p>11. Perwujudan pelayanan publik</p> <p>12. Perwujudan masyarakat yang demokratis;</p> <p>13. Perwujudan kondisi masyarakat yang toleran dan damai; dan</p> <p>14. Perwujudan reformasi hukum dan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang berkualitas bersih dan akuntabel	
	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penguatan manajemen pengelolaan sampah, penguatan kesadaran masyarakat mengelola sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar. Penguatan penanganan limbah B3. Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan kampung proklam; <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan pemenuhan akses air minum layak, sanitasi layak. Peningkatan penyediaan IPLT; 3. Penguatan penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, peningkatan Prasarana Sarana Utilitas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indek kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penguatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan penanganan sampah tuntas ditempat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, penguatan sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar. Penguatan penanganan limbah B3. Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan kampung proklam; 2. Pemantapan pemenuhan akses air minum aman, sanitasi aman, peningkatan pemanfaatan IPLT; 3. Pemantapan erluasan penanganan Kawasan kumuh, perluasan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ketersediaan sumberdaya air, pengurangan lahan kritis, Pengurangan sampah an organic, digitalisasi pemantauan kualitas udara, air, perwujudan kampung Proklam; 2. Pemantapan akses air minum aman, sanitasi aman; 3. Pemantapan penanganan Kawasan kumuh, pemantapan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pemantapan prasarana sarana utilitas; 4. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 5. Pemantapan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, <i>zero waste</i>; 2. Perwujudan infrastruktur pelayanan dasar; 3. Perwujudan perumahan dan Kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni; 4. Perwujudan kondusivotas wilayah; dan 5. Perwujudan Menurunnya indeks Resiko Bencana

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>4. Penguatan kualitas keamanan ketertiban masyarakat, peningkatan penegakan peraturan daerah, penngkatan respontime penanganan kebakaran, peningkatan peran lintas sector dalam penanganan keamaan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kapasitas satpol PP; dan</p> <p>5. Penguatan pencegahan, mitigasi penangana bencana, peningkatan kelurahan/desa tangguh bencana.</p>	<p>perluasan Prasarana Sarana Utilitas;</p> <p>4. Mendorong pemantapan pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat secara massif, digitalisasi penegakan perda dan perkara; dan</p> <p>5. Pemantapan <i>early warning system</i>, penguatan mitigasi bencana dan mendorong peran lintas sektor.</p>		

5.2. Sasaran Pokok Daerah

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.

Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemandirian pangan, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 1) Peningkatan kualitas perekonomian daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan.
- AP 2) Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif
- AP 3) Meningkatnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi

Sasaran 2. Meningkatnya kemandirian pangan dan kemandirian desa, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 4) Keberlanjutan ketahanan pangan
- AP 5) Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran 3. Meningkatnya Daya Saing SDM, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 6) Pendidikan untuk semua,
- AP 7) Kesehatan untuk semua,
- AP 8) Keberlanjutan pemajuan kebudayaan,
- AP 9) Keberlanjutan literasi digital;

Sasaran 4. Meningkatnya kesejahteraan dan kesetaraan Gender, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 10) Peningkatan kesejahteraan pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta kesetaraan dan inklusif,
- AP 11) Pengurangan tingkat pengangguran terbuka

Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Kemandirian Daerah, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 12) Tata kelola pemerintahan dalam perwujudan *Good Governance*.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas inovasi dan IPTEK, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

- AP 13) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitian dalam mendorong pembangunan.

Sasaran 7. Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan terpenuhinya pelayanan dasar (rumah layak huni,

sanitasi aman dan air minum aman), dengan arah pembangunan sebagai berikut :

AP 14) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,

AP 15) Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni; sanitasi dan air minum aman.

Sasaran 8. Kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

AP 16) Terwujudnya ketangguhan bencana,

AP 17) Terwujudnya kondusivitas wilayah.

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Perumusan Sasaran Pokok Daerah

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemandirian pangan 2. Meningkatnya kemandirian pangan dan kemandirian desa	AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5	1. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan 2. Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatkan akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi 4. Keberlanjutan ketahanan pangan 5. Meningkatkan kemandirian desa	1. Menjamin keberlanjutan Produk pertanian, Modernisasi dan hilirisasi pertanian, SDM yang mendorong pertanian lestari, pemantapan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM pertanian, mendorong riset dan teknoogi dalam pengembangan pertanian dalam arti luas dalam ekonomi hijau 2. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui peningkatan kualitas sentra industri dan peningkatan pemanfaatan kawasan peruntukan industri sesuai dengan peruntukan dalam konsep ekonomi hijau 3. Peningkatan kualitas UMKM menuju UMKM naik kelas dan mendorong kualitas produk ekspor 4. Mempermudah layanan perijinan dalam	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	53,98	74,91	113,68	171,40	258,91
					2. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	47,02	48,21	49,59	51,01	53,62
					3. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,88	4,37	5,06	5,87	7,03
					4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	4,48	4,75	5,59	7,25	14,62
					5. Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
					6. Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,82	2,06	2,42	2,83	3,78
					7. Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,36	24,60	26,24	27,99	30,04
					8. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	2,16	2,25	2,37	2,48	2,61
					9. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/PDRB	%	2,13	2,22	2,33	2,45	2,57
					10. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,70	4,10	4,85	5,85	7,29

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			5. mendorong pertumbuhan investasi Pemantapan ekonomi siekuler dan mendorong green ekonomi	11. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	5.500	5.900	6.500	7.250	8.450
			6. Mewujudkan koperasi sebagai penyangga ekonomi kerakyatan	12. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	74,00	76,50	79,00	81,50	84,50
			7. Mengurangi disparitas harga dan penguatan daya beli masyarakat	13. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,40	85,00	87,50	90,00	92,00
			8. Pengembangan kapasitas dan kualitas BUMD dalam mendorong pembangunan daerah	14. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	8,12	6,95	5,48	4,02	2,26
			9. Keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif multiplier effect sektor pariwisata, peningkatan kualitas pariwisata, kolaborasi agro wisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, peningkatan akreditasi pariwisata (CHSE), peningkatan kualitas akomodasi dan restaurant pendukung pariwisata,	15. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	89,01	89,93	91,09	92,24	93,63
			10. pengembangan ekonomi kreatif yang mampu	16. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	50,94	53,46	56,60	59,75	63,52

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<p>mendorong pertumbuhan ekonomi</p> <p>11. peningkatan produksi pertanian dengan memperbaiki kualitas sistem jaringan irigasi, membangun prasarana sumberdaya alam (embung, dll) sebagai sumber air pertanian</p> <p>12. Perwujudan akses jalan mantap menuju pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi, akses jalan menuju wilayah wilayah perbatasan</p> <p>13. Perwujudan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan kemandirian pangan</p> <p>14. Perwujudan konektivitas antar wilayah dan Soloraya dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong keselamatan transportasi, dan kualitas terminal</p> <p>15. Perwujudan kemandirian desa melalui perwujudan desa mandiri, mendorong pertumbuhan kawasan</p>	17. Persentase Desa Mandiri	%	19,14	21,54	24,97	28,95	34,57

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			perdesaan mendorong pertumbuhan ekonomi							
Mewujudkan Kehidupan Sosial Berkarakter	3. Meningkatnya Daya Saing SDM 4. Meningkatnya kesejahteraan dan kesetaraan Gender	AP 6 Pendidikan untuk semua AP 7 Kesehatan untuk semua AP 8 Keberlanjutan Pemajuan Kebudayaan AP 9 Keberlanjutan literasi digital; AP 10 Peningkatan kesejahteraan pada pemerlu pelyanan kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta kesetaraan dan inklusif AP 11 Pengurangan tingkat pengangguran terbuka	16. Peningkatan dan pemerataan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kolaborasi dengan kemenag dalam penyediaan data anak sekolah 17. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan pendidikan penduduk sampai pendidikan tinggi, meningkatkan pemahaman masyarakat menuju jenjang pendidikan tinggi 18. Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan dalam rangka mendorong pendidikan terpenuhinya rata rata lama sekolah, dan mendorong kualitas pendidikan PAUD	18. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
				a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	61,46	64,66	68,66	72,66	76,62
				b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	59,49	65,09	72,09	79,09	87,66
				c) Numerasi SD/Sederajat	%	49,15	56,55	65,80	75,05	84,50
				d) Numerasi SMP/Sederajat	%	36,35	45,55	57,05	68,55	81,21
				19. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	14,23	14,59	14,96	15,79
				20. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,97	11,74	12,77	13,89	15,28
				21. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	98,82	100	100	100	100

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			19. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan jumlah tempat tidur layanan rujukan, peningkatan integrasi layanan primer, peningkatan kegiatan promotif dan preventif, 20. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dalam mendorong penurunan kematian ibu, penurunan 3T (terlalu sering, terlalu banyak dan terlalu tua) dalam mengurangi kematian ibu, meningkatkan kolaborasi program dalam penurunan kematian ibu	22.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,04	10,53	11,18	11,86	12,99
				23.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	78,00	79,26	80,85	82,48	84,40
				24.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	4,00	4,00	3,00	2,00	1,00
				25.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,65	11,99	9,90	7,82	5,31
				26.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	92,22	94,55	96,94	100
				27.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	93,25	93,81	94,37	95,00
				28.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,89	96,66	97,63	98,61	99,50
			22.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	%	64,64	68,93	71,91	75,02	80,04	

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			penyakit menular, mendorong eliminasi TBC, meningkatkan deteksi dini penyakit tidak menular, mendorong pemberdayaan masyarakat.	30. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian	%	93,60	93,78	93,90	94,03	94,18
			23. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, mendorong peran stakeholder dalam peningkatan kualitas keluarga	31. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	30,45	33,50	37,00	38,50	46,10
			24. Peningkatan kualitas pemajuan kebudayaan mendorong life center nusantara melalui peningkatan pelestarian cagar budaya, budaya tak benda, mendorong museum budaya sebagai pusat belajar bagi generasi muda,	32. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	128.500	130.500	133.000	135.500	138.500
			25. Peningkatan kualitas seni budaya di Kabupaten Karanganyar, mendorong riset dan teknologi dalam pengembangan pemajuan kebudayaan	33. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	20,45	23,00	26,20	27,80	29,65
			26. Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan,	34. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	8,26	8,29	8,33	8,36	8,41
				35. Tingkat Kemiskinan	%	8,96	8,47	5,87	2,51	0,47
				36. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,88	19,67	20,57	21,52	23,88

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			peningkatan pemanfaatan perpustakaan	37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,36	0,32	0,28	0,23	0,28
			27. Peningkatan kesejahteraan pada PPKS dan pengurangan kemiskinan melalui pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial,	38. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,07	3,39	2,69	2,14	1,22
			28. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin dan peningkatan peran serta masyarakat	39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,88	62,28	65,28	68,28	72,43
			29. Peningkatan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	40. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	38,14	45,34	54,34	63,34	74,31
			30. Penanganan pengangguran melalui peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja, kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, penguatan sistem pencari kerja, penguatan hubungan industrial, serta peningkatan penempatan kerja							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	5. Meningkatkan Tata Kelola Yang	AP 12 Tata kelola pemerintahan dalam	31. Perwujudan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan reformasi	41. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,91	75,78	77,08	78,38	80,00

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Yang Akuntabel, Inovatif dan Berdaya Saing	Akuntabel Dan Kemandirian Daerah 6. Meningkatnya kualitas inovasi dan IPTEK	perwujudan <i>Good Governance</i> AP 13 Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Penelitian dalam mendorong pembangunan	kepegawaian sesuai dengan System Merit 32. Peningkatan reformasi hukum, 33. Mendorong kualitas pengawasan 34. peningkatan kualitas pemerintahan berbasis elektronik, 35. Pelayanan publik yang mudah dijangkau 36. peningkatan kemandirian keuangan daerah 37. Perwujudan inovasi daerah yang mampu mendorong kualitas pembangunan daerah melalui penciptaan dan sinergitas inovasi dan penelitian didalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan	42. Indeks Reformasi Hukum	Angka	66,55	69,55	73,30	77,05	90,00
				43. Indeks Integritas Nasional	Angka	80,70	83,90	87,90	91,90	96,99
				44. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,60	3,78	4,01	4,26	5,00
				45. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,52	4,62	4,74	4,86	5,00
				46. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet/ persentase penduduk yang mengakses internet	%	75,52	81,75	90,26	99,65	100,00
				47. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,66	0,64	0,61	0,58	0,54
				48. Kapabilitas Inovasi	Angka	3,44	3,61	3,83	4,07	4,37
				Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	7. Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan terpenuhinya pelayanan dasar (rumah layak huni, sanitasi aman)	AP 14 Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, AP 15 Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman	38. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan penanganan dan pencegahan pencemaran udara, air, peningkatan tutupan lahan, mendorong keaneragaman hayati,	49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72,40
50. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	2.779.730,51	14.653.732,46					26.219.233,73	33.771.440,07	41.246.991,10

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan air minum aman) 8. Konduktivitas dan kesiapsiagaan bencana	yang terjangkau dan layak huni; sanitasi dan air minum aman AP 16 Terwujudnya ketangguhan bencana AP 17 Terwujudnya konduktivitas wilayah	39. pengelolaan sampah berbasis teknologi, pengurangan sampah melalui 3R, mendorong kolaborasi lintas sektor dalam perwujudan kualitas lingkungan hidup 40. Terwujudnya kualitas perumahan, peningkatan penyediaan perumahan dalam mengurangi backlog perumahan, mendorong akses rumah layak huni 41. Terwujudnya kawasan perumahan dan pemukiman yang layak melalui penangan kawasan kumuh, kualitas prasaranan dan sarana utilitas 42. peningkatan penyediaan sanitasi minum aman melalui ppenyediaan instalasi pembuangan air limbah terpadu, penyediaan jamban sehat dan aman, meningkatkan perilaku untuk menuju sanitasi aman, mendorong kolaborasi lintas sektor 43. peningkatan penyediaan air minum aman melalui meningkatkan	51. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 52. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 53. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 54. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 55. IRB (Indeks Resiko Bencana)	% % % % Angka	1,10 92,78 6,14 39,66 87,42	2,70 94,22 6,26 51,73 83,98	5,00 95,92 9,53 66,81 79,86	42,00 97,46 23,32 81,90 65,88	90,00 100,00 86,14 100,00 60,12

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline	Target (2025-2029)	Target (2029-2034)	Target (2035-2039)	Target (2040-2045)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<p>sambungan saluran PDAM di rumah tangga perkotaan, mendorong sumber air baku air minum, melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala sesuai dengan permenkes yang berlaku</p> <p>44. Perwujudan ketangguhan penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kualitas regulasi penanganan bencana dan pemberdayaan desa/keuarga tangguh bencana serta kecamatan tangguh bencana</p> <p>45. Perwujudan kondusivitas wilayah melalui peningkatan keamanandan ketertiban wilayah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan kerukunan antar umat beragama dan demokrasi yang aman</p>	56. Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0

Berikut hasil penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Karanganyar dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045:

Tabel 5.3.

Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	Jawa Tengah		Kabupaten Karanganyar	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	Kesehatan Untuk Semua	Meningkatnya Daya Saing SDM	Kesehatan untuk semua
		Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		Pendidikan untuk semua
		Perindungan Sosial yang Adaptif		Keberlanjutan literasi digital
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemandirian	Peningkatan kualitas perekonomian daerah berdasarkan potensi ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan.
		Penerapan Ekonomi Hijau		Pemantapan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Transformasi Digital		Meningkatnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi
		Integrai Ekonomi Domestik dan Global		Meningkatnya kemandirian desa
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Meningkatnya Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Kemandirian Daerah	Tata kelola pemerintahan dalam <i>Good Governance</i>
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
4	Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah	Ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial;	Kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana	Terwujudnya kondusivitas wilayah.
		Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Meningkatnya kualitas inovasi dan IPTEK

No	Jawa Tengah		Kabupaten Karanganyar	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	Kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana	Terwujudnya kondusivitas wilayah.
			Meningkatnya Daya Saing SDM	Keberlanjutan pemajuan kebudayaan
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Meningkatnya Daya Saing SDM	Keberlanjutan pemajuan kebudayaan
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kesejahteraan dan kesetaraan Gender	Peningkatan kesejahteraan pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta kesetaraan dan inklusif,
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari dan terpenuhinya pelayanan dasar (rumah layak huni, sanitasi aman dan air minum aman)	Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni; sanitasi dan air minum aman
		Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya kemandirian pangan dan kemandirian desa	Keberlanjutan ketahanan pangan
		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Kondusivitas dan kesiapsiagaan bencana	Terwujudnya ketangguhan bencana, Terwujudnya kondusivitas wilayah.

5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karanganyar sampai 2045 mengikuti arahan dokumen RTRW Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar dan arahan pengembangan wilayah dalam dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Berikut ini arah kebijakan pengembangan Wilayah di Kabupaten Karanganyar untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 adalah Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman.

Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah yaitu : WP Bregasmalang (Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal), WP Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan), WP Kedungsapur (Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Kota Semarang dan Salatiga), WP Jekuti (Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati), WP Banglor (Kabupaten Rembang dan Blora), WP Subosukawonosraten (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta), WP Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang), WP Wonobanjar (Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara), WP Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), WP Cibalingmas (Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banyumas).

WP Subosukawonosraten meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta diarahkan pengembangannya antara lain untuk mendorong pengembangan permukiman perkotaan Surakarta dan kabupaten di sekitarnya secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing. Kawasan ini didorong untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, industri, dan pertanian dengan memperhatikan kesesuaian peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah maka perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta menjaga alih fungsi lahan sawah. Dalam mendukung kemudahan pergerakan barang hasil produksi dari sektor industri dan pertanian maka perlu pengembangan fasilitas logistik di dalam wilayah pengembangan. Selain itu perlu adanya kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

BAB VI

P E N U T U P

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam dua puluh tahun ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar untuk turut andil dalam pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas,
2. Kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko,
3. Sistem kolaboratif dilaksanakan dalam mencapai pembangunan jangka panjang dengan semua *stakeholder* meliputi dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya,
4. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta
5. Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang jika didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Karanganyar, terutama bagi para calon kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar) dalam setiap periode RPJPD. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 yaitu "**Karanganyar Life Center Of Nusantara 2045 : "Maju, Kompetitif, dan Harmoni"**" akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

